

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2010-2014 perubahan telah selesai disusun tepat waktu. Perubahan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi serta Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Rencana Strategis tersebut tetap merupakan jabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang memuat Visi dan Misi pemerintah 5 tahun ke depan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman peningkatan kinerja BKKBN dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN dalam menyelenggarakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada tim penyusun, para pakar dan semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014 tersusun dengan baik.

Jakarta, Mei 2011

Sekretaris Utama,

DR. Sudibyo Alimoeso, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN KEPALA	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	5
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.1. VISI.....	8
2.2. MISI.....	8
2.3. TUJUAN.....	8
2.4. SASARAN STRATEGIS.....	9
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	10
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	10
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BKKBN	10
IV. PENUTUP	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	15
TABEL 1.1 Matrik Kinerja BKKBN	
TABEL 1.2 Matrik Pendanaan BKKBN	
TABEL 1.3 Matrik Struktur Program	

ADENDUM PERATURAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: 133/PER/B1/2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BKKBN TAHUN 2010-2014 UNTUK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin berat dan perubahan lingkungan strategis yang berkembang, maka upaya untuk mewujudkan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu lebih ditingkatkan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
	b.	bahwa dalam rangka mewujudkan visi "Penduduk Tumbuh Seimbang 2015" dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 serta dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu disusun strategi, kebijakan, rencana kerja dan indikator kinerja Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014;
	c.	bahwa Rencana Strategis BKKBN Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana disusun mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis, serta perencanaan pendanaan yang memperhatikan sistem perencanaan anggaran yang berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran terpadu (<i>Unified Budgeting</i>) dan menggunakan pendekatan <i>Balanced Score Card</i> (BSC);
	d.	bahwa dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu disesuaikan Rencana Strategis BKKBN Tahun 2010-2014 (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nomor 47/HK-010/D5/2010).

Mengingat :	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
	3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
	4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
	6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
	7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
	8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

	9.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
	10.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
	11.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
	12.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
	13.	Keputusan Menteri Republik Indonesia Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala BKKBN Nomor 10/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBNPusat;
	14.	Keputusan Menteri Republik Indonesia Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor 70/HK-070/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kab/Kota;
	15.	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
	16.	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
	17.	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BKKBN TAHUN 2010-2014 UNTUK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.
KESATU :	Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam peraturan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan suatu rencana dan acuan dalam penyusunan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana baik di tingkat nasional dan merupakan acuan untuk penyusunan Renstrada yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015;
KEDUA :	Renstra BKKBN Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
KETIGA :	Renstra ini disusun untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada umumnya dan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional pada khususnya;
KEEMPAT :	Uraian lengkap Rencana Strategis BKKBN Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
KELIMA :	Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Mei 2011

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga menentukan Rencana Strategis (Renstra) K/L setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehubungan dengan hal tersebut, Renstra BKKBN tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014. Renstra ini meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis, dan perencanaan pendanaan berdasarkan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran terpadu (*Unified Budgeting*). Di samping itu penyusunan perencanaan program dan anggaran BKKBN telah menggunakan suatu instrumen pengelolaan kinerja yaitu *Balanced Scorecard* (BSC) dan hasil restrukturisasi.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga peran BKKBN tidak terbatas pada penyelenggaraan Program KB akan tetapi juga meliputi penyerasian pengendalian penduduk. Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kerjanya.

1.1 KONDISI UMUM

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital*) dan obyek (*human resources*) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (*life cycle approach*). Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: **Pertama** berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; **Kedua** berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; **Ketiga** adalah mobilitas

penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; **Keempat** adalah data dan informasi penduduk; **Kelima** adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Pembangunan Kependudukan merupakan program lintas sektor, oleh sebab itu penyerasian kebijakan antar bidang dan antar sektor harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertolak belakang. Sejak tidak adanya lembaga pemerintah yang menangani penyerasian kebijakan tersebut, banyak terjadi ketidakselarasan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah di Indonesia, termasuk dalam penyediaan dan peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan serta pengarahannya mobilitas penduduk.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan **transisi demografi**. Transisi demografi tersebut ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan. Selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan angka ketergantungan menurun yang disebut dengan **bonus demografi**. Bonus demografi ini merupakan **jendela peluang** (*Window of Opportunity*) yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi atau jendela peluang tersebut diperkirakan akan terjadi hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 2020-2025 (Proyeksi Penduduk berdasarkan SUPAS 2005), dengan syarat angka kelahiran dapat dikendalikan.

Oleh sebab itu melalui Pembangunan Kependudukan dan KB (Pembangunan KKB), Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkannya. Peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila: (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan untuk mendorong mereka memasuki pasar kerja sehingga dapat menambah tabungan keluarga.

Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat memperlambat pertumbuhan penduduk secara signifikan. Sejak Program KB Nasional dikembangkan tahun 1971 sampai dengan 2009, keberhasilannya diperkirakan telah mencegah lebih dari 100 juta kelahiran. Oleh karena itu, Program KB telah berhasil mengubah kondisi piramida penduduk Indonesia dari penduduk muda menuju penduduk dewasa.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana pada tahun 2004-2009, antara lain:

- (1) Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) secara nasional cenderung menurun dari 2,4 (SDKI 2002/2003 setelah revisi) menjadi sekitar 2,3 anak per perempuan usia reproduksi (SDKI 2007 setelah direvisi). Penurunan TFR antara lain didorong oleh meningkatnya median usia kawin pertama perempuan dari sekitar 19,2 tahun (SDKI 2003), menjadi 19,8 tahun menurut SDKI 2007. Selain itu juga disebabkan karena penurunan ASFR 15-19 tahun dari 35 menjadi 30 per 1000 perempuan.
- (2) Dari aspek kualitas penduduk, program Keluarga Berencana Nasional juga telah membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga Indonesia karena dengan dua atau tiga anak, setiap keluarga lebih dapat memenuhi hak-hak dasar anak-anaknya.

Di samping pencapaian tersebut di atas, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan KKB selama periode 2004-2009 adalah sebagai berikut :

Masih tinggi dan bervariasinya angka kelahiran. Berdasarkan hasil SDKI tahun 2007, walaupun TFR cenderung menurun namun tingkatnya belum mencapai sasaran yang ideal yaitu TFR 2.1. Selain itu, tingkat kelahiran sangat bervariasi antar provinsi, menurut kondisi sosial, ekonomi, serta geografis. Hasil SDKI 2007 setelah direvisi menunjukkan bahwa TFR terendah berada pada tingkat 1,5 di D.I Yogyakarta dan tertinggi 3,7 di NTT dan Maluku. Menurut data SDKI yang belum direvisi, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok miskin (4,2) lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang lebih mampu (3,0). Selanjutnya, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berpendidikan rendah (4,1) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan berpendidikan tinggi (2,7).

Bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi. Prevalensi pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence rate/CPR*) masih rendah dan bervariasi antar provinsi, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan desa-kota. Bila dilihat hasil SDKI 2002-2003 dan 2007, CPR tidak memperlihatkan peningkatan yang berarti, yaitu masing-masing dari 56,7 persen menjadi 57,4 persen (cara modern) dan dari 60 persen menjadi 61,4 persen (semua cara). CPR terendah terdapat di Maluku sekitar 33,9 persen dan tertinggi di Bengkulu sekitar 73,9 persen.

Masih tinggi dan bervariasinya *unmet need*. Jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda punya anak atau tidak menginginkan anak lagi tapi tidak ber-KB (*unmet need*) meningkat dari 8,6 persen pada SDKI 2002-2003 menjadi 9,1 persen pada SDKI 2007. *Unmet need* sangat bervariasi antar provinsi, terendah sebesar 3,2 persen di Bangka Belitung dan tertinggi di Maluku sebesar 22,4 persen.

Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan PUS tentang keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman. Hal ini dapat dicermati dari hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2007, memperlihatkan bahwa 2 persen wanita dan 8 persen pria mengatakan setuju apabila pria melakukan hubungan seksual pra-nikah. Hanya 1 persen wanita dan 5 persen pria yang setuju apabila wanita melakukan hubungan seks pra-nikah.

Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja. Berdasarkan data dari BKKBN, persentase keluarga yang memiliki anak balita yang aktif melakukan pembinaan tumbuh-kembang anak melalui kegiatan kelompok BKB cenderung menurun, yaitu dari 29 persen pada tahun 2006, menjadi sekitar 10 persen pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah kelompok BKB yang aktif, terlihat penurunan yang cukup bermakna yaitu dari 106.755 kelompok pada tahun 2005, menjadi 81.635 kelompok pada tahun 2006, dan turun lagi menjadi 69.573 kelompok pada bulan September 2007, pada akhir tahun 2008 meningkat kembali menjadi 76.218 kelompok, dan pada akhir tahun 2009 mencapai 78.040 kelompok. Sementara, jumlah kelompok BKR pada tahun 2006 tercatat sebanyak 32.279 kelompok, mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 28.408 kelompok, pada akhir 2008 meningkat kembali menjadi 30.782 kelompok, dan pada akhir 2009 mengalami peningkatan kembali menjadi 32.535 kelompok.

Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB. Menurut teori kependudukan, pada saat CPR telah mencapai di atas 50 persen, sangat sulit untuk meningkatkan peserta KB oleh karena sisa PUS pada umumnya adalah kelompok-kelompok sulit (*hard core*) yang memerlukan terobosan-terobosan baru untuk mengajak mereka ber-KB. Salah satu upaya inovatif yang dipergunakan untuk mengajak mereka ber-KB adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok kegiatan (poktan) yang ada, salah satunya adalah UPPKS. Di samping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Pra-sejahtera dan Sejahtera I maka upaya peningkatan pendapatan keluarga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kesertaan ber KB nya. Namun sampai dengan saat ini poktan tersebut belum optimal dalam meningkatkan dan membina kesertaan ber-KB serta meningkatkan kemandiriannya.

Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horizontal, serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk. Hal ini berdampak pada melambatnya pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir karena terjadi in-efisiensi dalam pembangunan. Oleh karena penanganan masalah kependudukan melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan, maka para pemangku kepentingan tersebut harus dapat berbagi visi, satu tujuan, dan satu tekad, menuju pembentukan SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada upaya bersama yang saling bersinergi (*concerted efforts*) antara semua pemangku kepentingan. Upaya tersebut seharusnya dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang mempunyai tugas antara lain menyeraskan kebijakan kependudukan secara konsisten

dan berkesinambungan, mengingat keberhasilan kebijakan kependudukan baru terlihat hasilnya beberapa dekade mendatang, yakni adanya peningkatan kualitas SDM.

Di samping hal tersebut di atas, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah sebesar 237,6 juta dengan angka laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi yaitu sebesar 1,49 %, struktur pendudukan usia balita, remaja dan lansia cukup tinggi. Apabila ketidakserasian kebijakan pemerintah dalam pembangunan lainnya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan maka peluang untuk mewujudkan kondisi penduduk seimbang akan hilang sehingga upaya dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan pada tahun 2020-2025 juga akan tertunda. Paradigma arah pembangunan nasional saat ini yang belum menempatkan bidang kependudukan sebagai platform pembangunan utama akan menjadi ancaman dalam pembangunan SDM yang berdaya saing di masa yang akan datang.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh BKKBN dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1.2.1. Potensi

Potensi BKKBN dapat diidentifikasi dari hasil analisis sebagai berikut :

1. Reputasi dan pengalaman BKKBN dalam pengendalian penduduk melalui program KB dengan menggerakkan masyarakat dan promosi program KB.
2. Keberadaan pusat-pusat pelatihan dan penelitian Pembangunan KKB yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dan mitra kerja.
3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, baik untuk kepentingan internal dan eksternal.
4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah, baik internasional maupun nasional dan daerah, serta non pemerintah.
5. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pembangunan KKB yang mengharuskan menerapkan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
6. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal membutuhkan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelembagaan budaya kerja “Cerdas, Ulet dan Kemitraan (CUK)”.

Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan salah satu modal dasar bagi BKKBN untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang amanah dalam merevitalisasi Program KB dan menyeraskan kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan lainnya.

1.2.2. Permasalahan

Di samping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam Pembangunan Kependudukan dan KB seperti telah diuraikan di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode pembangunan lima tahun mendatang. Permasalahan di bawah ini meliputi kelemahan dan tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan BKKBN dan pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB.

a. Kelemahan

1. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur BKKBN yang disebabkan adanya kebijakan *zero growth* terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 8 tahun (1996-2004).
2. Sarana dan prasarana operasional pergerakan masyarakat yang kurang memadai.
3. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KB tidak optimal.

b. Tantangan

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Program KB terutama di tingkat kabupaten/kota. Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang menyebabkan bervariasinya kelembagaan yang menangani Program KB Nasional di kabupaten/kota. Dengan berubahnya kelembagaan pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi **Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional** tentu akan diikuti pula dengan perubahan kelembagaan pengelola Program Kependudukan dan Keluarga Berencana baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas PLKB (PPLKB) di tingkat kecamatan dan Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat kelurahan/desa yang merupakan ujung tombak Program KKB. Data terakhir menunjukkan bahwa PPLKB berjumlah 4.486 orang atau 99 persen dari jumlah sebelum desentralisasi, sedangkan jumlah PLKB/PKB hanya 19.566 orang atau 75 persen dari jumlah sebelumnya.
3. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga lapangan merata. Sebelum otonomi, 1 PLKB/PKB menangani 2-3 kelurahan/desa sedangkan data terakhir menunjukkan 1 PLKB/PKB menangani 4-5 kelurahan/desa dan bahkan ada kelurahan/desa yang tidak memiliki PLKB/PKB lagi, karena mereka sudah beralih tugas ke

bidang/instansi lain. Dengan semakin berkurangnya petugas PPLKB dan PLKB, mekanisme operasional program tidak berjalan seperti sebelum otonomi.

4. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran Program KKB di kabupaten/kota yang kurang memadai. Dengan demikian, BKKBN harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dan KB menjadi program prioritas di daerah.
5. Meningkatkan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB. Statistik rutin BKKBN bulan Desember 2009 tercatat sekitar 85.562 PPKBD dan 391.474 Sub-PPKBD.
6. Meningkatkan sinergitas kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan KB baik di pusat maupun daerah.

c. Peluang

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BKKBN mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan nasional, penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.
2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan Program KB di tingkat pusat, dan kabupaten/kota.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Pembangunan KKB Nasional.

BAB II

VISI, MISI

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi BKKBN adalah "**Penduduk Tumbuh Seimbang 2015**". Visi tersebut mengacu kepada fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan Visi misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010-2014. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah : **mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera**. Misi tersebut dilakukan melalui : penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; penetapan parameter penduduk; peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi; pengendalian penduduk dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta; mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk Menyelenggarakan Pembangunan Keluarga Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

2.3. TUJUAN

Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi BKKBN, maka tujuan yang harus dicapai oleh BKKBN yaitu:

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.
2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sebagai dasar penetapan sasaran Renstra Pembangunan Kependudukan dan KB 2010-2014 adalah sasaran RPJPN 2005-2025, sasaran Renstra Program KB 2004-2009 yang belum terselesaikan, sasaran kesepakatan internasional seperti **International Conference of Population Development (ICPD)** di Cairo tahun 1994 dan **Millennium Development Goals” (MDGs)**, serta mandat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Untuk mencapai penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 persen, *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,1 dan *Net Reproductive Rate* (NRR) = 1, maka sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern dari 57,4 persen (SDKI 2007) menjadi 65 persen.
2. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (*unmet need*) dari 9,1 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 5 persen dari jumlah pasangan usia subur.
3. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun.
4. Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 35 (SDKI 2007) menjadi 30 per seribu perempuan.
5. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 persen.
6. Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen.
7. Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 80 persen menjadi 82 persen, dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar 70 persen.
8. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja.
9. Menurunnya disparitas TFR, CPR dan *unmet need* antar wilayah dan antar sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi).
10. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya.
11. Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota.
12. Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (*informed consent*) dari 20 persen menjadi sebesar 85 persen.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama yang ditandai dengan NRR= 1 maka arah kebijakan pembangunan kependudukan dan KB dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan melalui tiga fokus prioritas: **Pertama**, revitalisasi program KB melalui: (a) pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender; (b) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; (c) promosi dan penggerak masyarakat; (d) peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; (e) pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; dan (f) peningkatan kualitas manajemen program; **Kedua**, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, melalui: (a) penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk; (b) perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; dan (c) penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait; **Ketiga**, peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, melalui: (a) penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan; (b) penyediaan hasil kajian kependudukan; dan (c) peningkatan cakupan registrasi vital.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BKKBN

3.2.1. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil bahagia sejahtera, yang ditandai dengan menurunnya angka TFR menjadi 2,1 dan NRR = 1,0, meningkatnya CPR cara modern menjadi 65%, meningkatnya median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan menjadi 21 tahun, menurunnya ASFR (15-19 tahun) menjadi 30 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun, meningkatnya kesejahteraan peserta KB dan meningkatnya ketahanan keluarga maka arah kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Revitalisasi Program KB, yang ditekankan pada:
 - 1) Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;

- 2) Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - 3) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis Teknologi Informasi (IT);
 - 4) Pelatihan, penelitian, dan pengembangan program kependudukan dan KB;
 - 5) Peningkatan kualitas manajemen program;
- b. Penyerasian kebijakan pengendalian Penduduk yang ditekankan pada :
- 1) Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk;
 - 2) Perumusan Kebijakan Kependudukan yang sinergis anatar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas;
 - 3) Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

3.2.2. Strategi

Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dengan menyeraskan kebijakan pengendalian penduduk, menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan, mensosialisasikan kebijakan dan program kependudukan serta melakukan analisis dampak kependudukan.
- b. Melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana melalui pembinaan dan kemandirian ber KB;
- c. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan rejama dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKS;
- d. Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan meningkatkan peranserta mitra kerja;
- e. Menyediakan dan menyebarkan data dan informasi kependudukan dan KB yang akurat dan terpercaya;
- f. Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB;
- g. Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

3.2.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan pedoman penyusunan restrukturisasi program dan kegiatan dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Keuangan tahun 2009, BKKBN yang termasuk kategori Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) program teknis. Sedangkan program generik berlaku sama dengan Kementrian/Lembaga lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut BKKBN setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 mempunyai 1 (satu) program teknis yaitu Program Kependudukan dan KB; dan 3 (tiga) program generik yaitu: 1). Program pelatihan dan pengembangan BKKBN, 2). Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya BKKBN, 3). Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

- a. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari kegiatan :
 - (1) Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - (2) Perencanaan Pengendalian Kependudukan
 - (3) Kerjasama Pendidikan Kependudukan
 - (4) Analisis Dampak Kependudukan
 - (5) Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah
 - (6) Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan KB Jalur Swasta
 - (7) Peningkatan Kesertaan ber KB Galcitas, Wilayah Khusus dan Sasaran Khusus
 - (8) Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
 - (9) Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
 - (10) Pembinaan Ketahanan Remaja
 - (11) Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - (12) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - (13) Peningkatan Advokasi, KIE Program Kependudukan dan KB
 - (14) Peningkatan Kemitraan Dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah
 - (15) Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
 - (16) Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB
 - (17) Penyediaan Teknologi Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB
 - (18) Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi
- b. Program generik dan kegiatan prioritas yang ada di BKKBN adalah sebagai berikut:
 - 1) Program pelatihan dan pengembangan BKKBN, terdiri dari kegiatan:
 - (19) Pengembangan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - (20) Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - (21) Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- (22) Penelitian dan pengembangan Kependudukan
- 2) Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya BKKBN terdiri dari kegiatan:
 - (23) Perencanaan Program dan Anggaran
 - (24) Pengelolaan Administrasi Pegawai
 - (25) Pengelolaan Administrasi umum
 - (26) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - (27) Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas
- 3) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN terdiri dari kegiatan:
 - (28) Peningkatan Pengawasan Program
 - (29) Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan
 - (30) Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

Rincian indikator dan target Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Matriks Kinerja (tabel 1.1) dan Matriks Pendanaan (tabel 1.2) BKKBN terlampir. Sedangkan Struktur Program dan Uraian Kegiatan nya dapat dilihat pada tabel 1.3.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2010-2014 disusun dengan berpedoman kepada program-program pokok dan prioritas RPJMN 2010-2014, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas melalui pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2010-2014 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengusulan pendanaan BKKBN dan menjadi masukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Di samping itu Renstra merupakan rujukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) sehingga program dan kegiatan prioritas yang diusulkan selama 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan Pengusulan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Penganggaran Terpadu (*Unified Budgeting*).

Renstra BKKBN disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 yang mengatur tupoksi BKKBN tidak hanya dalam bidang keluarga berencana tetapi juga mencakup penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan kualitas data dan informasi kependudukan. Dengan tersusunnya pedoman Renstra ini, diharapkan BKKBN dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015.

LAMPIRAN

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2011	2012	2013	2014		
I	PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG	Unmet Need *(data SDKI)	-	6,2*	-	5	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	
			Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) *(data SDKI)	-	62,5*	-	65		
			1 Jumlah peserta KB baru /PB (juta)	7,2	7,3	7,5	7,6		
			2 Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)	27,5	28,2	29,0	29,8		
			3 Jumlah peserta KB baru mandiri (juta)	3,4	3,4	3,5	3,6		
			4 Persentase peserta KB aktif mandiri	49,6	49,7	50,9	51		
			5 Persentase peserta KB baru MKJP	12,5	12,9	13,2	13,6		
			6 Persentase peserta KB aktif MKJP	25,1	25,9	26,7	27,5		
			7 Persentase peserta KB baru Pria	4,0	4,3	4,6	5,0		
			8 Jumlah peserta KB baru /PB KPS dan KS I (juta)	3,80	3,89	3,97	4,05		
			9 Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS I (juta)	12,2	12,5	12,8	13,1		
			10 Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia	70	75	80	85		
			11 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	95	95	95	95		
12 Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan	2	2	2	2					
A	PENGENDALIAN PENDUDUK	TERSEDINYA DAN TERSOSIALISASIKANNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN KEPENDUDUKAN	1 Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan	2	2	2	2	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	
			2 Jumlah parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu dan disepakati oleh stakeholders	2	2	2	2		
			3 Persentase perguruan tinggi, sekolah dan organisasi pemuda yang melaksanakan pendidikan kependudukan	0	20	20	20		
			4 Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan	20	50	60	80		
1	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Tersedianya grand design pembangunan kependudukan dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan						Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	
			1 Grand Design pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan	1 Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan	2	2	2		2
			1a Kebijakan, strategi dan materi informasi Pengendalian penduduk (pedoman, juklak/juknis)	1a Jumlah Kebijakan, strategi dan materi informasi Pengendalian penduduk	0	2	2		2
			2 Kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan/ Kajian Kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	2 Jumlah Hasil kajian kebijakan pengendalian penduduk	3	2	2		2
		3	Kemitraan dalam Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk	3 Jumlah mitra kerja (TOGA, TOMA, ORMAS, Universitas, PSK) yang terlibat dalam pengkajian kebijakan pembangunan sektor berwawasan kependudukan.	40	40	40	40	
		4	Menyediakan fasilitasi pengkajian Kebijakan sektor	4 Jumlah stakeholder (K/L, Legislatif, Pemda/Pemkab, Pemprov) yang difasilitasi	3 (pusat)	3 (pusat) 33	3 (pusat) 33	3 (pusat) 33	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		pembangunan	untuk menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan (pusat dan provinsi)		(provinsi)	(provinsi)	(provinsi)	
		5 Tenaga pengelola yang kompeten dalam pemaduan kebijakan pengendalian penduduk	5 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	8	74	74	74	
		6 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	6 Jumlah Monitoring, evaluasi dan pembinaan program Pemaduan Kebijakan pengendalian penduduk	1 (pusat) 33 (provinsi)				
			6a Jumlah stakeholder provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan program penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.	-	33	66	66	
2	Perencanaan Pengendalian Penduduk	Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor						Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk
		1 Kebijakan dan strategi penetapan parameter kependudukan	1 Jumlah kebijakan dan strategi penetapan parameter kependudukan	1	1	1	1	
		2 Kajian parameter kependudukan	2 Jumlah kajian parameter kependudukan yang dihasilkan tepat waktu dan dimanfaatkan	1	1	1	1	
		3 Parameter kependudukan	3 Jumlah parameter Kependudukan (pusat dan provinsi) yang disepakati oleh stakeholder (Struktur, pertumbuhan, kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk)	2 (1 pusat 33 provins)	2 (1 pusat 33 provinsi)	2 (1 pusat 33 provinsi)	2 (1 pusat 33 provinsi)	
		4 Mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan	4 Jumlah mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan (pusat dan provinsi)	4	37	37	37	
		5 Tenaga pengelola yang kompeten dalam Perencanaan pengendalian penduduk	5 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam perencanaan pengendalian penduduk	8	74	74	74	
		6 Monitoring ,Evaluasi dan pembinaan Perencanaan pengendalian penduduk	6 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan perencanaan pengendalian penduduk	1 pusat dan 33 provinsi				
			6a Persentase permasalahan program perencanaan pengendalian penduduk yang ditindaklanjuti dari hasil identifikasi	0	70	80	95	
			6b Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan program perencanaan pengendalian penduduk	-	33	33	33	
			6c Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program perencanaan pengendalian penduduk (pusat dan provinsi)	4	37	37	37	
		7 Proyeksi Penduduk	7 Jumlah Proyeksi Penduduk Nasional dan provinsi yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu.	1 pusat	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		8	Kemitraan dalam penyusunan proyeksi penduduk	8	Jumlah mitra kerja dalam penyusunan proyeksi penduduk	4	37	37	37	
3	Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan Berwawasan Kependudukan								Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
		1	Kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan	1	Jumlah kebijakan, dan strategi program pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	
		2	Kemitraan dalam pendidikan kependudukan	2	Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendidikan kependudukan	4	4	4	4	
		3	Pendidikan Kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal	3	Jumlah stakeholder yang mendukung terselenggaranya pendidikan kependudukan	2	4	4	4	
		3a	Persentase perguruan tinggi, sekolah dan organisasi pemuda yang melaksanakan pendidikan kependudukan	3a	Persentase perguruan tinggi, sekolah dan organisasi pemuda yang melaksanakan pendidikan kependudukan	0	20	20	20	
		4	Modul pendidikan kependudukan	4	Jumlah Modul pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan	4	3	0	7	
		5	Tenaga yang kompeten dalam pendidikan kependudukan	5	Jumlah tenaga pengelola pendidikan kependudukan yang terampil dan tenaga pendidik yang kompeten.	8	74	74	74	
		6	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	6	Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan pendidikan kependudukan	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	
		6a	Persentase permasalahan program pendidikan kependudukan yang ditindaklanjuti dari hasil identifikasi	6a	Persentase permasalahan program pendidikan kependudukan yang ditindaklanjuti dari hasil identifikasi	0	70	80	95	
		6b	Jumlah provinsi dan mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan pendidikan kependudukan.	6b	Jumlah provinsi dan mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan pendidikan kependudukan.	33	33	33	33	
4	Analisis Dampak Kependudukan	Tersedianya Analisis Dampak Kependudukan yang tajam dan komprehensif Dalam Rangka Penyerasian Kebijakan Berwawasan Kependudukan								Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
		1	Kebijakan, strategi dan materi analisis dampak kependudukan yang dimanfaatkan	1	Jumlah Kebijakan, strategi dan materi analisis dampak kependudukan yang dimanfaatkan	1	1	1	1	
		2	Kajian dan Analisis Dampak kependudukan terhadap ekonomi, politik, sosial lingkungan, pertahanan keamanan	2	Jumlah kajian dan Analisis Dampak kependudukan (kualitas, kuantitas, mobilitas, pertumbuhan) :	4	4	4	4	
		2a	Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kuantitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan	2a	Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kuantitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan	1	1	1	1	
		2b	Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kualitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan	2b	Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kualitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan	1	1	1	1	
		2c	Jumlah Kajian dan Analisis Dampak mobilitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan	2c	Jumlah Kajian dan Analisis Dampak mobilitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan	1	1	1	1	
		2d	Jumlah Kajian dan analisis dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2d	Jumlah Kajian dan analisis dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1	1	1	1	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			2e Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan	20	50	60	80	
		3 Kemitraan dalam Analisis dampak kependudukan	3 Jumlah mitra kerja yang mendukung pelaksanaan Analisis dampak kependudukan	4	37	37	37	
		4 Tenaga pengelola yang kompeten dalam Analisis Dampak Kependudukan	4 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam Analisis Dampak Kependudukan (orang)	8	74	74	74	
		5 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Analisis Dampak Kependudukan ke tk provinsi	5 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan analisis dampak kependudukan	1 pusat dan 33 provinsi				
			5a Persentase permasalahan program Analisis Dampak Kependudukan yang ditindaklanjuti dari hasil monitoring dan evaluasi	0	70	80	95	
			5b Jumlah provinsi dan mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Analisis Dampak Kependudukan (4 pusat dan 33 provinsi)	37	37	37	37	
B	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN KELUARGA BERENCANA	MENINGKATNYA PEMBINAAN KESERTAAN DAN KEMANDIRIAN BER-KB	1 Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB	23500	23500	23500	23500	DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
			2 Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (penggunaan Inform Consent) (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta)	35	50	70	85	
			3 Prosentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan kesertaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri	50	60	70	75	
			4 Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR	20	30	40	50	
			5 Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Jalur Pemerintah	6	8	10	12	
			6 Persentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus yang terintegrasi kedalam kebijakan pembangunan disektornya	40	50	60	70	
			7 Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus	2	4	4	6	
5	Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	Meningkatnya Pembinaan dan Kesertaan KB Melalui 20.203 Klinik KB Pemerintah						Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
		1 Kebijakan dan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB jalur pemerintah	1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses pelayanan KB Jalur Pemerintah yang dapat dioperasionalkan.	6	6	6	6	
			1a Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang kualitas pelayanan KB jalur pemerintah yang dapat dioperasionalkan	5	5	5	5	
			1b Jumlah peta kerja pembinaan kesertaan pelayanan KB jalur pemerintah lengkap, akurat dan tepat waktu	1	1	1	1	
		2 Alat kontrasepsi	2 Ketersediaan alat kontrasepsi					

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			2a Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan ketersediaan Alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan KSI, seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos, Jampersal dan lain-lain) (juta)	4,75	4,89	4,99	5,08	
			2b Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta)	3,85	3,89	3,97	4,05	
			2c Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta)	12,2	12,5	12,8	13,10	
		3 Sarana dan prasarana pelayanan KB di klinik KB	3 Jumlah Klinik KB pemerintah dan swasta yg mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB	23.500	4.700	4.700	4.700	
			3a Sarana dan Prasarana standar					
			Jumlah buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi (BP3K) exemplar	23500	-	-	-	
			IUD Kit	22820	12180	-	-	
			Implant Kit	500	5114	3736	3113	
			3b Sarana dan Prasarana Pendukung					
			Obgyn Bed	810	388	342	-	
			VTP Kit	796	554	277	185	
			Minilap Kit	817	570	285	190	
			Laparoscopy	139	137	137	137	
			Dry Sterilisator	100	100	100	100	
			Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)	13700	10000	10000	3500	
		5 Kerjasama antara BKKBN dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan KB Jalur Pemerintah	4 Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Jalur pemerintah	6	8	10	12	
			4a Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan kesertaan KB jalur Pemerintah yang dapat dilaksanakan	6	8	10	12	
		6 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Program kesertaan KB Jalur pemerintah	5 Jumlah pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pembinaan program pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah (Pusat dan Provinsi)	1 pusat dan 33 provinsi				
			5a Persentase permasalahan program pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah yang teridentifikasi dan diatasi.	90	90	90	90	
			5b Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Jalur pemerintah	33	33	33	33	
			5c Prosentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan kesertaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri	50	60	70	75	
6	Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta	Meningkatnya Pembinaan Kemandirian dan Kesertaan Ber-Kb Melalui 3.297 Klinik KB Swasta, 70.000 DPS dan BPS						Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta
	1 Kebijakan, Strategi materi informasi peningkatan Akses dan kualitas pelayanan KB Jalur Swasta		1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Jalur swasta yang dapat dioperasionalkan(NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, peta kerja)	6	6	6	6	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			1a Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Jalur swasta yang dapat dioperasionalkan(NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional)	5	5	5	5	
			1b Jumlah peta kerja pelayanan KB jalur swasta yang lengkap dan up to date	1	1	1	1	
		2 Kerjasama antara BKKBN dengan Fasilitas pelayanan KB jalur Swasta	2 Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kemandirian kesertaan KB swasta	11	13	15	17	
			2a Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan kesertaan KB jalur swasta yang dapat dilaksanakan	11	13	15	17	
		3 Tenaga pengelola dan pelayanan KB medis dan non medis yang kompeten di Klinik KB Pemerintah dan Klinik KB Swasta.	3 Jumlah tenaga pelatih medis teknis	165	231	264	330	
		4 Sarana prasarana pelatihan medis teknis dan pelayanan KB swasta	4 Jumlah sarana prasarana pelatihan medis teknis dan pelayanan KB swasta	6157	19700	3800	-	
			4a Phantom untuk pelatihan IUD, Implant, MOW dan MOP	6157	-	-	-	
			4b Papan Petunjuk klinik Pelayanan KB	-	19700	3800	-	
		5 Alat obat Kontrasepsi Jaminan ketersediaan alkon mandiri	5 Jenis alkon mandiri (LIBI) yang beredar dipasaran	1	2	3	4	
		6 Monitoring,Evaluasi dan pembinaan Program kesertaan KB Jalur Swasta	6 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pembinaan kemandirian dan kesertaan KB jalur swasta (Pusat dan Provinsi)	1 pusat dan 33 provinsi				
			6a Persentase permasalahan program pembinaan kemandirian dan kesertaan KB jalur swasta yang ditindaklanjuti dari yang teridentifikasi	90	90	90	90	
			6b Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kemandirian dan kesertaan KB Jalur swasta	33	33	33	33	
7	Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	Meningkatnya Pembinaan dan Kesertaan KB di daerah Galciltas , wilayah khusus dan sasaran khusus.						Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
		1 Kebijakan, strategi dan materi informasi tentang peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	1 Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB yang dapat dioperasionalkan di daerah Galciltas, wilayah khusus, Sasaran Khusus. dan berwawasan gender (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)	7	7	7	7	
			1a Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. yang dapat dioperasionalkan	5	5	5	5	
			1b Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB berwawasan gender yang dapat dioperasionalkan	1	1	1	1	
			1c Jumlah peta kerja pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus lengkap dan up to date	1	1	1	1	
		2 Kerjasama kemitraan penggarapan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	2 Jumlah Mitra kerja yang telah mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	2	4	4	6	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			2a Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. yang dapat dilaksanakan	2	4	4	6	
			2b Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	2	4	4	6	
		3 Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan program kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	3 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	
			3a Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	33	33	33	33	
			3b Persentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. yang terintegrasi kedalam kebijakan pembangunan disektornya	40	50	60	70	
			3c Persentase permasalahan program pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus yang ditindaklanjuti dari yang teridentifikasi	90	90	90	90	
8	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR)						Direktorat Kesehatan Reproduksi
		1 Kebijakan, strategi dan materi informasi peningkatan akses dan kualitas KHIBA dan PMKR	1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi KHIBA dan PMKR yang dapat dioperasionalkan (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)	6	6	6	6	
		2 Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR	2 Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR	20	30	40	50	
		3 Tenaga pengelola yang terampil dalam pembinaan KHIBA serta PMKR	3 Jumlah tenaga yang kompeten pengelola KHIBA mitra kerja yang mendapatkan orientasi tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR	30	30	30	30	
		4 Kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan peningkatan kualitas KHIBA dan PMKR	4 Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR	8	8	8	8	
			4a Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan KHIBA yang dapat dilaksanakan	6	6	6	6	
			4b Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan PMKR yang dapat di laksanakan.	2	2	2	2	
		5 Monitoring , Evaluasi dan pembinaan Program kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR	5 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR (Pusat dan provinsi)	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	
			5a Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR	33	33	33	33	
			5a Persentase permasalahan program pembinaan peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR yang ditindaklanjuti dari yang teridentifikasi	90	90	90	90	
C	PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DAN	MENINGKATNYA PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	1 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak	74.4 (dari 3 juta)	78.4 (dari 3,45 juta)	79.6 (dari 3,9 juta)	80.9 (dari 4,45 juta)	DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
	PEMBERDAYAAN KELUARGA			anggota aktif)	anggota aktif)	anggota aktif)	anggota aktif)	DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
		2	Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia	70	75	80	85	
		3	Jumlah PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1.1 jt Peserta KB kelompok Ekonomi Usaha Produktif)	44000	66000	88000	110000	
		4	Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	74.7 (dari 1.700.000)	74.9 (dari 1.775.000)	75.1 (dari 1.850.000)	75.3 (dari 1.925.000)	
		5	Jumlah mitra kerja yang memberikan fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga :	5	5	5	5	
		5a	Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan	2	2	2	2	
		5b	Jumlah mitra kerja yang memberikan pendampingan terhadap pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak	3	3	3	3	
		6	Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia	87.5 (dari 1,6 juta)	88.9 (dari 1,8 juta)	90.5 (dari 2,1 juta)	87.5 (dari 2,4 juta)	
		7	Jumlah PIK Remaja Tahap Tumbuh (kelompok)	9643	9934	1022	1053	
		8	Jumlah PIK Remaja Tahap Tegak (kelompok)	1630	2034	2444	2854	
	9	Jumlah PIK Remaja Tahap Tegar (kelompok)	978	1224	1464	1634		
9	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	Meningkatnya PSP Keluarga Balita dan Anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak					Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak	
	1	Kebijakan, strategi dan materi informasi tentang pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak	1	Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan	4	-	-	4
			1a	Jumlah peta kerja pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang terkini dan akurat	2	2	2	2
	2	PSP keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	2	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	74.4 (dari 3 juta anggota aktif)	78.4 (dari 3,45 juta anggota aktif)	79.6 (dari 3,9 juta anggota aktif)	80.9 (dari 4,45 juta anggota aktif)
	3	Kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak	3a	Jumlah kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dioperasionalkan	5	2	3	4
			3b	Jumlah mitra kerja yang memberikan pendampingan terhadap pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak	3	3	3	3
	4	Tenaga pelatih dan pengelola yang terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak		Tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak :				
			4a	Jumlah Tenaga Pelatih yang meningkat kompetensinya tentang pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (orang)	0	68	68	68
			4c	Jumlah Pengelola (mitra kerja) yang meningkat keterampilannya dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (orang)	102	136	170	204

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		5 Sarana prasarana pembinaan ketahanan balita dan anak	5 Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (Modul, APE, KKA dll)	1 (paket/ pusat - provinsi)				
		6 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan program bina ketahanan keluarga balita dan anak	6 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak	1 pusat dan 33 provinsi				
			6a Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak	33	33	33	33	
			6b Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak	5	2	3	4	
			6c Persentase permasalahan pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti	85	90	95	100	
10	Pembinaan Ketahanan Remaja	Meningkatnya PSP remaja tentang perilaku hidup sehat dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana						Direktorat Bina Ketahanan Remaja
		1 Kebijakan, strategi dan materi pembinaan Ketahanan Remaja	1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)	6	4	4	4	
			1a Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dapat dioperasionalkan	4	2	2	2	
			1b Jumlah Grand Design program pembinaan ketahanan remaja yang dapat dioperasionalkan	1	1	1	1	
			1c Jumlah peta kerja Pembinaan Remaja dan Keluarga yang akurat dan terkini	1	1	1	1	
		2 PIK Remaja/mahasiswa yang ditumbuhkembangkan	2 Jumlah PIK Remaja :					
			2a Jumlah PIK Remaja Tahap Tumbuh (kelompok)	9643	9932	10229	10535	
			2b Jumlah PIK Remaja Tahap Tegak	1630	2038	2445	2853	
			2c Jumlah PIK Remaja Tahap Tegar	978	1223	1467	1630	
		3 Sarana prasarana sarana prasarana pembinaan ketahanan remaja dan keluarga	3 Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan remaja dan keluarga	2	2	2	2	
			3a Jumlah prototype media penyuluhan pembinaan ketahanan remaja yang didistribusikan ke provinsi dan mitra kerja tepat sasaran (modul, simulasi dll)	1 (paket/ pusat - provinsi)				
			3a Jumlah sarana prasarana Center of Excellence (COE) pembinaan ketahanan remaja (papan nama, furniture, tempat konseling, komputer, video player, TV dll)	1 (paket/ pusat - provinsi)				
		4 Kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan remaja	4 Jumlah Kemitraan dalam pembinaan ketahanan remaja dan keluarga					
			4a Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan remaja yang dapat dilaksanakan	2	2	2	2	
			4b Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Ketahanan Remaja	66	66	66	66	
		5 Tenaga pelatih yang kompeten dan tenaga pengelola yang terampil dalam Pembinaan Ketahanan Remaja	5 Jumlah Tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan remaja (orang)					
			5a Jumlah Tenaga pelatih yang meningkat kompetensinya tentang Pembinaan	70	70	70	70	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			Ketahanan Remaja (aparatur)					
		6 Monitoring, evaluasi dan pembinaan Program Bina Ketahanan remaja	5b Jumlah Tenaga pelatih yang meningkat kompetensinya tentang Pembinaan Ketahanan Remaja (mitra kerja)	171	171	171	171	
			6 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pembinaan program Ketahanan Remaja (pusat-provinsi)	1 pusat dan 33 provinsi				
			6a Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Ketahanan Remaja	33	33	33	33	
			6b Jumlah Operasionalisasi PIK Remaja dan PIK Mahasiswa	33	33	33	33	
			6c Persentase penyelesaian permasalahan pembinaan program Ketahanan Remaja yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti	100	100	100	100	
11	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan						Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia Dan Rentan
		1 Kebijakan, strategi dan materi informasi tentang Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya	3	5	1	1	
			1a Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional)	2	4	-	-	
			1b Jumlah peta kerja Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang terkini dan akurat	1	1	1	1	
		2 PSP Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan tentang peningkatan kualitas hidup Lansia dan Rentan	2 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia	87.5 (dari 1,6 juta)	88.9 (dari 1,8 juta)	90.5 (dari 2,1 juta)	87.5 (dari 2,4 juta)	
		3 Kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	3 Jumlah Kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan					
			3a Jumlah mitra kerja yang melaksanakan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	2	4	6	8	
			3b Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	4	6	8	10	
		4 Sarana prasarana pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan	4 Jumlah Prototype Media penyuluhan pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	1	1	1	1	
		5 Tenaga pelatih dan pengelola yang terampil dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	5 Jumlah Tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan (orang)					
			5a Jumlah Tenaga pelatih (mitra kerja) yang meningkat kompetensinya tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia Dan Rentan	30	30	30	30	
			5b Jumlah Pengelola (mitra kerja) yang meningkat keterampilannya dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan rentan	30	30	30	30	
		6 Monitoring, evaluasi dan pembinaan Program Bina Ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan	6 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan (pusat-provinsi)	1 pusat dan 33 provinsi				
			6a Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	33	33	33	33	

**TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			6b Persentase penyelesaian permasalahan pembinaan program Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti	85	90	95	100	
12	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam pembinaan dan kemandirian ber KB bagi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I						Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
		1 Kebijakan, strategi dan materi informasi tentang program pemberdayaan ekonomi keluarga	1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja.	3	2	4	1	
			1a Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja.	2	1	3	0	
			1b Jumlah peta kerja pengembangan kelompok UPPKS yang terkini dan akurat.	1	1	1	1	
		2 Peningkatan BerKB anggota kelompok UPPKS	2 Kesertaan ber-KB					
			2a Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	74.7 (dari 1.700.000)	74.9 (dari 1.775.000)	75.1 (dari 1.850.000)	75.3 (dari 1.925.000)	
			2b Jumlah PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1.1 jt Peserta KB kelompok Ekonomi Usaha Produktif)	44000	66000	88000	110000	
		3 Kerjasama dengan mitra kerja yang melakukan pendampingan dalam pembinaan Kelompok UPPKS	3 Jumlah Kemitraan dalam pembinaan kelompok UPPKS					
			3a Jumlah mitra kerja yang melakukan pendampingan kepada kelompok UPPKS (27.000 kelompok UPPKS)	3	3	3	3	
			3b Jumlah mitra kerja yang memberikan fasilitasi pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga	3	3	3	3	
			3c Persentase kelompok UPPKS yang mendapatkan pendampingan dalam pembinaan manajemen kewirausahaan	10	10	10	10	
			3d Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan	2	2	2	2	
		4 Tenaga pengelola dan mitra kerja yang terlatih dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	4 Jumlah Tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga (orang)					
			4a Jumlah tenaga pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga yang terlatih tingkat provinsi, kab/kota	85	85	85	85	
			4b Jumlah mitra kerja yang terlatih dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga tingkat provinsi, kab/kota	99	99	99	99	
		5 Monitoring, evaluasi, dan pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga	5 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga.	1 pusat dan 33 provinsi				
			5a Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga.	33	33	33	33	
			5b Persentase permasalahan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	100	100	100	100	
D	PENINGKATAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN	TERCAPAINYA PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB MELALUI ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI	1 Persentase PUS WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui	95	95	95	95	DEPUTI BIDANG ADVOKASI,

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
	INFORMASI		media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang					PENGERAKAN DAN INFORMASI
		2	Jumlah media masa (cetak dan elektronik), media luar ruang, seni dan budaya /media tradisional yang menginformasikan program pembangunan KKB kepada keluarga dan masyarakat.	56	56	56	56	
		3	Jumlah stakeholder yang mengelola dan memanfaatkan informasi program KKB dalam pengambilan kebijakan	5	5	5	5	
		4	Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan program KKB dalam Rencana Pembangunan Daerah	100	100	100	100	
		5	Persentase kab/kota yang melaksanakan NSPK	25	50	60	75	
		6	Jumlah mitra kerja yang melaksanakan KIE kelompok dan wawan muka	5	5	5	5	
		7	Jumlah kab/kota yang membentuk BKKBD	0	100	150	185	
		8	Persentase kab/kota yang mempunyai PLKB dan PKB sesuai ratio	15	20	25	30	
		9	Jumlah data dan informasi Pembangunan KKB yang tersedia akurat dan terpercaya	5	5	5	5	
		10	Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB	100	100	100	100	
		11	Persentase cakupan jejaring STIK KKB sampai kab/kota	30	45	65	80	
		12	Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mempunyai kebijakan dalam mendukung layanan SIDUGA	75	85	85	85	
13	Peningkatan Advokasi, dan KIE Program Kependudukan dan KB	Meningkatnya komitmen stakeholders terhadap program Kependudukan dan KB						Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
	Indikator dan kegiatan Kehumasan pindah ke HOTL							
1	Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB (Grand Strategy, NSPK, SPM)	1	Jumlah Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB yang disusun	4	4	4	4	
2	PSP PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB	2	Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	95	95	95	95	
3	Sarana dan prasarana advokasi dan KIE	3a	Persentase provinsi yang mendapatkan sarana dan prasarana advokasi dan KIE yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	20	40	60	80	
		3b	Jumlah prototype materi dan media advokasi dan KIE program kependudukan dan KB	2	2	2	2	
4	Tenaga pengelola advokasi dan KIE yang kompeten (stakeholder dan mitra kerja)	4	Jumlah tenaga pengelola advokasi dan KIE yang dilatih atau ditingkatkan kapasitasnya	99	99	99	99	
5	Komitmen Stakeholder dalam mendukung program pembangunan kependudukan dan KB serta pencitraan kelembagaan BKKBN	5	Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD)	30	50	65	80	
6	Kemitraan dalam Advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB	6	Kemitraan dalam advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB:					
		6a	Persentase mitra kerja yang melakukan advokasi dan KIE tentang program kependudukan dan KB	30	50	65	80	
		6b	Persentase Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan advokasi	30	50	65	80	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			dan KIE					
		7 Penayangan informasi pembangunan kependudukan dan KB melalui media masa (cetak dan elektronik) , media luar ruang, seni dan budaya /media tradisional	7 Jumlah media masa (cetak dan elektronik) , media luar ruang, dan seni dan budaya/media tradisional yang menginformasikan pembangunan kependudukan dan KB kepada keluarga dan masyarakat.	56	56	56	56	
		8 Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan advokasi dan KIE dalam program pembangunan kependudukan dan KB ke provinsi	8a Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan Advokasi dan KIE dalam program kependudukan dan KB ke provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	1 pusat dan 33 provinsi	
			8b Jumlah provinsi yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi Pembinaan advokasi dan KIE	33	33	33	33	
14	Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah	Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan KB						Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga
		1 Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar lembaga	1 Jumlah Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar lembaga	5	5	5	5	
			1a Jumlah Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar lembaga yang dapat dilaksanakan oleh stakeholder (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM)	4	4	4	4	
			1b Jumlah Peta Kerja kemitraan antar lembaga terkini yang disusun dan dimanfaatkan oleh stakeholder	1	1	1	1	
		2 Fasilitasi penggerakan operasional program KKB kepada Provinsi dan Stakeholder	2 Jumlah fasilitasi penggerakan operasional program KKB					
			2a Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD (435 Kab/kota)	0	100	150	185	
		3 kerjasama antara BKKBN dengan Lintas Sektor dalam pembangunan KKB	3 Jumlah kerjasama antara BKKBN dengan Lintas Sektor					
			3a Jumlah MOU makro antara BKKBN dengan Lintas Sektor yang dapat dioperasionalkan	2	2	2	2	
			3b Persentase stakeholder yang aktif dalam jejaring kemitraan program KKB	40	50	70	90	
			3c Persentase stakeholder yang mendapatkan penghargaan program KKB	15	20	20	25	
		4 Monitoring, evaluasi, dan Pembinaan program untuk peningkatan kualitas hubungan antar lembaga	4 Jumlah Monitoring , Evaluasi, dan Pembinaan Hubungan Antar lembaga (Pusat dan Provinsi)	1 pusat dan 33 provinsi				
			4a Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi penggerakan operasional program KKB	33	33	33	33	
			4b Persentase stakeholders yang mendapatkan fasilitasi penggerakan operasional program KKB	40	50	70	90	
			4c Persentase kab/kota yang melaksanakan NSPK	25	50	60	75	
			4d Persentase permasalahan program pembinaan lintas sektor, mitra kerja dan pemda yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti	50	70	90	100	
			4e Jumlah Laporan eksekutif perkembangan Program KKB kepada Pimpinan Lembaga Negara yang berkala dan tepat waktu	3	3	3	3	
15	Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	Meningkatnya kualitas Pembinaan Lini Lapangan						Direktorat Bina Lini Lapangan

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		1	Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan	1	Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja bina lini lapangan	4	4	4	4	
			1a	Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja bina lini lapangan (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM)	3	3	3	3		
			1b	Jumlah Peta kerja pembinaan lini lapangan yang akurat dan terkini	1	1	1	1		
		2	Kemitraan dalam Pembinaan Lini Lapangan	2	Jumlah kemitraan dalam pembinaan lini lapangan (Pusat memberikan					
			2a	Jumlah kontrak kerja dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan lini lapangan yang dapat dioperasionalkan	5	5	5	5		
			2b	Persentase mitra kerja yang aktif dalam jejaring pembinaan Lini lapangan	80	85	90	100		
			2c	Persentase Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Bina Lini Lapangan	40	50	60	70		
			2d	Persentase kab/kota yang mempunyai PLKB dan PKB sesuai ratio	15	20	25	30		
		3	SDM Lini lapangan yang kompeten	3	Jumlah Tenaga yang kompeten dan terampil dalam bina Lini lapangan:					
			3a	Jumlah tenaga PKB/PLKB yang kompetensinya meningkat ttg program KKB	7143	7542	4857	2650		
			3b	Jumlah Tenaga Motivator dan KIE yang keterampilannya meningkat ttg program KKB	10500	12600	15750	21000		
			3c	Jumlah IMP yang keterampilannya meningkat ttg program KKB	33	50	59	66		
		4	Sarana kerja PLKB	4	Persentase PLKB yang mendapatkan PLKB-Kit	60	70	80	90	
		5	Monitoring , Evaluasi dan pembinaan Program pembinaan lini lapangan	5	Jumlah pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan pembinaan Program pembinaan lini lapangan	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	
			5a	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Bina Lini Lapangan	26	28	30	33		
			5b	Jumlah IPeKB yang operasional (Provinsi)	26	28	30	33		
			5c	Persentase permasalahan Program pembinaan lini lapangan yang teridentifikasi	50	70	90	100		
16	Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB	Tersedianya data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI							Direktorat Pelaporan dan Statistik	
		1	Kebijakan, strategi dan sistem pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI	1	Jumlah Kebijakan, Strategi dan sistem program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI yang disusun dan didistribusikan	5	2	2	2	
		2	Data dan informasi program KKB	2	Jumlah data dan informasi (Pusat dan daerah):	34	34	34	34	
			2a	Jumlah data program KKB yang tersedia akurat dan terpercaya (2 pengendalian Lapangan , 2 pelayanan Kontrasepsi, Pendataan keluarga)	5	5	5	5		
			2b	Jumlah Instrumen pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB yang tersedia sesuai dengan kebutuhan standar SIM	53	53	53	53		
			2c	Jumlah Umpan balik program KKB yang disusun dan didistribusikan secara berkala dan tepat waktu	8	5	5	5		
			2d	Persentase Umpan balik program KKB yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100	100	100	100		

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			di tingkat Pusat dan Provinsi					
		3 Hasil analisa dan evaluasi program KKB	3 Jumlah hasil analisa dan evaluasi program KKB disusun secara berkala dan tepat waktu	35	35	35	35	
		4 Kemitraan dengan stakeholders dan mitra kerja dalam pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB	4 Kemitraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program KKB					
			4a Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi serta memanfaatkan data dan informasi KKB	75	85	85	85	
			4b Jumlah stakeholder yang mengelola dan memanfaatkan informasi program KKB dalam pengambilan kebijakan	5	5	5	5	
		5 Tenaga pengelola yang kompeten dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data dan informasi program KKB	5a Jumlah tenaga dalam pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB yang dilatih (kab/kota)	495	495	495	495	
			5b Persentase tenaga pengumpulan, pengolahan, analisis evaluasi data dan informasi program KKB yang meningkat kompetensinya	85	85	85	85	
		6 Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB	6 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB (Pusat dan provinsi)	1 pusat 33 provinsi				
			6a Jumlah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan dalam program pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB	34	34	34	34	
			6b Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan dalam program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB	3	6	9	13	
			6c Persentase permasalahan program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB yang dapat ditindaklanjuti	100	100	100	100	
17	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB	Tersedianya layanan SIDUGA berbasis TIK						Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi
		1 Kebijakan, strategi STIK dan materi penyebarluasan data dan informasi program KKB berbasis TI	1 Jumlah Kebijakan dan Strategi STIK dan materi penyebarluasan data dan informasi yang dapat dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan customer program KKB berbasis TI yang disusun	1	1	0	0	
		2 On-Line System	2 Persentase Cakupan Jejaring STIK Kependudukan dan KB sampai Kab/Kota	30	40	65	80	
			2a Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mempunyai kebijakan dalam mendukung layanan SIDUGA	75	85	85	85	
			2b Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Situs/ Portal BKKBN	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	
		3 Layanan Bank Data Program KBN KKB KB Nasional	3 Persentase cakupan jumlah data program KKB yang dapat diakses oleh seluruh pengguna Nasional	80	100	100	100	
		4 SDM Tenaga Program yang Kompeten dalam Pengelolaan STIK	4 Jumlah SDM Kompeten bagi Pengelola STIK Pusat, Prov dan Kab/Kota	33	33	33	33	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA				
				2011	2012	2013	2014					
		5	Sarana Prasarana STIK pendukung TI	5	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung STIK	30	40	65	80			
		6	System Aplikasi	6	Jumlah System Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemakai (unit)	24	24	24	24			
		7	Dokumentasi dan Publikasi pembangunan KKB	7	Jumlah dokumentasi dan publikasi :	7a	Jumlah Dokumentasi pembangunan kependudukan dan KB (dokumen)	9	9		9	9
						7b	Jumlah Publikasi pembangunan kependudukan dan KB (Pusat dan Provinsi)	37	37		37	37
						8	Monitoring, Evaluasi dan pembinaan teknologi informasi Program STIK, Penyebarluasan dan Dokumentasi pembangunan KKB	8	Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan teknologi informasi program STIK, penyebarluasan dan dokumentasi program KKB		1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi
8a	Jumlah Pembinaan Program STIK, penyebarluasan informasi dan dokumentasi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi							
18	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan pembangunan Kependudukan dan KB provinsi	1	Jumlah peserta KB baru /PB (juta)	7,2	7,3	7,5	7,6	BKKBN Provinsi (33 Provinsi)			
2	Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)	27,5	28,2	29,0	29,8							
3	Jumlah peserta KB baru mandiri (juta)	3,4	3,4	3,5	3,6							
4	Persentase peserta KB aktif mandiri	49,6	49,7	50,9	51							
5	Persentase peserta KB baru MKJP	12,5	12,9	13,2	13,6							
6	Persentase peserta KB aktif MKJP	25,1	25,9	26,7	27,5							
7	Persentase peserta KB baru Pria	4,0	4,3	4,6	5,0							
8	Jumlah peserta KB baru /PB KPS dan KS I (juta)	3,80	3,89	3,97	4,05							
9	Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS I (juta)	12,2	12,5	12,8	13,1							
10	Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia	70	75	80	85							
11	Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	95	95	95	95							
12	Jumlah Rancangan induk pengendalian penduduk di Provinsi	4	8	10	11							
		1	Rancangan Induk pengendalian penduduk di Provinsi	1	Jumlah Rancangan induk pengendalian penduduk di Provinsi	4	8	10		11		
				1a	Jumlah parameter kependudukan yang disosialisasikan	1	1	1	1			
				1b	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi tentang kebijakan dan program pengendalian penduduk	3	3	3	3			
				1c	Jumlah paket sosialisasi tentang penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan kepada stakeholder (provinsi)	1	1	1	1			
				1d	Persentase kab/kota yang mendapatkan fasilitasi dalam melakukan kajian penyerasian kebijakan kependudukan	25	50	75	95			
				1e	Jumlah kajian dampak kependudukan terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan	0	1	1	1			
				1f	Jumlah modul pendidikan Kependudukan dan KB yang dimanfaatkan oleh mitra kerja (mengelola pendidikan formal, informal, dan non formal)	1	1	1	1			

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2011	2012	2013	2014		
		2 Kesertaan ber-KB di Provinsi	2 Jumlah pembinaan kesertaan ber-KB di Provinsi	33	33	33	33		
			2a Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakan pelayanan KB	23500	23500	23500	23500		
			2b Jumlah sarana prasarana pelayanan KB yang didistribusikan ke Klinik KKB	22820	12180	0	0		
			2c Jumlah Frekuensi pelayanan KB mobile di Wilayah khusus di 33 prov (6 kali dalam 1 tahun)	6	6	6	6		
			2d Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di Wilayah Galcitas (12 kali dalam 1 tahun)	12	12	12	12		
			2e Persentase komplikasi berat yang dilayani	0,12	0,11	0,11	0,11		
			2f Persentase kegagalan KB yang dilayani	0,03	0,03	0,03	0,03		
			2g Jumlah pencabutan implant yang dilayani (Kasus)	458.038	557.861	556.084	562.605		
		3 KKB yang melayani sesuai SOP	3	Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (<i>informed consent</i> untuk pelayanan KB baru MKJP)	35	50	70		85
		4 Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Provinsi	4	Jumlah pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Provinsi	33	33	33		33
				4a Jumlah Kelompok BKB percontohan (2 kelompok/Kecamatan)	13000	13000	13000		13000
				4b Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih	216	216	216		216
				4c Jumlah tenaga pelatih pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih	345	345	345		345
4d Jumlah Kelompok BKR percontohan (1 kelompok/Kecamatan)	6.500			6.500	6.500	6.500			
4e Jumlah Kelompok BKL percontohan (1 kelompok/Kecamatan)	6.500			6.500	6.500	6.500			
5 Advokasi dan Penggerakan di Provinsi	5	4f Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber-KB	89	90	91	92			
		Jumlah pembinaan Advokasi dan KIE program kependudukan dan KB di Provinsi	33	33	33	33			
		5a Jumlah Jenis Media yang melaksanakan advokasi dan KIE KKB	3	3	3	3			
		5b Persentase klinik KB yang mendapatkan materi KIE pembangunan KKB	38	65	84	100			
		5c Persentase kab/kota yang mendayagunakan materi KIE melalui MUPEN	100	100	100	100			
		5d Persentase stakeholders kab/kota mereproduksi prototype bahan dan media advokasi dan KIE KKB	100	100	100	100			
		5e Persentase mitra kerja (prov dan kab/kota) yang melaksanakan advokasi dan KIE KKB	45	60	80	100			
		5f Jumlah mitra kerja yang aktif dalam jejaring advokasi dan KIE	3	3	3	3			
		5g Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan KKB dalam rencana pembangunan daerah	80	85	90	95			
		5h Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan PERDA pembangunan KKB	20	25	50	75			
		5i Jumlah kab/kota yang telah membentuk BKKBD	0	100	150	185			

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			5j Persentase kab/kota yang melaksanakan Mekanisme operasional lini lapangan	25	35	45	55	
			5k Jumlah mitra kerja yang berperan serta dalam pemberdayaan lini lapangan	99	99	99	99	
		6 Kerjasama dengan mitra kerja	6 Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan pendampingan dalam Pembangunan KKB di Provinsi	1	1	1	1	
		7 SDM yang terdidik dan terlatih di Provinsi	7 Jumlah pembinaan SDM provinsi	33	33	33	33	
			7a Persentase TOGA, TOMA, TODA yang terlatih	20	50	60	75	
			7b Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih	20	50	60	75	
			7c Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU)	1343	1342	0	0	
			7d Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan Refreshing	2500	2750	2700	1700	
			7e Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan Teknis	3300	3450	2157	950	
			7f Jumlah pelatihan medis tehnis bagi Bidan	35000	8000	6480	12960	
			7g Jumlah pelatihan medis tehnis bagi Dokter	10343	3950	1857	3715	
		8 Pengelolaan data dan informasi pembangunan KKB di Provinsi	8 Pengelolaan Data dan informasi program Kependudukan dan KB di Provinsi	33	33	33	33	
			8a Jumlah data dan informasi pembangunan KKB yang terkini dan terpercaya berbasis IT	5	5	5	5	
			8b Presentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan PKKB	100	100	100	100	
			8c Frekuensi pemuktahiran data provinsi di website	12	12	12	12	
			8d Presentase cakupan jejaring STIK di kab/kota	30	45	65	80	
			8e Presentase klinik KB pemerintah dan swasta yang terdaftar dalam data base secara on line (dari 23.500 KKB)	50	75	100	100	
		9 Penelitian Kependudukan dan KB di Provinsi	9 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB di Provinsi	33	33	33	33	
			9a Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kependudukan yang dimanfaatkan	3	3	3	3	
			9b Jumlah hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS yang dimanfaatkan	3	3	3	3	
			9c Jumlah model-model pengembangan Program Kependudukan	2	2	2	2	
			9d Jumlah model-model pengembangan Program KB	2	2	2	2	
		10 Dukungan manajemen di Provinsi	10 Jumlah dukungan manajemen program kependudukan dan KB di Provinsi	33	33	33	33	
			10a Jumlah dokumen perencanaan program KKB di provinsi	3	3	3	3	
			10b Presentase pegawai yang memiliki profil kompetensi	40	50	65	80	
			10c Presentase ketepatan laporan keuangan dan laporan barang milik negara	100	100	100	100	
			10d Presentase kab/kota yang difasilitasi dalam melaksanakan NSPK	25	50	60	75	
			10e Jumlah pengadaan sarana-prasarana yang terpenuhi sesuai standar	33	33	33	33	
			10f Presentase temuan laporan audit internal yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	
			10g Presentase rekomendasi pengawasan yang digunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan	100	100	100	100	

**TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		11 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB di Provinsi	11 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB					
			11a Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKB di Provinsi	33	33	33	33	
			11b Persentase kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program KKB	100	100	100	100	
		12 Dukungan operasional PPLKB, PLKB/PKB dan IMP	12 Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapatkan dukungan operasional	0	501.593	501.593	501.593	
			a PPLKB	0	4.671	4.671	4.671	
			b PKB/PLKB	0	19.886	19.886	19.886	
			c PPKBD	0	85.562	85.562	85.562	
			d Sub PPKBD	0	391.474	391.474	391.474	
		13 Penguatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan	13 Jumlah Penyelenggaraan mekanisme operasional program KKB (Rakor di tingkat kecamatan, desa, staf meeting, mini lokakarya, serta pertemuan koordinasi IMP dengan kader)	0	6 kali/tahun	6 kali/tahun	6 kali/tahun	
II	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PELATIHAN SDM APARATUR, SERTA PENELITIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB	1 Persentase SDM Aparatur yang kompeten	30	60	70	80	DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			2 Persentase Widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan	30	60	70	80	
			3 Persentase Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi standar kediklatan	25	60	80	90	
			4 Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka panjang ke LN	6	6	6	6	
			5 Jumlah SDM aparatur yang mengikuti OST dan short course ke luar negeri	37	35	33	31	
			6 Jumlah peserta OST dari negara lain	40	40	40	40	
			7 Indeks pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	
			8 Indeks pemanfaatan hasil litbang kependudukan	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	
19	Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	Tersedianya SDM Yang kompeten dan berwawasan Internasional						Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
		1 SDM aparatur BKKBN yang mengikuti diklat ke luar negeri	1a Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka panjang ke Luar Negeri	6	6	6	6	
			1b Jumlah SDM aparatur yang mengikuti OST dan short course ke luar negeri	37	35	33	31	
		2 Peserta OST dari luar negeri belajar KKB ke Indonesia	2 Jumlah peserta OST dari negara lain	40	40	40	40	
			3a Jumlah penyelenggaraan pertemuan/Workshop Internasional sebagai implementasi dari MoU	3	3	3	3	
		3 Kerjasama Internasional	3b Jumlah pejabat/staf BKKBN dan mitra kerja yang mengikuti pertemuan internasional di luar negeri	16	14	12	11	
		4 Kualitas SDM staf PULIN dan mitra kerja dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan	4 Jumlah pembinaan program dan monitoring evaluasi	11	11	11	11	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
20	Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah SDM aparatur BKKBN yang meningkat kompetensinya						Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana		
		1 Kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur dan Tenaga Program	1	Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan tenaga program	5	5	5		5	
		2 Diklat yang berkualitas	2a	Jumlah kurikulum, materi/ media yang dikembangkan dan digunakan	15	6	6		5	
			2b	Persentase widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan	30	60	70		80	
		3 kemitraan dalam pendidikan dan pelatihan SDM aparatur	3	Jumlah kemitraan dalam pendidikan dan pelatihan SDM aparatur :						
			3a	Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama dalam pengembangan program diklat SDM paratur dan SDM Tenaga Program	6	6	6		6	
3b	Jumlah mitra kerja yang terlibat proses belajar mengajar dalam pelatihan SDM aparatur		2	2	2	2				
4 SDM Aparatur yang kompeten	4		Jumlah SDM yang kompeten dan terampil dalam pembinaan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur :							
	4a		Jumlah SDM Aparatur yang dilatih	2400	2473	2459	2358			
	4b		Persentase SDM aparatur dilatih yang meningkat kompetensinya	70	70	70	70			
5 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Program Diklat	5		Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan kediklatan aparatur	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi			
	5a		Jumlah Balatbang dan Balai Diklat yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dalam kediklatan	33	33	33	33			
	5b	Persentase Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi standar kediklatan	25	60	80	90				
	5c	Persentase permasalahan diklat yang teridentifikasi dan dapat ditindaklanjuti	100	100	100	100				
21	Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Tersedianya data hasil litbang yang up to date tentang KB dan KS						Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS		
		1 Kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan KB dan KS	1	Jumlah kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan KB dan KS	1	1	1		1	
		2 Hasil penelitian dan pengembangan dan KB dan KS	2a	Jumlah penelitian dan pengembangan KB dan KS sesuai kebutuhan	12	12	12		12	
			2b	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS	80	80	80		80	
		3. Publikasi hasil penelitian dan pengembangan	3a	Jumlah forum dan jurnal yang dipergunakan untuk diseminasi hasil - hasil penelitian	7	7	7		7	
			3b	Jumlah policy brief bagi penentu kebijakan tentang KB dan KS	2	2	2		2	
		4 Mitra kerja litbang KB dan KS	4	Jumlah mitra litbang yang melakukan kerjasama dengan Puslitbang KB dan KS	33	33	33		33	
		5 Monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang KB dan KS	5	Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang KB dan KS yang dilaksanakan	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi		1 pusat 33 provinsi	
			5a	Jumlah mitra litbang yang memperoleh fasilitasi	34	34	34		34	
			5b	Persentase permasalahan litbang KB dan KS yang ditindaklanjuti	100	100	100		100	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA			
				2011	2012	2013	2014				
22	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	Tersedianya data dan informasi hasil litbang kependudukan						Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan			
			1	Kebijakan dan strategi pengembangan litbang kependudukan	1	Jumlah kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan kependudukan	1		-	-	1
			2	Hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	2a	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan (Termasuk SDKI 2012)	3		5	5	3
					2b	Persentase hasil Litbang Kependudukan yang dimanfaatkan	20		40	60	80
					2c	Jumlah model-model pengembangan kependudukan	2		2	2	2
			3	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	3a	Jumlah karya tulis ilmiah hasil litbang kependudukan di jurnal/prosiding/majalah	4		5	6	7
					3b	Jumlah Policy Brief kependudukan bagi penentu kebijakan	3		4	5	6
			4	Mitra kerja dan jejaring litbang kependudukan	4	Jumlah mitra kerja aktif litbang kependudukan	34		34	34	34
					5	Monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang kependudukan	5		Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang kependudukan	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi
					5a	Persentase permasalahan litbang Kependudukan yang ditindaklanjuti	100		100	100	100
III	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN	TERSEDINYA DUKUNGAN MANAJEMEN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB						SEKRETARIAT UTAMA			
			1	Jumlah Perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	3	2	2		3		
			2	Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya	40	50	65		80		
			3	Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang	100	100	100		100		
			4	Indeks kepuasan Pegawai BKKBN terhadap keamanan dan kebersihan	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)		3 (skala 1-4)		
			5	Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler .	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)		3 (skala 1-4)		
			6	Persentase manajemen pelayanan program dan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar	100	100	100		100		
			7	Status laporan keuangan WTP	WTP	WTP	WTP		WTP		
			8	Ratio ketersediaan alkon dan sarana klinik kb	Min 3, Max 24	Min 3, Max 24	Min 3, Max 24		Min 3, Max 24		
			9	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar berlaku	75	85	95		100		
			10	Jumlah SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) BKKBN yang disahkan dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN	2	0	0		2		
			11	Persentase kasus bantuan hukum yang diselesaikan	90	90	90		90		
23	Perencanaan Program dan Anggaran	Tersedianya rencana program dan anggaran Program Kependudukan dan KB						Biro Perencanaan			
			1.	Kebijakan, Strategi dan materi informasi Perencanaan Program dan Anggaran	1	Jumlah kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan	3		3	3	4

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		2	Data Basis Perencanaan	2	Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis TI	95	95	95	95	
		3	PPM PA/PB dan Sasaran KS	3	Persentase komponen pusat dan provinsi yang menyetujui PPM PA/PB dan Sasaran KS	91	95	98	100	
		4	Perencanaan Program	4	Jumlah perencanaan program yang berkualitas	3	2	2	3	
		5	Perencanaan Bantuan Luar Negeri	5	Jumlah donor yang mendukung Pembiayaan Pembangunan KKB	3	3	3	3	
		6	Perencanaan Anggaran	6a	Persentase perencanaan program dan anggaran dari semua komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas	100	100	100	100	
				6b	Persentase dukungan anggaran sesuai kebutuhan program	100	100	100	100	
		7	Peta strategi, BSC Eselon I dan II serta Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB	7	Persentase unit Eselon II yang mempunyai Peta strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB	100	100	100	100	
		8	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB	8	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	
8a	Persentase permasalahan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB yang ditindaklanjuti			100	100	100	100			
24	Pengelolaan Administrasi Pegawai	Terwujudnya SDM pegawai BKKBN yang kompeten dan berkinerja tinggi							Biro Kepegawaian	
1	Sistem Manajemen Kinerja (Performance manajemen system) dalam manajemen SDM Pegawai	1	1a	Jumlah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan	1	-	1	-		
			1b	Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem manajemen kinerja (98%)	75	80	90	98		
			1c	Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi	100	100	100	100		
2	Peta kerja/profil Kompetensi dan Kekuatan SDM Pegawai yang komprehensif dan up to date	2	Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya		40	50	65	80		
			3	Scorecard individu yang objektif	3a	Jumlah peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan terpercaya	1	1	1	1
		3b	Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard individu yang terkini dan terpercaya		75	100	100	100		
4	Budaya Kerja CUK	4	4a	Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan Budaya Kerja CUK	40	50	60	70		
			4b	Persentase pejabat telah melaksanakan pakta integritas	100	100	100	100		
5	Adminstrasi kepegawaian yang tepat waktu	5	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan Askes dll)	100	100	100	100			
6	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi	6	6a	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI)	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi		
			6b	Persentase permasalahan pengelolaan pegawai yang ditindaklanjuti	100	100	100	100		
25	Pengelolaan Administrasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan							Biro Umum	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang cepat dan tepat	1	1a	Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan kerumahtanggaan	85	90	95	100		
			1b	Jumlah kasus kehilangan dan pencurian di lingkungan kantor	0	0	0	0		
			1c	Persentase cakupan pemeliharaan gedung & bangunan kantor, kendaraan Dinas dan sarana dan prasarana kerja pegawai BKKBN Pusat	90	90	90	90		
			1d	Indeks kepuasan pegawai terhadap kebersihan	3 (Skala 1-4)	3 (Skala 1-4)	3 (Skala 1-4)	3 (Skala 1-4)		
2	Meningkatkan Pelayanan protokoler yang prima	2	2a	Persentase petugas protokol yang prima	85	90	95	100		
			2b	Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)		
3	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran	3	Persentase pelayanan administrasi umum yang berkualitas	75	85	90	100			

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		yang cepat dan tepat	3a Persentase Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman Surat-surat Dinas	100	100	100	100	
			3b Persentase Terselenggaranya Penataan Arsip dan Dokumen	100	100	100	100	
			3c Persentase Arsiparis yang mendapatkan pembinaan	85	90	95	100	
			3d Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai	100	100	100	100	
		4 Melaksanakan Pembinaan program, monitoring dan evaluasi pengelolaan ketatausahaan	4 Jumlah monitoring , evaluasi dan pembinaan administrasi umum (provinsi)	1 pusat 33 provinsi				
26	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
		1 Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1a Jumlah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan	2	2	2	2	
			1b Persentase unit kerja yang mengimplementasikan Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100	100	100	100	
		2 Laporan BMN	2 Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan 6 tepat	90	100	100	100	
			2a Persentase Laporan BMN tepat waktu	98	98	98	100	
			2b Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK-BMN disemua tingkatan	95	95	98	100	
		3 Laporan Keuangan	3a Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai standard akuntansi	100	100	100	100	
			3b Persentase satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	95	98	98	98	
		4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana PKKB	4a Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap kebutuhan	75	85	95	100	
			4b Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN)	Min 3, Max 24				
		5 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5a Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1 pusat 33 provinsi				
			5b Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak lanjuti	95	97	98	98	
27	Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas	Tersedianya informasi strategis, peraturan perundang-undangan, perangkat organisasi dan tata laksana dalam mendukung program kependudukan dan KB						Biro Hukum, Organisasi dan Humas
		1 Kebijakan, strategi dan materi informasi, hukum, organisasi, tata laksana dan kehumasan	1 Jumlah kebijakan , strategi dan materi informasi hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja	5	5	5	5	
			1a Jumlah perangkat tata laksana, SPM dan NSPK pembangunan KKB yang dapat disusun	10	15	15	10	
			1b Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota	8	8	9	8	
		2 Hukum dan perundang-undangan yang terfasilitasi	2a Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	
			2b Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	33	33	33	33	
		3 Fasilitasi organisasi BKKBD provinsi, kabupaten dan kota	3a Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD Kabupaten dan	25	50	75	100	

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2011	2012	2013	2014		
			Kota						
			3b Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, provinsi, kabupaten dan kota)	25	50	75	100		
		4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pembinaan dalam penataan hukum, organisasi, tata laksana dan kehumasan	4a Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum, Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan (Pusat dan Provinsi)	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi		
			4b Jumlah permasalahan dalam penataan organisasi dan tatalaksana yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil identifikasi	34	34	34	34		
			4c Persentase humas pemerintah dan swasta terkait yang mendapatkan fasilitas tentang program pembangunan kependudukan dan KB	30	50	65	80		
IV	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLA BIDANG PROGRAM, KETENAGAAN DAN ADMINISTRASI UMUM SERTA KEUANGAN DAN PERBEKALAN (Good Governance)	1 Persentase temuan audit internal program yang ditindaklanjuti	85	90	95	100	INSPEKTORAT UTAMA	
			2 Persentase menurunnya temuan audit eksternal program	80	75	70	65		
			3 Persentase menurunnya temuan audit eksternal Keuangan dan perbekalan	80	75	70	65		
			4 Persentase temuan audit internal keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti	85	90	95	100		
			5 Persentase temuan audit internal Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindaklanjuti	85	90	95	100		
			6 Persentase unit kerja yang akuntabel dalam pelaksanaan keuangan dan perbekalan	100	100	100	100		
			7 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang efektif	85	90	95	100		
28	Peningkatan Pengawasan Program	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKB						Inspektorat Program	
			1. Kebijakan dan strategi pengawasan program	1 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan program yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait	1	1	1		1
			2. Laporan temuan Audit Program KKB	2a Persentase Temuan Audit Program yang ditindaklanjuti	80	75	70		65
				2b Persentase pelaksanaan kerja pengawasan program	100	100	100		100
			3. Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Program	3a Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Program	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi		1 pusat 33 provinsi
3b Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak lanjut	85	90		95	100				
29	Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Ketenagaan dan Administrasi Umum						Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum	
			1. Kebijakan dan strategi pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	1 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait	1	1	1		1
			2. Laporan temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum KKB	2a Persentase Temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindaklanjuti	80	75	70		65
				2b Persentase pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	100	100	100		100
			3. Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	3a Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi		1 pusat 33 provinsi
3b Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak lanjut	85	90		95	100				

TABEL 1.1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BKKBN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2011	2012	2013	2014		
30	Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Perbekalan						Inspektorat Keuangan dan Perbekalan	
		1. Kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan perbekalan	1	Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan perbekalan yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait	1	1	1		1
		2. Laporan temuan Audit keuangan dan perbekalan KKB	2a	Persentase Temuan Audit keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti	80	75	70		65
			2b	Persentase pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan	100	100	100		100
		3. Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan	3a	Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi	1 pusat 33 provinsi		1 pusat 33 provinsi
3b	Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak lanjuti		85	90	95	100			

TABEL 1.2

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011-2014

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam milyar)

NO	KEGIATAN PRIORITAS / SUB KEGIATAN	ALOKASI				
		2011	2012	2013	2014	Total
I	PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.233,36	2.343,35	2.319,06	2.196,96	9.092,73
1	Pemaduan Kebijakan pengendalian penduduk	9,09	9,09	9,00	8,52	35,70
2	Perencanaan Pengendalian Penduduk	7,90	7,50	7,42	7,03	29,85
3	Kerjasama Pendidikan kependudukan	7,60	7,60	7,52	7,13	29,85
4	Analisis dampak kependudukan	7,59	7,60	7,52	7,13	29,84
5	Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	677,92	683,72	676,63	641,00	2.679,27
6	Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta	48,25	41,72	41,29	39,11	170,37
7	Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus	4,50	5,50	5,44	5,16	20,60
8	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	4,20	5,00	4,95	4,69	18,84
9	Pembinaan Ketahanan Remaja	7,50	7,50	7,42	7,03	29,45
10	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5,15	5,15	5,10	4,83	20,22
11	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	4,80	5,28	5,23	4,95	20,26
12	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan rentan	3,20	3,20	3,17	3,00	12,57
13	Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKB	201,18	201,18	199,09	188,61	790,07
14	Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah	5,23	7,00	6,93	6,56	25,72
15	Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	5,20	7,00	6,93	6,56	25,69
16	Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB	7,00	7,50	7,42	7,03	28,95
17	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB	10,00	10,00	9,90	9,38	39,27
18	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi	1.217,04	1.321,81	1.308,11	1.239,24	5.086,21
II	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN	51,64	88,04	87,13	82,54	309,36
19	Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	23,04	23,04	22,81	21,60	90,49
20	Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	10,00	10,00	9,90	9,38	39,27
21	Penelitian dan pengembangan Kependudukan	9,50	45,90	45,42	43,03	143,86
22	Penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	9,10	9,10	9,01	8,53	35,74
III	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEHNIS LAINNYA BKKBN	122,64	134,82	133,42	126,40	517,28
23	Perencanaan program dan anggaran	8,00	8,50	8,41	7,97	32,88
24	Pengelolaan administrasi pegawai	8,77	9,00	8,91	8,44	35,11
25	Pengelolaan administrasi umum	66,53	75,98	75,19	71,23	288,94
26	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	31,34	31,34	31,02	29,38	123,08
27	Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas	8,00	10,00	9,90	9,38	37,27
IV	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN	5,50	6,30	6,23	5,91	23,94
28	Peningkatan Pengawasan program	2,30	2,50	2,47	2,34	9,62
29	Peningkatan pengawasan Keuangan dan Perbekalan	1,60	2,00	1,98	1,88	7,45
30	Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	1,60	1,80	1,78	1,69	6,87
TOTAL		2.413,14	2.572,52	2.545,85	2.411,81	9.943,32

KETERANGAN

1 Tahun 2010, Kegiatan prioritas berdasarkan struktur organisasi lama , dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 1,234,00 Milyar

2 Tahun 2011 s/d 2014, Kegiatan prioritas berdasarkan Perka Ka. BKKBN No. , dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2014, sebesar Rp. 9,943,32 Milyar

3 Total kebutuhan pendanaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 11,177,32 Milyar

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
1	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	1 Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan	3326 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk					Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
261 Perumusan grand design pengendalian penduduk dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan								
261.1 Inventarisasi kebijakan sektor pembangunan yang berwawasan kependudukan dan kebijakan pengendalian penduduk (pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas)			1	34	34	34		
261.2 Penyusunan grand design pengendalian penduduk dan pembangunan sektor berwawasan kependudukan			2	2	2	2		
261.3 Sosialisasi dan diseminasi grand design pengendalian penduduk dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan			34	34	34	34		
261.4 Kegiatan lain terkait dengan Perumusan grand design pengendalian penduduk dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan		1	1	1	1			
1a Jumlah Kebijakan, strategi dan materi informasi Pengendalian penduduk		262 Pengembangan Kebijakan, strategi dan materi informasi pengendalian penduduk (pengendalian fertilitas, penurunan mortalitas, dan pengarahan mobilitas)						
261.1 Penyusunan kebijakan, strategi dan materi informasi Pengendalian Penduduk (NSPK, Pedoman, Juklak dan Juknis)		-	2	2	2			
261.2 Sosialisasi dan diseminasi		20	5	5	5			
261.3 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan Kebijakan, strategi dan materi informasi pengendalian penduduk (pengendalian fertilitas, penurunan mortalitas dan pengarahan mobilitas.		1	1	1	1			
2 Jumlah Hasil kajian kebijakan pengendalian penduduk		263 Perumusan Kajian pengendalian penduduk dari berbagai sumber data						
263.1 Inventarisasi pemaduan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk		1	34	34	34			
263.2 Analisis pemaduan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk		1	34	34	34			
263.3 Perumusan pemaduan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk		1	34	34	34			
263.4 Sosialisasi hasil penyerasian kebijakan pembangunan sektor dengan pembangunan KKB		34	34	34	34			
263.5 Kegiatan lain terkait dengan Perumusan Kajian pengendalian penduduk dari berbagai sumber data	1	1	1	1				
3 Jumlah mitra kerja (TOGA, TOMA, ORMAS, Universitas, PSK) yang terlibat dalam pengkajian kebijakan pembangunan sektor berwawasan kependudukan.	264 Pemantapan jejaring kemitraan dalam penyerasian kebijakan pembangunan sektor berwawasan kependudukan							
263.1 Pengembangan forum kerjasama	1	34	34	34				
263.2 Pemberdayaan jejaring kemitraan	1	34	34	34				
263.3 Kegiatan lain terkait dengan Pemantapan jejaring kemitraan dalam penyerasian kebijakan pembangunan sektor berwawasan kependudukan	1	1	1	1				
4 Jumlah stakeholder (K/L, Legislatif, Pemda/Pemkab, Pemprov) yang difasilitasi untuk menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan (pusat dan provinsi)	265 Peningkatan fasilitasi penyerasian Kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan							
265.1 Fasilitasi pemaduan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	1	1	1	1				
265.2 Fasilitasi penyerasian kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan	-	33	33	33				
265.3 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan fasilitasi penyerasian Kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan	1	1	1	1				
5 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	266 Pengembangan kapasitas tenaga pengelola penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan							
266.1 Penyusunan materi pembelajaran	-	8	8	8				
266.2 TOT tenaga pengelola	-	74	74	74				
266.3 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan kapasitas tenaga pengelola penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	1	1	1	1				

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		6	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pembinaan program Pemaduan Kebijakan pengendalian penduduk	267	Peningkatan pembinaan program penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan ke dalam pembangunan sektor dan daerah					
		6a	Jumlah stakeholder provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan program penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.	267.1	Pembinaan program penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan ke provinsi	20	33	33	33	
				267.2	Konsultasi program pemaduan kebijakan pembangunan	1	34	34	34	
				267.3	Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan pembinaan program penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan ke dalam pembangunan sektor dan daerah	1	1	1	1	
				268	Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan					
				268.1	Penyusunan panduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	-	1	1	1	
				268.2	Pemantauan & evaluasi pelaksanaan program penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	-	34	34	34	
				268.3	Peningkatan kualitas operasional program pemaduan kebijakan pengendalian penduduk	1	34	34	34	
				268.4	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat pemaduan kebijakan pengendalian penduduk (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
				268.5	Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	1	1	1	1	
2	Perencanaan Pengendalian Penduduk	1	Jumlah kebijakan dan strategi penetapan parameter kependudukan	3329	Perencanaan Pengendalian Penduduk					Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk
				291	Pengembangan kebijakan dan strategi perencanaan Pengendalian Penduduk					
				291.1	Penyusunan Kebijakan dan strategi perencanaan pengendalian kuantitas penduduk Indonesia					
				291.1.1	Penyusunan jangka panjang pengendalian kuantitas penduduk serta pengkajian pertumbuhan penduduk tahunan	1	2	2	2	
				291.1.2	Penyusunan pedoman /Juklak/juknis bagi perencanaan pengendalian kuantitas penduduk di daerah	2	4	4	4	
				291.1.3	Pengadaan dan distribusi /sosialisasi materi hasil kajian dan pengembangan terkait dengan perencanaan pengendalian penduduk Indonesia	4	6	6	6	
				291.1.4	Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan kebijakan dan strategi perencanaan Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	
				291.2	Sosialisasi dan kebijakan perencanaan pengendalian penduduk					
				291.2.1	Sosialisasi/diseminasi kebijakan dan strategi perencanaan pengendalian kuantitas penduduk Indonesia di pusat dan provinsi	34	34	34	34	
				291.2.2	Pengembangan dan strategi promosi/Advokasi dan KIE bidang pengendalian kuantitas Kependudukan (Kuantitas/kualitas/migrasi/famplan)	1	4	4	4	
				291.2.3	Kegiatan lain terkait dengan Sosialisasi dan kebijakan perencanaan pengendalian penduduk	1	1	1	1	
		2	Jumlah kajian parameter kependudukan yang dihasilkan tepat waktu dan dimanfaatkan	292	Pengkajian dan analisis parameter kependudukan mengenai (struktur, pertumbuhan kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk					
				292.1	Assement dan komplikasi data kependudukan Indonesia dan daerah					
				292.1.1	Assement kebutuhan data kependudukan Indonesia dan daerah	6	6	6	6	
				292.1.2	Peneleahaan data untuk perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan KB	6	6	6	6	
				292.1.3	Sosialisasi/diseminasi hasil kajian atau penelahaan	2	2	2	2	
				292.1.4	Kegiatan lain terkait dengan Assement dan komplikasi data kependudukan Indonesia dan daerah	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			292.2 Kajian lanjut hasil sensus dan survei kependudukan					
			292.2.1 Assement dan kompilasi data hasil sensus dan survei	4	4	4	4	
			292.2.2 Analisis lanjut hasil sensus dan survei tingkat nasional dan daerah	4	4	4	4	
			292.2.3 Perbanyak hasil dan sosialisasi/diseminasi hasil kajian	2	2	2	2	
			292.2.4 Kegiatan lain terkait dengan Kajian lanjut hasil sensus dan survei kependudukan	1	1	1	1	
			292.3 Pengembangan kebijakan tentang berbagai issue pembangunan kependudukan					
			292.3.1 Pengembangan kebijakan hasil kajian dan analisis berbagai data kependudukan	2	4	4	4	
			292.3.2 Perbanyak hasil dan sosialisasi/diseminasi pengembangan berbagai jenis issue kependudukan	2	4	4	4	
			292.3.3 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan kebijakan tentang berbagai issue pembangunan kependudukan	1	1	1	1	
	3	Jumlah paramater Kependudukan (pusat dan provinsi) yang disepakati oleh stakeholder (Struktur, pertumbuhan, kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk)	293 Perumusan parameter kependudukan yang disepakati oleh semua stakeholders					
			293.1 Pengembangan parameter kependudukan					
			293.1.1 Pengembangan jejaring bagi sektor pengelola masalah kependudukan di pusat dan provinsi	2	2	2	2	
			293.1.2 Perumusan parameter kependudukan melalui kelompok jejaring kelompok kerja sektor pengelola program kependudukan	2	2	2	2	
			293.1.3 Perbanyak dan sosialisasi/diseminasi di pusat dan daerah	3	4	4	4	
			293.1.4 kegiatan lain terkait dengan Pengembangan parameter kependudukan	1	1	1	1	
	4	Jumlah mitra kerja yang berperan aktif dalam penetapan parameter kependudukan (pusat dan provinsi)	294 Peningkatan jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam penetapan parameter kependudukan dan proyeksi penduduk					
			294.1 Pengembangan jejaring bagi lembaga pendidikan di bidang kependudukan					
			294.1.1 Indentifikasi lembaga	1	34	34	34	
			294.1.2 Penyusunan sistem dan pembinaan kerjasama kelembagaan bidang kependudukan	1	34	34	34	
			294.1.5 Penyelenggaraan kegiatan kelompok kerja lembaga atau intitusi pengelola dan pemerhati bidang kependudukan	1	34	34	34	
			294.1.6 Perbanyak hasil sosialisasi kerja kelompok	1	34	34	34	
			294.1.7 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan jejaring bagi lembaga pendidikan di bidang kependudukan	1	1	1	1	
			294.2 Pengembangan Peran aktif mitra kerja dalam perencanaan pengendalian penduduk					
			294.2.1 Peningkatan Peran aktif mitra kerja dalam perencanaan pengendalian penduduk tingkat Pusat	4	4	4	4	
			294.2.2 Peningkatan Peran aktif mitra kerja dalam perencanaan pengendalian penduduk tingkat Pusat	33	33	33	33	
			294.2.3 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan Peran aktif mitra kerja dalam perencanaan pengendalian penduduk	1	1	1	1	
	5	Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam perencanaan pengendalian penduduk	295 Pengembangan kompetensi tenaga pengelola dalam perencanaan pengendalian penduduk					
			295.1 Pengembangan kompetensi melalui program pendidikan/pelatihan jangka pendek					
			295.1.1 Penyusunan panduan dan sasaran pengembangan kapasis tenaga pengelola	1	1	1	1	
			295.1.2 Pelaksanaan penyusunan materi pembelajaran	2	2	2	2	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			295.1.3 Penyempurnaan materi pembelajaran	2	2	2	2	
			295.1.4 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan kompetensi melalui program pendidikan/pelatihan jangka pendek	1	1	1	1	
			295.2 Capacity building tenaga pengelola perencanaan pengendalian penduduk					
			295.2.1 Peningkatan tenaga pengelola direktorat perencanaan pengendalian penduduk tingkat pusat	8	8	8	8	
			295.2.2 Orientasi teknis pengelola perencanaan pengendalian penduduk tingkat provinsi	-	66	66	66	
			295.2.3 Seminar hari kependudukan	1	1	1	1	
			295.2.4 Seminar eksekutif	1	1	1	1	
			295.2.5 Penyusunan laporan hasil orientasi teknis	2	2	2	2	
			295.2.6 Kegiatan lain terkait dengan Capacity building tenaga pengelola perencanaan pengendalian penduduk	1	1	1	1	
	6	Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan perencanaan pengendalian penduduk	296 Pengembangan pembinaan peningkatan kualitas program perencanaan pengendalian penduduk					
			296.1 Pembinaan pengelolaan program perencanaan pengendalian penduduk	3	3	3	3	
	6a	Persentase permasalahan program perencanaan pengendalian penduduk yang ditindaklanjuti dari hasil identifikasi	296.2 Forum konsultasi program perencanaan pengendalian penduduk bagi daerah dan lembaga pengelola atau pemerhati program kependudukan	4	4	4	4	
			296.4 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat perencanaan pengendalian penduduk (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
	6b	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan program perencanaan pengendalian penduduk	296.5 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan pembinaan peningkatan kualitas program perencanaan pengendalian penduduk	1	1	1	1	
	6c	Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program perencanaan pengendalian penduduk (pusat dan provinsi)						
	7	Jumlah Proyeksi Penduduk Nasional dan provinsi yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu.	297 Proyeksi Penduduk Nasional dan provinsi yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu					
			297.1 Kajian dan analisis proyeksi Penduduk	1	34	34	34	
			297.2 Perumusan hasil kajian dan analisis proyeksi penduduk	1	34	34	34	
	8	Jumlah mitra kerja dalam penyusunan proyeksi penduduk	297.3 Penyusunan Proyeksi Penduduk	1	34	34	34	
			297.4 Penetapan Hasil Proyeksi Penduduk	1	34	34	34	
			297.5 Sosialisasi Hasil Proyeksi Penduduk	34	34	34	34	
			297.6 Kegiatan terkait dengan Proyeksi Penduduk Nasional dan provinsi yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu	1	1	1	1	
			298 Pengembangan jejaring kemitraan terhadap penyusunan proyeksi penduduk					
			298.1 Pengembangan jejaring kemitraan penyusunan proyeksi penduduk	1	34	34	34	
			298.2 Pemantapan jejaring kemitraan penyusunan proyeksi penduduk	1	34	34	34	
			298.3 Pemberdayaan jejaring kemitraan penyusunan proyeksi penduduk	1	34	34	34	
			298.4 Kegiatan terkait dengan Pengembangan jejaring kemitraan terhadap penyusunan proyeksi penduduk dipublikasikan tepat waktu	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA					
				2011	2012	2013	2014						
3	Kerjasama Pendidikan Kependudukan	1	Jumlah kebijakan, dan strategi program pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan	3325	Kerjasama Pendidikan Kependudukan					Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan			
				251	Pengembangan kebijakan, strategi dan materi informasi pendidikan kependudukan								
				251.1	Penyusunan. kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan (pedoman. NSPK)	1	1	1	1				
				251.2	Sosialisasi dan diseminasi	34	34	34	34				
				251.3	Kegiatan terkait dengan Pengembangan kebijakan. strategi dan materi informasi pendidikan kependudukan	1	1	1	1				
				2	Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendidikan kependudukan	252	Pengembangan jejaring kemitraan pendidikan kependudukan						
						252.1	Pemantapan jejaring kemitraan	1	34		34	34	
						252.2	Pemantapan kerjasama dengan mitra kerja yang melaksanakan dalam pendidikan kependudukan	4	4		4	4	
						252.3	Kegiatan lain terkait Pengembangan jejaring kemitraan pendidikan kependudukan	1	1		1	1	
				3	Jumlah stakeholder yang mendukung terselenggaranya pendidikan kependudukan	253	Peningkatan kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal						
						253.1	Pengembangan forum kerjasama	1	34		34	34	
				3a	Persentase perguruan tinggi, sekolah dan organisasi pemuda yang melaksanakan pendidikan kependudukan		253.2	Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program pendidikan kependudukan jalur formal. nonformal dan informal	1		34	34	34
							253.3	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder dalam mendukung terselenggaranya pendidikan kependudukan	2		4	4	4
				4	Jumlah Modul pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan	254	Pengembangan modul pembelajaran pendidikan kependudukan						
							254.1	Penyusunan modul pembelajaran program pendidikan kependudukan melalui jalur formal. nonformal dan informal	4		3	-	7
							254.2	Sosialisasi dan diseminasi	34		34	34	34
							254.3	Koordinasi pengintegrasian pendidikan kependudukan kedalam kurikulum	1		34	34	34
							254.4	Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan modul pembelajaran pendidikan kependudukan	1		1	1	1
				5	Jumlah tenaga pengelola pendidikan kependudukan yang terampil dan tenaga pendidik yang kompeten.	255	Peningkatan capacity building tenaga pengelola dan tenaga pendidik dalam pendidikan kependudukan						
							255.1	Penyusunan materi pembelajaran pendidikan kependudukan	8		8	8	8
							255.2	TOT tenaga pengelola	8		74	74	74
					255.3	TOT tenaga pendidik	8	74	74	74			
					255.4	Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan capacity building tenaga pengelola dan tenaga pendidik dalam pendidikan kependudukan	1	1	1	1			
		6	Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan pendidikan kependudukan	256	Pengembangan kualitas pembinaan program pendidikan kependudukan								
					256.1	Fasilitasi pembinaan pendidikan kependudukan kepada stakeholders tingkat provinsi dan kab/kota	1	33	33	33			
		6a	Persentase permasalahan program pendidikan kependudukan yang ditindaklanjuti dari hasil identifikasi		256.2	Fasilitasi pembinaan pendidikan kependudukan kepada Mitra kerja tingkat provinsi dan kab/kota	1	33	33	33			
					256.3	Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan kualitas pembinaan program pendidikan kependudukan	1	1	1	1			

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			257 Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan kependudukan					
			257.1 Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan kependudukan	1	1	1	1	
		6b Jumlah provinsi dan mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan pendidikan kependudukan.	257.2 Monitoring dan evaluasi pembinaan program pendidikan kependudukan tingkat provinsi dan kab/kota	1	33	33	33	
			257.3 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat kerjasama pendidikan kependudukan (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
			257.4 Administrasi kegiatan perkantoran dan anggaran	1	1	1	1	
			257.5 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan kependudukan	1	1	1	1	
4	Analisis Dampak Kependudukan	1 Jumlah Kebijakan, strategi dan materi analisis dampak kependudukan yang dimanfaatkan	3328 Analisis Dampak Kependudukan					Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
			281 Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Analisis Dampak Kependudukan yang dapat dimanfaatkan stakeholder dan mitra kerja					
			281.1 Penyusunan kebijakan dan strategi materi analisis dampak kependudukan	1	1	1	1	
			281.2 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi	34	34	34	34	
			281.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Analisis Dampak Kependudukan yang dapat dimanfaatkan stakeholder dan mitra kerja	1	1	1	1	
		2 Jumlah kajian dan Analisis Dampak kependudukan (kualitas, kuantitas, mobilitas, pertumbuhan) :	282 Pengembangan Kajian dan Analisis Dampak Kuantitas Penduduk terhadap Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan dan Pertahanan Keamanan					
		2a Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kuantitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan	282.1 Inventarisasi dampak kuantitas penduduk	1	1	1	1	
			282.2 Kajian dan analisis dampak kuantitas penduduk	1	1	1	1	
			282.3 Sosialisasi dan diseminasi kajian dan analisis dampak kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk	34	34	34	34	
			282.4 Pendukung pengembangan kajian analisis dampak kuantitas penduduk	1	1	1	1	
			282.5 Triangulasi analisis dampak kuantitas penduduk	1	1	1	1	
			282.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kajian dan Analisis Dampak Kuantitas Penduduk Terhadap Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan dan Pertahanan Keamanan	1	1	1	1	
		2b Jumlah kajian dan Analisis Dampak Kualitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan	283 Pengembangan Kajian dan Analisis Dampak Kualitas Penduduk Terhadap Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan dan Pertahanan Keamanan					
			283.1 Penyusunan Pengembangan Kajian analisis dampak kualitas penduduk Terhadap Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan dan Pertahanan Keamanan	1	1	1	1	
			283.2 Rumusan hasil kajian dan analisis dampak kualitas penduduk	1	1	1	1	
			283.3 Sosialisasi hasil kajian dan analisis dampak kualitas penduduk	1	1	1	1	
			283.4 Diseminasi hasil kajian dan analisis dampak kualitas penduduk	34	34	34	34	
			283.5 Triangulasi analisis dampak kualitas penduduk	1	1	1	1	
			283.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kajian dan Analisis Dampak Kualitas Penduduk Terhadap Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan dan Pertahanan Keamanan	1	1	1	1	
		2c Jumlah Kajian dan Analisis Dampak mobilitas Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan	284 Pengembangan Kajian dan Analisis Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan dan Pertahanan Keamanan					
			284.1 Inventarisasi dampak mobilitas penduduk	1	1	1	1	
			284.2 Rumusan dan Kajian analisis dampak mobilitas penduduk	1	1	1	1	
			284.3 Sosialisasi dan diseminasi hasil kajian dan analisis dampak mobilitas penduduk	1	1	1	1	
			284.4 Triangulasi analisis dampak Mobilitas penduduk	1	1	1	1	
			284.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kajian dan Analisis Dampak Mobilitas Penduduk Terhadap Ekonomi, Politik, Sosial, Lingkungan dan Pertahanan Keamanan	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		2d Jumlah Kajian dan analisis dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	285 Pengembangan Kajian dan Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Terhadap lingkungan					
			285.1 Penyusunan materi Kajian dan Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan	1	1	1	1	
			285.2 Rumusan dan Pembahasan Kajian dan Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan	1	1	1	1	
			285.3 Finalisasi hasil kajian dan analisis Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1	1	1	1	
			285.4 Sosialisasi hasil kajian dan analisis Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1	1	1	1	
			285.5 Triangulasi analisis Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	34	34	34	34	
			283.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kajian dan Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Terhadap lingkungan	1	1	1	1	
		2e Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan	286 Pengembangan Jejaring Kemitraan Terhadap Analisis Dampak Kependudukan					
			286.1 Identifikasi mitra kerja analisitis dampak kependudukan dalam rangka pembentukan mailing list	20	50	60	80	
			286.2 Temu kerja dengan mitra kerja analisitis dampak kependudukan	1	34	34	34	
			286.3 Sosialisasi mailing list mitra kerja analisitis dampak kependudukan bagi pengelola	1	34	34	34	
			286.4 Publikasi kajian analisitis dampak kependudukan	1	1	1	1	
			286.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Jejaring Kemitraan Terhadap Analisis Dampak Kependudukan	1	1	1	1	
		3 Jumlah mitra kerja yang mendukung pelaksanaan Analisis dampak kependudukan	287 Dukungan mitra kerja terhadap analisis dampak kependudukan					
			287.1 Jejaring kemitraan terhadap analisis dampak kependudukan	1	34	34	34	
			287.2 Orientasi teknis bagi mitra kerja analisitis dampak kependudukan	1	34	34	34	
			287.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Dukungan mitra kerja terhadap analisis dampak kependudukan	1	1	1	1	
		4 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam Analisis Dampak Kependudukan (orang)	288 Peningkatan Capacity Building Tenaga Pengelola Dalam Analisis Dampak Kependudukan					
			288.1 Orientasi tenaga pengelola analisitis dampak kependudukan	8	8	8	8	
			288.2 Sosialisasi hasil orientasi analisitis dampak kependudukan melalui temu kerja dengan pusat studi kependudukan	8	74	74	74	
			288.3 Peningkatan kapasitas SDM melalui konsolidasi bidang bagi para Eselon III di lingkungan Direktorat Analisis dampak kependudukan	1	1	1	1	
			288.4 Peningkatan kapasitas SDM melalui konsultasi Kepala seksi bagi para Eselon IV di lingkungan Direktorat Analisis dampak kependudukan	1	1	1	1	
			288.5 Sosialisasi Hasil studi analisitis dampak kependudukan	1	1	1	1	
			288.6 Pembinaan program kependudukan	8	17	26	33	
			288.7 Dukungan Pertemuan hari kependudukan dan keluarga berencana nasional	1	1	1	1	
			288.8 pertemuan review program kependudukan dan KB nasional	1	1	1	1	
			288.9 Penyusunan BSC analisitis dampak kependudukan	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			288.10 Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) analisis dampak kependudukan	1	1	1	1	
			288.11 Konsolidasi program di lingkungan kedepuitan pengendalian penduduk	1	1	1	1	
			288.12 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan Capacity Building Tenaga Pengelola Dalam Analisis Dampak Kependudukan	1	1	1	1	
		5	289 Fasilitasi Pelaksanaan Analisis Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi					
			289.1 Pemantauan dan monitoring analisis dampak kependudukan	1	1	1	1	
		5a	Persentase permasalahan program Analisis Dampak Kependudukan yang ditindaklanjuti dari hasil monitoring dan evaluasi	33	33	33	33	
			289.2 Koordinasi dan konsolidasi analisis dampak penduduk	1	1	1	1	
			289.3 Penyusunan dan Penelaahan program dan anggaran	1	1	1	1	
			289.4 Koordinasi Perencanaan program dan anggaran (Koren II)	1	1	1	1	
			289.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Fasilitasi Pelaksanaan Analisis Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi	1	1	1	1	
			290 Peningkatan Kualitas Sistem Pemantauan Pelaksanaan Program Analisis Dampak Penduduk					
			290.1 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat analisis dampak kependudukan (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
		5b	Jumlah provinsi dan mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Analisis Dampak Kependudukan (4 pusat dan 33 provinsi)	1	1	1	1	
			290.2 Penyusunan sistem pemantauan analisis dampak kependudukan	1	1	1	1	
			290.3 Review kegiatan analisis dampak kependudukan	1	1	1	1	
			290.4 Penyusunan Road Map Analisis dampak kependudukan	1	1	1	1	
			290.5 Koordinasi dan Konsolidasi sistem pemantauan analisis dampak kependudukan	33	33	33	33	
			290.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Sistem Pemantauan Pelaksanaan Program Analisis Dampak Penduduk	1	1	1	1	
5	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah		3316 Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah					Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
		1	Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses pelayanan KB Jalur Pemerintah yang dapat dioptimalkan.	161 Pengembangan grand disain kebijakan, strategi operasional dan materi tentang akses dan kualitas kesertaan KB Jalur pemerintah dan peta kerja				
		1a	Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang kualitas pelayanan KB jalur pemerintah yang dapat dioptimalkan	161.1 Kebijakan, Strategi dan materi informasi kesertaan KB Jalur pemerintah	5	5	5	5
		1b	Jumlah peta kerja pembinaan kesertaan pelayanan KB jalur pemerintah lengkap, akurat dan tepat waktu	161.2 Peta kerja bina kesertaan KB jalur pemerintah	1	1	1	1
				161.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan grand disain kebijakan, strategi operasional dan materi tentang akses dan kualitas kesertaan KB Jalur pemerintah dan peta kerja	1	1	1	1
		2	Ketersediaan alat kontrasepsi	162 Peningkatan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi				
		2a	Jumlah peserta KB baru Pra Sejahtera dan KS I yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi (seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos, Jampersal dan lain-lain) (Juta)	162.1 Pemenuhan Alat Kontrasepsi bagi peserta KB baru keluarga pra sejahtera dan KS I (seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos, Jampersal dan lain-lain) (juta)	4,75	4,89	4,99	5,08
		2b	Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta)	162.2 Pemenuhan alat kontrasepsi bagi peserta KB baru KPS dan KSI (juta)	3,85	3,89	3,97	4,05

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		2c Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta)	162.3 Pemenuhan Alat Kontrasepsi bagi Peserta KB Aktif KPS dan KSI (juta)	12,2	12,5	12,8	13,10	
			162.4 Uji Kualitas alat dan obat kontrasepsi program KB	1	1	1	1	
			162.5 Jaminan ketersediaan kontrasepsi program KB	1	1	1	1	
			162.6 Pengergerakan Pelayanan MKJP					
			162.7.1 MOP	1.318	1.377	1.421	1.475	
			162.7.2 MOW	2.844	2.932	3.023	3.108	
			162.7.3 IUD	6.135	6.491	6.852	7.109	
			162.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi					
			163 Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi					
			163.1 Pertemuan Medis Tehnis	1	1	1	1	
			163.2 Pengembangan informed Choice	1	1	1	1	
			163.3 Surveilans pasca pemasaran (SPP)	1	1	1	1	
			163.4 Pengembangan Pelayanan KB Jalur Pemerintah	1	1	1	1	
			163.5 Pengembangan Center of Excelent (COE) MKJP	-	18	33	33	
			163.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi	33	33	33	33	
		3 Jumlah Klinik KB pemerintah dan swasta yg mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB	164 Penyediaan sarana dan prasarana klinik KB	23.500	4700	4700	4700	
			164.1 IUD Kit	22.820	12.180	-	-	
		3a Sarana dan Prasarana standar	164.2 Obgyn Bed	810	388	342	-	
		Jumlah buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi (BP3K) exemplar	164.3 Implant Kit	500	5.114	3.736	3.113	
		IUD Kit	164.4 VTP Kit	796	554	277	185	
		Implant Kit	164.5 Minilap Kit	817	570	285	190	
		3b Sarana dan Prasarana Pendukung	164.6 Laparoscopy	139	137	137	137	
		Obgyn Bed	164.7 Dry Sterilisator	100	100	100	100	
		VTP Kit	164.8 Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K)	23.500	-	-	-	
		Minilap Kit	164.9 Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)	13.700	10.000	10.000	3.500	
		Laparoscopy	164.10 Kegiatan lain yang terkait dengan Penyediaan sarana dan prasarana klinik KB					
		Dry Sterilisator						
		Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)						

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		4	Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaaan KB Jalur pemerintah	165	Peningkatan jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka Pembinaan Kesertaaan KB Jalur Pemerintah					
			165.1 Rakornas dengan mitra kerja			1	1	1	1	
		4a	Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan kesertaaan KB jalur Pemerintah yang dapat dilaksanakan		165.2 Rakornis dengan mitra kerja	6	8	10	12	
					165.3 Operasional Bhaksos dengan mitra kerja	1	1	1	1	
					165.4 Peningkatan peran RS (PKBRS) pemerintah dalam Pelayanan KB PP dan PK	1	1	1	1	
					165.5 Peningkatan peran Puskesmas rawat inap dalam Pel KB PP dan PK	1	1	1	1	
					165.6 Pengembangan pembiayaan KB Jamkesmas	1	1	1	1	
					165.7 Visiting spesialis	1	1	1	1	
					165.8 Tim Jaga Mutu Pelayanan KB	1	1	1	1	
					165.9 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka Pembinaan Kesertaaan KB Jalur Pemerintah	1	1	1	1	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pembinaan program pembinaan kesertaaan KB jalur pemerintah (Pusat dan Provinsi)	166	Pengembangan pembinaan peningkatan kualitas program bina kesertaaan KB jalur pemerintah					
					166.1 Pembinaan Lapangan kesertaaan KB Jalur pemerintah	33	33	33	33	
		5a	Persentase permasalahan program pembinaan kesertaaan KB jalur pemerintah yang teridentifikasi dan diatasi.		166.2 Pembinaan internal Program KB Jalur Pemerintah	5	5	5	5	
					166.3 Pembinaan Staf Bina Kesertaaan KB Jalur Pemerintah	1	1	1	1	
		5b	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaaan KB Jalur pemerintah		166.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan pembinaan peningkatan kualitas program bina kesertaaan KB jalur pemerintah	1	1	1	1	
		5c	Prosentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan kesertaaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri	167	Peningkatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program bina kesertaaan KB Jalur pemerintah					
					167.1 Monev Alokasi	33	33	33	33	
					167.2 Monev Perlengkapan Klinik KB	33	33	33	33	
					167.3 Monev kualitas pelayanan KB	33	33	33	33	
					167.4 Monev pelayanan KB Jalur pemerintah	33	33	33	33	
					167.5 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat Bina Kesertaaan KB Jalur Pemerintah (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
					167.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program bina kesertaaan KB Jalur pemerintah	1	1	1	1	
				3327	Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaaan ber-KB jalur swasta					
6	Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaaan ber-KB jalur swasta	1	Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Jalur swasta yang dapat dioperasionalkan(NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, peta kerja)	271	Pegembangan kebijakan, strategi materi informasi peningkatan akses dan kualitas (NSPK, Pedoman, Juklak/ Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)	6	6	6	6	Direktorat Bina Kesertaaan KB Jalur Swasta
					271.1 Grand desain Pembinaan dan kesertaaan KB Jalur Swasta	1	-	1	-	
		1a	Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Jalur swasta yang dapat dioperasionalkan(NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional)		271.2 Kebijakan dan Strategi kesertaaan KB Jalur Swasta	4	5	4	5	
		1b	Jumlah peta kerja pelayanan KB jalur swasta yang lengkap dan up to date		271.3 Peta kerja pelayanan KB jalur swasta yang lengkap dan up to date	1	1	1	1	
					271.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pegembangan kebijakan, strategi materi informasi peningkatan akses dan kualitas (NSPK, Pedoman, Juklak/ Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		2	Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kemandirian kesertaan KB swasta	272	Meningkatkan jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka Pembinaan Kesertaan KB Jalur swasta					
			272.1 Operasional Bhaksos dengan mitra kerja			1	1	1	1	
		2a	Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan kesertaan KB jalur swasta yang dapat dilaksanakan			1	1	1	1	
			272.2 Peningkatan peran RS (PKBRS) Swasta dalam pelayanan KB			1	1	1	1	
			272.3 Peningkatan peran DPS dan BPS dalam pelayanan KB			1	1	1	1	
			272.4 Pengembangan Asuransi KB Mandiri			1	1	1	1	
			272.5 Pengembangan Pelayanan KB melalui Apotik			1	1	1	1	
			272.6 Peningkatan peran KB Perusahaan			1	1	1	1	
			272.7 Tim jaga Mutu Pelayanan KB			1	1	1	1	
			272.8 Kegiatan lain yang terkait dengan Meningkatkan jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka Pembinaan Kesertaan KB Jalur swasta			1	1	1	1	
		3	Jumlah tenaga pelatih medis teknis	273	Pengembangan kapasitas Tenaga pengelola dan pelayanan KB medis dan non medis di klinik KB Pemerintah dan Klinik KB Swasta yang kompeten					
			273.1 TOT Pelatihan teknis medis (IUD, Implant, MOW, MOP)			165	231	264	330	
			273.2 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan kapasitas Tenaga pengelola dan pelayanan KB medis dan non medis di klinik KB Pemerintah dan Klinik KB Swasta yang kompeten			1	1	1	1	
		4	Jumlah sarana prasarana pelatihan medis teknis dan pelayanan KB swasta	274	Peningkatan sarana prasarana pelatihan medis teknis dan pelayanan KB swasta					
			274.1 Pengadaan Phantom IUD dan implant			6.157	-	-	-	
		4a	Phantom untuk pelatihan IUD, Implant, MOW dan MOP			-	19.700	3.800	-	
		4b	Papan Petunjuk klinik Pelayanan KB			1	1	1	1	
		5	Jenis alkon mandiri (LIBI) yang beredar dipasaran	275	Peningkatan Jejaring penyediaan alat obat kontrasepsi mandiri					
			275.1 Pengembangan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Swasta			1	2	3	4	
			275.2 CTU bagi Dokter dan Bidan Praktek Swasta			1	2	3	4	
			275.3 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan Jejaring penyediaan alat obat kontrasepsi mandiri			1	1	1	1	
		6	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pembinaan kemandirian dan kesertaan KB jalur swasta (Pusat dan Provinsi)	276	Peningkatan monitoring dan evaluasi, dan pembinaan peningkatan kualitas program bina kesertaan KB jalur swasta					
			276.1 Pembinaan Lapangan kesertaan KB Jalur swasta			33	33	33	33	
		6a	Persentase permasalahan program pembinaan kemandirian dan kesertaan KB jalur swasta yang ditindaklanjuti dari yang teridentifikasi			5	5	5	5	
			276.2 Pembinaan internal program KB Jalur Swasta			11	13	15	17	
			276.3 Rakornas dengan mitra kerja			11	13	15	17	
			276.4 Rakornis dengan mitra kerja			1	1	1	1	
		6b	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kemandirian dan kesertaan KB Jalur swasta			1	1	1	1	
			276.5 Pembinaan Staf Bina Kesertaan KB Jalur swasta			1	1	1	1	
			276.6 Pembinaan pelatihan SDM			33	33	33	33	
			276.7 Monev Alokasi KB Mandiri			33	33	33	33	
			276.8 Monev Pelatihan SDM di Klinik KB pemerintah dan swasta			33	33	33	33	
			276.9 Monev Asuransi KB Mandiri			33	33	33	33	
			276.10 Monev pelayanan KB Jalur Swasta			33	33	33	33	
			276.11 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta (LAKIP dan SPIP)			2	2	2	2	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			3322 Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus dan Sasaran Khusus.					Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
7	Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	1 Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB yang dapat dioperasionalkan di daerah Galciltas, wilayah khusus, Sasaran Khusus, dan berawasan gender (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)	221 Pengembangan grand disain kebijakan, strategi operasional dan materi pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus					
			221.1 Penyusunan grand disain pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran Khusus	1	-	-	-	
			221.2 Sosialisasi grand disain pembinaan kesertaan KB di wilayah dan Sasaran Khusus	34	34	34	34	
			221.3 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan NSPK pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	1	1	-	-	
		1a Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus, yang dapat dioperasionalkan	221.4 Penyusunan materi KIE kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	9	-	9	-	
			221.5 Workshop, Seminar, Lokakarya NSPK Pembinaan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	1	1	1	-	
			221.6 Sosialisasi NSPK	34	34	34	34	
			221.7 Workshop Materi KIE Bina Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	1	1	1	1	
		1b Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB berawasan gender yang dapat dioperasionalkan	221.8 Sosialisasi Materi KIE Bina Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	34	34	34	34	
		1c Jumlah peta kerja pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus lengkap dan up to date	222 Mengembangkan peta kerja program Pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus					
			222.1 Uji petik dan pemetaan program kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	33	33	33	33	
			222.2 Penyusunan peta kerja program kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus					
			222.2.1 Peta Kerja KB Galciltas (199 Kab/Kota)	1	1	1	1	
			222.2.2 Peta Kerja KB Kepulauan (14 Provinsi)	1	1	1	1	
			222.2.3 Peta Kerja KB Perkotaan (10 kota Besar)	1	1	1	1	
			222.2.4 Peta Kerja KB Pria (33 Provinsi)	1	1	1	1	
			222.2.5 Peta Kerja Unmet Need KB (33 Provinsi)	1	1	1	1	
			222.3 Publikasi Peta kerja KB wilayah dan sasaran khusus	1	1	1	1	
		2 Jumlah Mitra kerja setelah mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	223 Meningkatkan jejaring Penggarapan KB di Wilayah dan Sasaran khusus melalui Pertemuan, Penjajagan, Bhaksos, Money dan Pelaporan					
		2a Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus, yang dapat dilaksanakan	223.1 Penggarapan KB Galciltas	1	1	1	1	
			223.2 Penggarapan KB Kepulauan	1	1	1	1	
			223.3 Penggarapan KB Perkotaan	1	1	1	1	
		2b Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	223.4 Penggarapan KB Pria	1	1	1	1	
			223.5 Penggarapan KB Unmet Need	1	1	1	1	
		3 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	224 Mengembangkan akses dan kualitas pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus					
			224.1 Penyusunan pedoman mekanisme pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	1	1	1	1	
			224.2 Memfasilitasi keterjangkauan informasi pembinaan KB di wilayah dan sasaran khusus	34	34	34	34	
		3a Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.	224.3 Memfasilitasi keterjangkauan pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus	34	34	34	34	
			224.4 Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus	34	34	34	34	
			224.5 Pembinaan internal peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	5	5	5	5	
		3b Persentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus, yang terintegrasi kedalam kebijakan pembangunan disektornya	224.6 Memfasilitasi integrasi penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus	34	34	34	34	
			224.6 Kegiatan lain terkait dengan pengembangan akses dan kualitas pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	34	34	34	34	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			225 Meningkatkan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program bina kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus					
		3c Persentase permasalahan program pembinaan kesertaan KB Galcilitas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus yang ditindaklanjuti dari yang teridentifikasi	225.1 Monev penggarapan KB Galcilitas	34	34	34	34	
			225.2 Monev peggarapan KB Pria	34	34	34	34	
			225.3 Monev penggarapan KB Perkotaan	10	10	10	10	
			225.4 Monev penggarapan KB Unmet need	34	34	34	34	
			225.5 Monev penggarapan KB Kepulauan	14	14	14	14	
			225.6 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat Bina Kesertaan KB wilayah dan sasaran khusus (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
8	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi		3320 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi					Direktorat Kesehatan Reproduksi
			201 Perumusan kebijakan, strategi dan materi informasi pembinaan kualitas Kesehatan Reproduksi					
		1 Jumlah Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi KHIBA dan PMKR ymag dapat dioperasikan (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)	201.1 Pengembangan Kebijakan.Strategi dan Materi Informasi program Kespro	2	2	2	2	
			201.2 Pengembangan Pedoman Juklak Kesehatan Reproduksi	4	4	4	4	
			201.3 Penyusunan Materi Informasi Kesehatan Reproduksi					
			201.3.1 Penyusunan dan Penyempurnaan Materi Informasi KHIBA (KBPP/PK, P4K, 4 Terlalu, MAL)	4	2	2	2	
			201.3.2 Penyusunan dan Penyempurnaan Materi Informasi Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi	4	2	2	2	
			201.3.3 Uji Coba dan Finalisasi Materi Informasi Kesehatan Reproduksi	4	2	2	2	
			201.4 Pencetakan dan Distribusi Materi Informasi Kesehatan Reproduksi					
			201.4.1 Pencetakan dan Distribusi Materi Informasi Kesehatan Reproduksi	1	1	1	1	
		2 Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBAndan PMKR	202 Peningkatan Klinik KB yang memberikan promosi dan Kip/Konseling Kesehatan Reproduksi					
			202.1 Promosi dan sosialisasi peningkatan kesertaan klinik KB dalam kesehatan reproduksi					
			202.1.1 Sosialisasi Kebijakan, Strategi, dan Materi Informasi Kesehatan Reproduksi	34	34	34	34	
			202.2 Pengembangan Mekanisme operasional kesehatan reproduksi di klinik KB					
			202.2.1 Penyusunan Sistem Mekanisme Operasional	1	1	1	1	
			202.3 Pengolahan data klinik KB yang memberikan promosi dan KIP/Konseling kesehatan reproduksi					
			202.3.1 Pengumpulan Data Klinik KB	34	34	34	34	
			202.3.2 Analisis, Pengolahan, dan Evaluasi Data Klinik KB	34	34	34	34	
		3 Jumlah Tenaga yang kompeten pengelola KHIBA mitra kerja yang mendapatkan orientasi tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta PMKR	203 Peningkatan tenaga Kespro yang kompeten dalam mengelola pembinaan kualitas Kespro					
			203.1 Peningkatan Pengetahuan Tenaga Pengelola. Promosi dan KIP/Konseling Kesehatan Reproduksi					
			203.1.1 Orientasi Tenaga Pengelola Kesehatan Reproduksi	1	1	1	1	
			203.1.2 Orientasi Tenaga Promosi dan Konseling	1	1	1	1	
			203.1.3 Orientasi Deteksi Dini Kanker Alat Reproduksi (Pap Smear/ IVA)	1	1	1	1	
			203.1.4 Operasional Baksos Integrasi Pelayanan Kespro dengan Pelayanan KB	1	1	1	1	
			203.2 Pengembangan data basis program Kesehatan Reproduksi					
			203.2.1 Pengumpulan Data Basis Perencanaan Progran Kesehatan Reproduksi	34	34	34	34	
			203.2.2 Analisis dan Penyempurnaan Data Basis Perencanaan Program Kesehatan Reproduksi	34	34	34	34	
			203.2.3 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		4	Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta PMKR	204	Peningkatan Jejaring pembinaan peningkatan akses dan kualitas Kesehatan Reproduksi					
			204.1 Peningkatan fasilitasi promosi kesehatan reproduksi kepada Mitra Kerja Terkait							
			204.1.1 Fasilitasi Promosi KB Pasca Persalinan dan Keguguran (KBPP dan KBPK)			1	1	1	1	
			204.1.2 Fasilitasi Promosi 4 Terlalu dan Metode Amenorea Laktasi			1	1	1	1	
			204.1.3 Fasilitasi Promosi Kondom Dual Proteksi dan Penerapan Universal Precaution			1	1	1	1	
		4.a.	Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan KHIBA yang dapat dilaksanakan			1	1	1	1	
			204.1.4 Fasilitasi Promosi Deteksi Dini Kanker Alat Reproduksi (Pap Smear/IVA) dan Sadari serta Infertilitas			1	1	1	1	
			204.1.5 Promosi Kesehatan Reproduksi Melalui Indonesia Rap Contest			1	1	1	1	
		4.b.	Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan PMKR yang dapat dilaksanakan.			1	1	1	1	
			204.1.6 Contraceptive Technology Update (CTU) Kembalinya Kesuburan Pasca Penggunaan Kontrasepsi			1	1	1	1	
			204.1.7 Penyelenggaraan Promosi Pencegahan KAR Bersama Mitra Kerja Terkait			1	1	1	1	
			204.1.8 Penyusunan Pola Penilaian PERSI Award			1	1	1	1	
			204.2 Peningkatan fasilitasi Integrasi pelayanan KIP/Konseling kesehatan reproduksi dalam pelayanan KB							
			204.2.1 Integrasi Pelayanan KIP/Konseling Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi dengan pelayanan KB			1	1	1	1	
			204.2.2 Integrasi Pelayanan KIP/Konseling KHIBA dengan Pelayanan KB			1	1	1	1	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta PMKR (Pusat dan Provinsi)	205	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan akses dan kualitas kesehatan reproduksi					
			205.1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas kesehatan reproduksi							
			205.1.1 Monitoring Peningkatan Akses dan Kualitas Program Kesehatan Reproduksi			34	34	34	34	
			205.1.2 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat kesehatan reproduksi (LAKIP dan SPIP)			2	2	2	2	
		5.a.	Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pembinaan kelangsungan hidup ibu, ayi dan anak serta PMKR			1	1	1	1	
			205.1.3 Pengelolaan Anggaran Kesehatan Reproduksi			1	1	1	1	
			205.1.4 Operasional Pengelolaan Anggaran			1	1	1	1	
			205.1.5 Operasional Pengelolaan Direktorat Kesehatan Reproduksi			1	1	1	1	
			205.2 Pembinaan Kualitas Kesehatan Reproduksi							
		5.b.	Persentase permasalahan proram pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta PMKR yang dapat ditindaklanjuti dari yang teridentifikasi			34	34	34	34	
			205.2.1 Pembinaan Internal Program Kesehatan Reproduksi			34	34	34	34	
			205.2.2 Pembinaan Staff Kesehatan Reproduksi			1	1	1	1	
			205.3 Peningkatan penyelesaian permasalahan pembinaan kualitas Kespro yang teridentifikasi dapat ditindak lanjuti							
			205.3.1 Identifikasi Permasalahan Program Kualitas Kespro			1	1	1	1	
			205.3.2 Analisis Permasalahan Kualitas program Kespro			1	1	1	1	
			205.3.3 Tindak Lanjut Penyelesaian Pembinaan Permasalahan Kualitas Program Kespro			1	1	1	1	
9	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak			3317	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak					
		1	Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan	171	Pengembangkan Kebijakan, Strategi dan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak					Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak
			171.1 Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak			4	3	2	2	
			171.2 Sosialisasi Kebijakan, Strategi dan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak			4	-	-	4	
			171.3 Penyusunan Grand Design Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak			-	1	1	1	
			171.4 Penyempurnaan Grand Design Kebijakan, Strategi dan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak			-	1	1	1	
			171.5 Sosialisasi Grand Design Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak			-	1	-	1	
			171.6 Pencetakan Buku-buku Kebijakan, Strategi, Materi dan Grand Design Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak			-	7	5	5	
			171.7 Kegiatan Lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak			-	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		1a Jumlah peta kerja pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang terkini dan akurat	172 Pengembangan Peta Kerja pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang lengkap, akurat dan up to date					
			172.1 Perumusan Materi Peta Kerja Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	1	1	1	1	
			172.2 Pengembangan Data Basis Online Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	1	1	1	1	
			172.3 Pencetakan dan Distriusi	2	2	2	2	
			172.4 Kegiatan Lain Yang terkait dengan Pengembangan Peta Kerja pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang lengkap, akurat dan up to date	1	1	1	1	
		2 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	173 Peningkatan partisipasi keluarga balita dan anak dalam kegiatan kelompok BKB					
			173.1 Identifikasi sasaran kelompok BKB	33	33	33	33	
			173.2 Dukungan Pembentukan kelompok baru	33	33	33	33	
			173.3 Penyusunan materi penyuluhan kelompok BKB	3	3	3	3	
			173.4 Kegiatan Lian yang terkait dengan Peningkatan partisipasi keluarga balita dan anak dalam kegiatan kelompok BKB	1	1	1	1	
		3a Jumlah kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dioperasionalkan	174 Peningkatkan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak					
			174.1 Pengembangan Panduan Mitra Kerja	1	1	1	1	
			174.2 Penguatan Jejaring Kerjasama dengan Mitra Kerja (Pakar, Praktisi dll)	-	2	3	4	
		3b Jumlah mitra kerja yang memberikan pendampingan terhadap pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak	174.3 Pembentukan Kelompok Percontohan Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak di lingkungan Mitra Kerja	5	-	3	-	
			174.4 Pengembangan Model Keterpaduan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak di lingkungan Mitra Kerja	5	2	1	-	
			174.5 Pembinaan Kemitraan	1	1	1	1	
			174.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatkan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak	1	1	1	1	
		4 Jumlah Tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak :	175 Pengembangan kompetensi tenaga pelatih dan ketrampilan pengelola program pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak					
		4a Jumlah Tenaga Pelatih yang meningkat kompetensinya tentang pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (orang)	175.1 Training Of Trainer bagi Pelatih Program Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	68	68	68	68	
			175.2 Training Of Trainer bagi Pengelola Program Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	102	136	170	204	
		4b Jumlah Pengelola (mitra kerja) yang meningkat keterampilannya dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (orang)	175.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan kompetensi tenaga pelatih dan ketrampilan pengelola program pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak	1	1	1	1	
		5 Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (Modul, APE, KKA dll)	176 Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak					
			176.1 Penyusunan prototype BKB Kit	1	1	1	1	
			176.2 Pengadaan/Produksi Prototype BKB KIT	34	100	100	100	
			176.3 Sosialisasi BKB Kit	-	-	34	34	
			176.4 Pengadaan Materi BKB Percontohan	-	13.086	13.086	13.086	
			176.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		6	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak	177	Peningkatkan pembinaan kualitas program bina ketahanan keluarga balita dan anak					
			177.1 Pembinaan operasional provinsi			33	33	33	33	
			177.2 Pembinaan operasional mitra kerja			33	33	33	33	
		6a	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak			-	66	66	66	
			177.3 Pembinaan BKB Percontohan							
			177.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatkan pembinaan kualitas program bina ketahanan keluarga balita dan anak			1	1	1	1	
		6b	Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak	178	Peningkatan monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak					
			178.1 Monitoring			33	33	33	33	
			178.2 Evaluasi			3	3	3	3	
		6c	Persentase permasalahan pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti			5	5	5	5	
			178.3 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat bina keluarga balita dan anak (LAKIP, SPIP dll)							
			178.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak			1	1	1	1	
10	Pembinaan Ketahanan Remaja			3319	Pembinaan Ketahanan Remaja					Direktorat Bina Ketahanan Remaja
		1	Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja)	191	Pengembangan kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja					
						1	-	-	1	
						34	34	34	34	
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
		1a	Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dapat dioperasionalkan			1	1	1	1	
						1	1	1	1	
						2	1	1	1	
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
		1b	Jumlah Grand Design program pembinaan ketahanan remaja yang dapat dioperasionalkan	192	Pengembangan Grand Design program pembinaan ketahanan remaja					
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
		1c	Jumlah peta kerja Pembinaan Remaja dan Keluarga yang akurat dan terkini	193	Pengembangan Peta kerja Program Ketahanan Remaja yang akurat dan terkini					
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	
						1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2011	2012	2013	2014		
		2	Jumlah PIK Remaja :	194	Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa Tahap Tumbuh, Tegak dan Tegar				
		2a	Jumlah PIK Remaja Tahap Tumbuh (kelompok)		194.1 PIK Remaja Tahap Tumbuh (kelompok)	9.643	9.932	10.229	10.535
		2b	Jumlah PIK Remaja Tahap Tegak		194.2 PIK Remaja Tahap Tegak	1.630	2.038	2.445	2.853
		2c	Jumlah PIK Remaja Tahap Tegar		194.3 PIK Remaja Tahap Tegar	978	1.223	1.467	1.630
					194.4 Pengembangan BKR Aktif	64.531.167	66.467.102	68.461.115	70.514.948
					194.5 Pengembangan BKR Percontohan	6.543	7.198	7.917	8.708
					194.6 Ajang kreativitas PIK Remaja/Mahasiswa	1	1	1	1
					194.7 Pemilihan PIK Remaja	1	1	1	1
					194.8 Pemilihan Duta Mahasiswa	1	1	1	1
					194.9 Pemilihan Remaja NgeRap	1	1	1	1
					194.10 Tukar Pengalaman PIK Remaja/Mahasiswa dan PIK Unggulan	1	1	1	1
					194.11 Workshop bagi Duta mahasiswa	1	1	1	1
					194.12 Workshop bagi PIK Unggulan	1	1	1	1
					194.13 Center of Excellent	1	1	1	1
					194.14 Evaluasi	2	2	2	2
					194.15 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa Tahap Tumbuh. Tegak dan Tegar	1	1	1	1
		3	Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan remaja dan keluarga	195	Pengembangan prototype media penyuluhan pembinaan ketahanan remaja				
		3a	Jumlah prototype media penyuluhan pembinaan ketahanan remaja yang didistribusikan ke provinsi dan mitra kerja tepat sasaran (modul, simulasi dll)		195.1 Penyusunan konsep awal	1	1	1	1
					195.2 Penyempurnaan konsep prototype	1	1	1	1
					195.3 Diseminasi	1	1	1	1
					195.4 Perbanyak prototype	1	1	1	1
					195.5 Keiatan lain yang terkait dengan Pengembangan prototype media penyuluhan pembinaan ketahanan remaja		1	1	1
		3b	Jumlah sarana prasarana Center of Excellence (COE) pembinaan ketahanan remaja (papan nama, furniture, tempat konseling, komputer, video player, TV dll)	196	Pengembangan COE model penggarapan bina ketahanan remaja (himpunan wanita penyandang cacat. Muhammadiyah. KNPI. dll)	3	3	3	3
		4	Jumlah Kemitraan dalam pembinaan ketahanan remaja dan keluarga	197	Peningkatan kemitraan dalam rangka pembinaan ketahanan remaja yang dapat dilaksanakan				
		4a	Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan remaja yang dapat dilaksanakan		197.1 Pertemuan Koordinasi	34	34	34	34
					197.2 Penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kerjasama	1	1	1	1
		4b	Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Ketahanan Remaja)		197.3 Sosialisasi kerjasama	34	34	34	34
					197.4 Pendampingan Pembinaan	1	1	1	1
					197.5 Evaluasi	2	2	2	2
					197.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kemitraan dalam rangka pembinaan ketahanan remaja yang dapat dilaksanakan		1	1	1

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		5	Jumlah Tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan remaja (orang)	198	Pengembangan kompetensi Tenaga pelatih (aparatur) program Pembinaan Ketahanan Remaja					
			198.1 Persiapan							
		5a	Jumlah Tenaga pelatih yang meningkat kompetensinya tentang Pembinaan Ketahanan Remaja (aparatur)		198.2 Pelaksanaan TOT	70	70	70	70	
					198.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan kompetensi Tenaga pelatih (aparatur) program Pembinaan Ketahanan Remaja	1	1	1	1	
		5b	Jumlah Tenaga pelatih yang meningkat kompetensinya tentang Pembinaan Ketahanan Remaja (mitra kerja)	199	Pengembangan kompetensi Tenaga pelatih (mitra kerja) program Pembinaan Ketahanan Remaja					
					199.1 Persiapan	1	1	1	1	
					199.2 TOT pengelola PIK Remaja/Mahasiswa bagi mitra kerja	171	171	171	171	
					199.3 Studi banding	1	1	1	1	
					199.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan kompetensi Tenaga pelatih (mitra kerja) program Pembinaan Ketahanan Remaja	1	1	1	1	
		6	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pembinaan program Ketahanan Remaja (pusat-provinsi)	200	Pembinaan peningkatan kualitas program Bina Ketahanan Remaja					
					200.1 KOBID	1	1	1	1	
		6a	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Ketahanan Remaja		200.2 KOSI	1	1	1	1	
					200.3 KOREN	1	1	1	1	
		6b	Jumlah Operasionalisasi PIK Remaja dan PIK Mahasiswa		200.4 RAKERNAS	1	1	1	1	
					200.5 RAKORNAS	1	1	1	1	
		6c	Persentase penyelesaian permasalahan pembinaan program Ketahanan Remaja yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti		200.6 REVIEW	1	1	1	1	
					200.7 Pembinaan SDM di lingkungan Bina Ketahanan Remaja	1	1	1	1	
					200.8 Kegiatan lain yang terkait dengan Pembinaan peningkatan kualitas program Bina Ketahanan Remaja	1	1	1	1	
				201	Pembinaan program intern (melalui koordinasi kemitraan, bintek, dll) dan ekstern (melalui peningkatan kualitas PIK remaja/mahasiswa dan BKR)					
						34	34	34	34	
				202	Peningkatan kualitas sistem pemantauan Pembinaan Ketahanan remaja yang terpadu					
					202.1 Pemantauan Terpadu	34	34	34	34	
					202.2 Uji Petik	6	6	6	6	
					202.3 Pengamatan Lapangan	34	34	34	34	
					202.4 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat bina ketahanan remaja (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
					202.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas sistem pemantauan Pembinaan Ketahanan remaja yang terpadu	1	1	1	1	
11	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			3324	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan					
		1	Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya	241	Pengembangan kebijakan strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan				Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
					241.1 Penyusunan dan penyesuaian kebijakan strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	2	10	4	10	
					241.2 Sosialisasi kebijakan strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	-	34	34	34	
					241.3 Identifikasi Sasaran peta kerja	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		1a Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional)	241.4 Perumusan sasaran peta kerja	1	1	1	1	
			241.5 Penetapan sasaran peta kerja	1	1	1	1	
			241.6 Pengelolaan Databasis Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	12	12	12	12	
			241.7 Penyusunan dan pengelolaan web site Lanjut Usia	12	12	12	12	
		1b Jumlah peta kerja Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang terkini dan akurat						
		2 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia	242 Peningkatan PSP Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan tentang peningkatan kualitas hidup Lansia dan Rentan					
			242.1 Identifikasi Sasaran Peningkatan PSP Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	1	1	1	1	
			242.2 Pengembangan KIE PSP Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	34	34	34	34	
			242.3 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan PSP Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	34	34	34	34	
		3 Jumlah Kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan	243 Peningkatan jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan					
			243.1 Identifikasi	1	4	4	4	
		3a Jumlah mitra kerja yang melaksanakan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	243.2 Penyusunan Panduan Kemitraan	1	2	2	2	
			243.3 Penyusunan Materi Pembinaan	1	2	2	2	
		3b Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	243.4 Pembinaan Lanjut Usia melalui Kemitraan	34	34	34	34	
			243.5 Sosialisasi Panduan Kemitraan	34	34	34	34	
			243.6 Pembinaan kelompok BKLR, KLR, dan BKL Percontohan	33	33	33	33	
		4 Jumlah Prototype Media penyuluhan pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	244 Pengembangan Prototype media penyuluhan pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan					
			244.1 Need Assesment dan desain prototype	1	1	1	1	
			244.2 Pengadaan/Produksi	1	1	1	1	
			244.3 Distribusi	34	34	34	34	
			244.4 Monitoring	34	34	34	34	
		5 Jumlah Tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan (orang)	245 Pengembangan kompetensi Tenaga pelatih dan pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia Dan Rentan					
		5a Jumlah Tenaga pelatih (mitra kerja) yang meningkat kompetensinya tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia Dan Rentan	245.1 Penyusunan dan pengembangan kurikulum dan GBPP	1	1	1	1	
			245.2 Penyusunan dan pengembangan materi dan media pembelajaran	1	1	1	1	
			245.3 TOT pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan	60	66	66	66	
		5b Jumlah Pengelola (mitra kerja) yang meningkat keterampilannya dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan rentan	245.4 Monitoring dan evaluasi pasca pelatihan	34	34	34	34	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		6	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan (pusat-provinsi)	246	Peningkatan kualitas program Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan bagi provinsi (internal dan eksternal)					
			246.1 Pelaksanaan pembinaan operasional provinsi		33	33	33	33		
		6a	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan		246.2	Pelaksanaan pembinaan operasional dengan mitra kerja				
					33	33	33	33		
		6b	Persentase penyelesaian permasalahan pembinaan program Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti	247	Peningkatan kualitas sistem pemantauan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang terpadu					
			247.1 Pemantauan terpadu		33	33	33	33		
			247.2 Uji petik		6	6	6	6		
			247.3 Pengamatan lapangan		33	33	33	33		
			247.4 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat bina ketahanan keluarga lansia dan rentan (LAKIP dan SPIP)		2	2	2	2		
12	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		3323	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		
		1	Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja.	231	Pengembangan kebijakan. Strategi, materi dan peta kerja pemberdayaan ekonomi keluarga					
					231.1	Penyusunan kebijakan dan strategi kebijakan program pemberdayaan ekonomi keluarga				
					231.2	Penyusunan Pedoman Program PEK				
		1a	Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja.		231.3	Penyusunan juklak, juknis dan NSPK program PEK				
					231.4	Sosialisasi pengembangan kebijakan program pemberdayaan ekonomi keluarga				
					231.5	Perumusan pola program PEK				
		1b	Jumlah peta kerja pengembangan kelompok UPPKS yang terkini dan akurat.		231.6	Penyusunan peta kerja program PEK				
					231.7	Sosialisasi peta kerja program PEK				
					231.8	Pengembangan databasis online Kelompok UPPKS				
					231.9	Analisa databasis online Kelompok UPPKS				
		2	Kesertaan ber-KB	232	Peningkatan presentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS dan meningkatkan jumlah PUS anggota Kelompok UPPKS menjadi peserta KB mandiri					
		2a	Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB		232.1	Pengembangan KIE program pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB kepada Kelompok UPPKS				
					232.2	Konsolidasi program pemberdayaan ekonomi keluarga				
		2b	Jumlah PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1.1 jt Peserta KB kelompok Ekonomi Usaha Produktif)		232.3	Peningkatan pembinaan PUS peserta KB anggota Kelompok UPPKS menjadi peserta KB mandiri				
					44.000	66.000	88.000	110.000		

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		3	Jumlah Kemitraan dalam pembinaan kelompok UPPKS	233	Pengembangan kemitraan untuk mendapatkan pembinaan dan akses sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produk UPPKS					
		3a	Jumlah mitra kerja yang melakukan pendampingan kepada kelompok UPPKS (27.000 kelompok UPPKS)		233.1 Peningkatan jumlah mitra kerja yang melakukan pendampingan kepada Kelompok UPPKS					
					233.1.1 Inventarisasi dan penyusunan data potensi mitra kerja	1	1	1	1	
		3b	Jumlah mitra kerja yang memberikan fasilitasi pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga		233.1.2 Penyusunan strategi operasional pendampingan program pemberdayaan ekonomi keluarga	1	1	1	1	
					233.1.3 Sosialisasi program pemberdayaan ekonomi keluarga kepada mitra kerja dan sektor terkait	34	34	34	34	
					233.1.4 Orientasi program pemberdayaan ekonomi keluarga kepada mitra kerja	3	3	3	3	
		3c	Persentase kelompok UPPKS yang mendapatkan pendampingan dalam pembinaan manajemen kewirausahaan		233.1.5 Operasionalisasi Pelaksanaan pendampingan oleh mitra kerja kepada kelompok UPPKS	3	3	3	3	
					233.1.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan kelompok UPPKS.	34	34	34	34	
		3d	Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan		233.2 Peningkatan jumlah mitra kerja yang memberikan fasilitasi pembinaan program Pemberdayaan ekonomi Keluarga	3	3	3	3	
					233.3 Pertemuan koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja dlm pengembangan teknologi (ATTG)	1	1	1	1	
					233.4 Peningkatan persentase Kelompok UPPKS yang mendapatkan pembinaan manajemen kewirausahaan	10	10	10	10	
					233.5 Peningkatan jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan	2	2	2	2	
					233.6 Pertemuan koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pemasaran produk Kelompok UPPKS	1	1	1	1	
		4	Jumlah Tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga (orang)	234	Peningkatan kualitas keterampilan tenaga pengelola dan mitra kerja program pemberdayaan ekonomi keluarga					
		4a	Jumlah tenaga pengelola program pemberdayaan ekonomi kel. yg terlatih tingkat provinsi, kab/kota		234.1 Orientasi bagi tenaga pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga	66	85	85	85	
					234.2 Orientasi pengembangan Kelompok UPPKS oleh pengelola program Pemberdayaan Ekonomi keluarga	2	3	4	4	
		4b	Jumlah mitra kerja yang terlatih dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga tingkat provinsi, kab/kota		234.3 Peningkatan kemampuan pengelolaan databasis Kelompok UPPKS online	33	33	33	33	
					234.4 Orientasi program pemberdayaan ekonomi keluarga bagi mitra kerja	99	99	99	99	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga.	235	Peningkatan kualitas pembinaan, pemantauan dan monitoring evaluasi serta penyelesaian permasalahan program pemberdayaan ekonomi keluarga					
		5a	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga		235.1 Peningkatan pelaksanaan, monitoring dan pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga	34	34	34	34	
					235.2 Penggerakan Ekonomi Keluarga Melalui Harganas	34	34	34	34	
		5b	Persentase permasalahan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti.		235.3 Pertemuan koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pembinaan manajemen kewirausahaan	1	1	1	1	
					235.4 Pembinaan Kelompok UPPKS melalui magang/study banding/Temu Kader/ Jambore	1	1	1	1	
					235.5 Pembinaan percontohan Kelompok UPPKS di kab/kota	33	33	33	33	
					235.6 Penyelesaian permasalahan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
13	Peningkatan Advokasi, dan KIE Program Kependudukan dan KB		3313 Peningkatan Advokasi, dan KIE Program Kependudukan dan KB					Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
		1 Jumlah Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB yang disusun	131 Pengembangan kebijakan dan strategi advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder					
			131.1 Perumusan strategy advokasi dan KIE					
			131.1.1 Data Basis Advokasi dan KIE	1	1	1	1	
			131.1.2 Peta Kerja Advokasi dan KIE	1	1	1	1	
			131.1.3 Penyempurnaan Strategi Advokasi dan KIE	1	1	1	1	
			131.1.4 Workshop implementasi Strategi Advokasi dan KIE	1	1	1	1	
			131.1.5 Perbanyak materi	1	1	1	1	
			131.1.5 Sosialisasi dan desiminasi Strategi Advokasi KIE	1	1	1	1	
			131.1.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan kebijakan dan strategi advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder	1	1	1	1	
			131.2 Pengembangan pedoman advokasi dan KIE (NSPK dan SPM)					
			131.2.1 Review Pedoman Advokasi dan KIE	1	1	1	1	
			131.2.2 Uji Petik	1	1	1	1	
			131.2.3 Penyempurnaan Pedoman Advokasi KIE	1	1	1	1	
			131.2.4 Penggandaan buku Pedoman Advokasi KIE	1	1	1	1	
			131.2.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan pedoman advokasi dan KIE (NSPK dan SPM)	1	1	1	1	
			131.3 Pengembangan pedoman operasional jejaring advokasi dan KIE	1	1	1	1	
			131.3.1 Workshop Pengembangan Pedoman Operasional Jejaring Advokasi dan KIE	1	1	1	1	
			131.3.2 Evaluasi dan Penyempurnaan Pedoman Operasional Jejaring Advokasi KIE	1	1	1	1	
			131.3.3 Penggandaan Operasional Jejaring Advokasi KIE	1	1	1	1	
			131.3.4 Pembentukan Jejaring Advokasi KIE	1	1	1	1	
			131.3.5 Fasilitasi Jejaring advokasi KIE	1	1	1	1	
			131.3.6 Operasional Tim Jejaring advokasi KIE	1	1	1	1	
			131.3.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan pedoman operasional jejaring advokasi dan KIE	1	1	1	1	
		2 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	132 Peningkatan kualitas pengetahuan PUS, WUS dan remaja keluarga tentang pembangunan KKB melalui informasi media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	56	56	56	56	
		3a Persentase provinsi yang mendapatkan sarana dan prasarana advokasi dan KIE yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	133 Pengembangan sarana dan prasarana Advokasi dan KIE sesuai kebutuhan					
			133.1 Pengadaan peralatan MPC provinsi	7	13	20	26	
			133.2 Penyediaan KIE kit	380	270	190	160	
			133.3 Penyediaan materi KIE di klinik KB	8930	6345	4465	3760	
			133.4 Penyediaan matri KIE bagi kabupaten kota	223	173	99	-	
			133.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan sarana dan prasarana Advokasi dan KIE sesuai kebutuhan	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		3b	Jumlah prototype materi dan media advokasi dan KIE program kependudukan dan KB yang dikembangkan dan diproduksi	134	Pengembangan prototype materi dan media Advokasi dan KIE program pembangunan Kependudukan dan KB.					
					132.1.1	Evauasi Prototype Materi dan Media Advokasi KIE	2	2	2	2
					132.1.2	Penyempurnaan Prototype materi dan media Advokasi KIE	2	2	2	2
					132.1.3	Penyediaan Prototype materi dan media Advokasi KIE	2	2	2	2
					132.1.4	Desiminasi Prototype materi dan media Advokasi KIE	2	2	2	2
					132.1.5	Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan prototype materi dan media Advokasi dan KIE program pembangunan Kependudukan dan KB	1	1	1	1
		4	Jumlah tenaga pengelola advokasi dan KIE yang dilatih atau ditingkatkan kapasitasnya	135	Pengembangan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksanaan advokasi KIE dan pencitraan					
					135.1	Peningkatan kompetensi Tenaga pengelola Advokasi KIE	99	99	99	99
					135.2	Peningkatan kompetensi pengelola Media tradisional	701	553	330	-
					135.3	Lomba-lomba Advokasi KIE	1	1	1	1
					135.4	Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksanaan advokasi KIE dan pencitraan	1	1	1	1
		5	Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD)	136	Pengembangan advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB kepada stakeholder dan mitra					
					136.1	Workshop Advokasi dan KIE kepada Stakeholder dan mitra	2	2	2	2
					136.2	Koalisi Kependudukan	1	1	1	1
					136.3	Tim Advokasi dan KIE	1	1	1	1
					136.4	Pengembangan Strategi Advokasi KIE Galciltas				
					136.4.1	Penyusunan Draft Strategi KIE Galciltas	1	1	1	1
					136.4.2	Workshop Pengembangan Strategi Advokasi KIE Galciltas	1	1	1	1
					136.4.3	Penyempurnaan Strategi KIE Galciltas	1	1	1	1
					136.4.4	Evaluasi Advokasi KIE Galciltas	1	1	1	1
					136.5	Advokasi KIE kegiatan Momentum	6	6	6	6
					136.6	KIE Kependudukan dan KB Terpadu	33	33	33	33
					136.7	Penyediaan bahan dan Materi Advokasi KIE	33	33	33	33
					136.8	Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB kepada stakeholder dan mitra	1	1	1	1
		6	Kemitraan dalam advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB:	137	Pengembangan jejaring kemitraan advokasi dan KIE dalam program pembangunan kependudukan dan KB					
					137.1	Peningkatan Peran Jejaring Advokasi KIE				
		6a	Persentase mitra kerja yang melakukan advokasi dan KIE tentang program kependudukan dan KB		136.1.1	Pengembangan pedoman Operasional Jejaring Advokasi KIE	1	1	1	1
					136.1.2	Evaluasi dan Penyempurnaan	1	1	1	1
					136.1.3	Penggandaan dan distribusi pedoman jejaring advokasi KIE	1	1	1	1

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			137,2 Pembentukan Jejaring kemitraan (dukungan tindak lanjut MOU dengan Stakeholder dan Mitra Kerja)					
			136.2.1 Operasional Tim Jejaring	12	12	12	12	
			136.2.2 Fasilitasi Jejaring	1	1	1	1	
			136.2.3 Pertemuan Koordinasi	2	2	2	2	
			137,3 Pemantapan jejaring kemitraan	1	1	1	1	
			137,4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan jejaring kemitraan advokasi dan KIE dalam program pembangunan kependudukan dan KB	1	1	1	1	
		6b Persentase Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan advokasi dan KIE	138 Fasilitasi advokasi dan KIE program pembangunan KKB kepada mitra kerja					
			138.1 Sosialisasi Pembangunan Kependudukan dan KB kepada mitra kerja	34	34	34	34	
			138.2 Desiminasi Pembangunan Kependudukan dan KB kepada mitra kerja	34	34	34	34	
			138.3 Seminar Pembangunan Kependudukan dan KB	34	34	34	34	
			138.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Fasilitasi advokasi dan KIE program pembangunan KKB kepada mitra kerja	1	1	1	1	
		7 Jumlah media masa (cetak dan elektronik) , media luar ruang, dan seni dan budaya/media tradisional yang menginformasikan pembangunan kependudukan dan KB kepada keluarga dan masyarakat.	139 Pengembangan KIE program pembangunan kependudukan dan KB melalui media massa (elektronik dan cetak), media luar ruang dan media tradisional (seni dan budaya)					
			139,1 Media Elektronik					
			139.1.1 Televisi nasional					
			139.1.1.1 Talkshow	160	120	120	80	
			139.1.1.2 PSA di Televisi	4.000	8.000	8.000	6.000	
			139.1.1.3 Advertorial	100	100	100	100	
			139.1.1.4 Variety Show	26	26	26	26	
			139.1.1.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Media Elektronik	1	1	1	1	
			139.1.2 Radio Nasional					
			139.1.2.1 Talkshow	160	120	120	80	
			139.1.2.2 PSA	4.000	8.000	8.000	6.000	
			139.1.2.3 Advertorial	100	100	100	100	
			139.1.2.4 Adlips	52	52	52	52	
			139.1.2.5 Sandiwara	26	26	26	26	
			139.1.2.6 Jingle	3.500	7.000	7.000	3.500	
			139.1.2.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Media Elektronik	1	1	1	1	
			139.1.3 Website	6	6	6	6	
			139.1.4 Provider telepon seluler	2	2	2	2	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			139,2 Media Masa cetak					
			139.2.1 Surat Kabar					
			139.2.1.1 Advertorial	52	52	52	52	
			139.2.1.2 Iklan Layanan Masyarakat	52	52	52	52	
			139.2.1.3 PSA	52	52	52	52	
			139.2.1.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Media Masa cetak	1	1	1	1	
			139.2.2 Majalah/ tabloid					
			139.2.2.1 Jurnal Kependudukan	12	12	12	12	
			139.2.2.2 PSA	6	12	12	12	
			139.2.2.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Majalah/ tabloid	1	1	1	1	
			139.3 Media Luar Ruang					
			139.3.1 Billboard	8	8	8	8	
			139.3.2 Umbul-umbul	1.900	1.900	1.900	1.900	
			139.3.3 Spanduk	150	150	150	150	
			139.3.4 Roll Banner	500	500	500	500	
			139.3.5 Transit Media	1	1	1	1	
			139.3.6 Neon Box/sign	1	1	1	1	
			139.3.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Media Luar Ruang	1	1	1	1	
			139.4 Pameran	12	12	12	12	
			139.5 Seni Budaya/media tradisional	2	2	2	2	
			139.6 Media Lini Bawah					
			139.6.1 Leaflet	8.000	8.000	8.000	8.000	
			139.6.2 Factsheet	8.000	8.000	8.000	8.000	
			139.6.3 Folder	8.000	8.000	8.000	8.000	
			139.6.4 Poster	10.000	10.000	10.000	10.000	
			139.6.5 Booklet	8.000	8.000	8.000	8.000	
			139.6.6 Sticker	7.500	7.500	7.500	7.500	
			139.6.7 Media Merchandise	12	12	12	12	
			140 Pendayagunaan MUPEN KB	34	34	34	34	
	8a	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan Advokasi dan KIE dalam program kependudukan dan KB ke provinsi	141 Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB					
			141.1 Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan KIE program kependudukan Pembangunan Kependudukan dan KB	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			141.2 Monitoring, evaluasi dan pembinaan program Advokasi dan KIE Pembangunan Kependudukan dan KB tingkat Pusat . Provinsi dan Kab/Kota	34	34	34	34	
			141.3 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat Advokasi dan KIE (LAKIP, SPIP dll)	2	2	2	2	
			141.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB	1	1	1	1	
		8b Jumlah provinsi yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi Pembinaan advokasi dan KIE	142 Peningkatan kualitas sistem fasilitasi dan pembinaan advokasi. dan KIE program program pembangunan kependudukan dan KB					
			142.1 Koordinasi Keterpaduan Advokasi dan KIE	34	34	34	34	
			142.2 Konsolidasi keterpaduan advokasi dan KIE	34	34	34	34	
			142.3 Sosialisasi PKKB kepada Pemerintah. Pemprov dan pemkab/kota	34	34	34	34	
			142.4 Sosialisasi Pembangunan Kependudukan dan KB kepada mitra kerja	34	34	34	34	
			142.5 Desiminasi Pembangunan Kependudukan dan KB kepada mitra kerja	34	34	34	34	
			142.6 Seminar Pembangunan Kependudukan dan KB	34	34	34	34	
			142.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas sistem fasilitasi dan pembinaan advokasi. dan KIE program program pembangunan kependudukan dan KB	1	1	1	1	
			143 Fasilitasi advokasi dan KIE program pembangunan KKB kepada mitra kerja					
			143.1 Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan KIE program kependudukan Pembangunan Kependudukan dan KB	1	1	1	1	
			143.2 Monitoring, evaluasi dan pembinaan program Advokasi dan KIE Pembangunan Kependudukan dan KB tingkat Pusat . Provinsi dan Kab/Kota	34	34	34	34	
			143.3 Penyusunan hasil laporan program Advokasi dan KIE Pembangunan Kependudukan dan KB	34	34	34	34	
			143.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Fasilitasi advokasi dan KIE program pembangunan KKB kepada mitra kerja	1	1	1	1	
14	Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah		3315 Peningkatan Kemitraan dengan Lintas Sektor Pemerintah dan Swasta serta Pemerintah Daerah					Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga
		1 Jumlah Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar lembaga	151 Pengembangan Kebijakan. strategi dan materi kerjasama antar lembaga yang dapat dioperasionalkan					
		1a Jumlah Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar lembaga yang dapat dilaksanakan oleh stakeholder (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM)	151.1 Penyusunan Kebijakan. strategi dan materi kerjasama antar lembaga (Pedoman. Juklak dan Juknis)	4	4	4	4	
			151.2 Sosialisasi dan diseminasi	34	34	34	34	
			151.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan. strategi dan materi kerjasama antar lembaga yang dapat dioperasionalkan	1	1	1	1	
		1b Jumlah Peta Kerja kemitraan antar lembaga terkini yang disusun dan dimanfaatkan oleh stakeholder	152 Pengembangan peta kerja kemitraan antar lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk stakeholders					
			152.1 Identifikasi stakeholder dan sektor swasta	1	1	1	1	
			152.2 Profil kemitraan dengan stake holder dan sektor swasta	1	1	1	1	
			152.3 Pemprov dan pemkab/pemkota online	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			152.4 Data basis stake holder (renperda, keuangan dan aturan pengukuhan) dan sektor swasta	1	1	1	1	
			152.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan peta kerja kemitraan antar lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk stakeholders	1	1	1	1	
	2	Jumlah fasilitasi penggerakan operasional program KKB	153 Peningkatan fasilitasi penggerakan operasional program KKB ke Provinsi					
	2a	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD (435 Kab/kota)	153.1 Penyusunan MOU	1	1	1	1	
			153.2 Pelaksanaan MOU	34	34	34	34	
			153.3 Evaluasi dan tindak lanjut MOU	1	1	1	1	
			153.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan fasilitasi penggerakan operasional program KKB ke Provinsi	1	1	1	1	
	3	Jumlah kerjasama antara BKKBN dengan Lintas Sektor	154 Pengembangan MOU kerjasama antara BKKBN dengan Lintas Sektor					
	3a	Jumlah MOU makro antara BKKBN dengan Lintas Sektor yang dapat dioperasionalkan	154.1 Mengembangkan forum kemitraan	34	34	34	34	
			154.2 Pengembangan forum hubungan lintas sektor.pemprov dan sektor swasta	34	34	34	34	
	3b	Persentase stakeholder yang aktif dalam jejaring kemitraan program KKB	154.3 Pemantapan jejaring lintas sektor. pemprov dan sektor swasta	34	34	34	34	
			154.4 Bakti Sosial Kemitraan dengan lintas sektor.pemprov dan sektor swasta	34	34	34	34	
	3c	Persentase stakeholder yang mendapatkan penghargaan program KKB	154.5 Pentaloka jejaring lintas sektor . pemprov dan sektor swasta	34	34	34	34	
			154.6 Rapat Dengar Pendapat dan Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI secara berkala	1	1	1	1	
			154.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan MOU kerjasama antara BKKBN dengan Lintas Sektor	1	1	1	1	
	4	Jumlah Monitoring , Evaluasi, dan Pembinaan Hubungan Antar lembaga (Pusat dan Provinsi)	155 Peningkatan fasilitasi penggerakan operasional Program KKB ke provinsi					
	4a	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi penggerakan operasional program KKB	155.1 Pendampingan pusat terhadap provinsi dalam penggerakan operasional Program KKB kepada Pemprov	33	33	33	33	
			155.2 Rakor regional. kemitraan dengan lintas sektor dan pemprov (5 wilayah regional)	33	33	33	33	
			155.3 Uji coba rencana strategi kemitraan dengan lintas sektor dan pemprov	33	33	33	33	
	4b	Persentase stakeholders yang mendapatkan fasilitasi penggerakan operasional program KKB	155.4 Road map jejaring kemitraan. lintas sektor dan pemprov	33	33	33	33	
			155.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan fasilitasi penggerakan operasional Program KKB ke provinsi	1	1	1	1	
	4c	Persentase kab/kota yang melaksanakan NSPK						
	4d	Persentase permasalahan program pembinaan lintas sektor, mitra kerja dan pemda yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti	156 Dukungan penggerakan operasional program KKB					
			156.1 Sosialisasi Pembentukan BKKBD	-	33	33	33	
			156.2 Penggerakan operasional program KKB melalui Harganas	34	34	34	34	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		4e Jumlah Laporan eksekutif perkembangan Program KKB kepada Pimpinan Lembaga Negara yang berkala dan tepat waktu	157 Pengembangan akuntabilitas program KKB					
			157.1 Laporan bulanan tentang program KKB	1	1	1	1	
			157.2 Laporan triwulanan tentang program KKB	1	1	1	1	
			157.3 Laporan semesteran tentang program KKB	1	1	1	1	
			157.4 Laporan tahunan tentang program KKB	1	1	1	1	
			157.5 Laporan eksekutif kepada pimpinan lembaga negara yang berkala dan tepat waktu	1	1	1	1	
			157.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan akuntabilitas program KKB	1	1	1	1	
			158 Pengembangan sistem pembinaan dan penghargaan kepada stakeholders					
			158.1 Seleksi Provinsi, Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan program KKB (468 prov. kab/kota)	1	1	1	1	
			158.2 Seleksi pimpinan lembaga negara yang mendapatkan penghargaan (90 lembaga negara)	1	1	1	1	
			158.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan sistem pembinaan dan penghargaan kepada stakeholders	1	1	1	1	
			159 Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB					
			159.1 Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan dengan lintas sektor . pemerintah daerah dan sektor swasta	1	1	1	1	
			159.2 Monitoring dan evaluasi pembinaan kemitraan dengan lintas sektor . pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kab/Kota dan sektor swasta	33	33	33	33	
			159.3 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat bina hubungan antar lembaga (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
			159.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB	1	1	1	1	
15	Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan		3318 Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan					Direktorat Bina Lini Lapangan
		1 Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja bina lini lapangan	181 Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan (pedoman, juklak, juknis, 10 langkah PLKB, dll)					
			181.1 Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Materi (Pedoman, Juklak dan Juknis)	3	3	3	3	
		1a Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja bina lini lapangan (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM)	181.2 Sosialisasi dan diseminasi	34	34	34	34	
			181.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pembinaan Lini Lapangan (pedoman, juklak, juknis, 10 langkah PLKB, dll)	1	1	1	1	
		1b Jumlah Peta kerja pembinaan lini lapangan yang akurat dan terkini	182 Peta kerja pembinaan lini lapangan					
			182.1 Identifikasi PLKB/PKB dan IMP	1	2	2	2	
			182.2 Profil PLKB/PKB dan IMP	1	2	2	2	
			182.3 PKB/PLKB, IMP Online	1	2	2	2	
			182.4 Data basis PKB/PLKB, IMP	1	2	2	2	
			182.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Peta kerja pembinaan lini lapangan	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		2	Jumlah kemitraan dalam pembinaan lini lapangan (<i>Pusat memberikan Pembinaan/Fasilitasi</i>):	183	Pengembangan Kontrak kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembinaan Lini Lapangan					
		2a	Jumlah kontrak kerja dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan lini lapangan yang dapat dioperasionalkan		183.1 Identifikasi mitra kerja 183.2 Pelaksanaan Kontrak kerja 183.3 Evaluasi dan tindak lanjut kontrak kerja 183.4 Fasilitasi penggerakan operasinal program KKB	5 5 5 10	5 5 5 10	5 5 5 10	5 5 5 10	
		2b	Persentase mitra kerja yang aktif dalam jejaring pembinaan Lini lapangan							
		2c	Persentase Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Bina Lini Lapangan							
		2d	Persentase kab/kota yang mempunyai PLKB dan PKB sesuai ratio							
		3	Jumlah Tenaga yang kompeten dan terampil dalam bina Lini lapangan	184	Peningkatan capacity building Tenaga penyuluh KB dan tenaga Motivator (<i>Pusat memberikan Pembinaan/Fasilitasi</i>)					
		3a	Jumlah tenaga PKB/PLKB yang kompetensinya meningkat ttg program KKB		184.1 Capacity building tenaga PKB/PLKB (LDU, refreshing dan pelatihan teknis) 184.2 Pelatihan Pelatih Tenaga Motivator dan KIE ttg program KKB	7143 10.500	7542 12.600	4857 15.750	2650 21.000	
		3b	Jumlah Tenaga Motivator dan KIE yang keterampilannya meningkat ttg program KKB		184.3 Pelatihan Pelatih IMP ttg program KKB 184.4 IPeKB Pusat dan Provinsi yang aktif (1 Pusat + 33 Prov)	33 27	50 29	59 31	66 34	
		3c	Jumlah IMP yang keterampilannya meningkat ttg program KKB		184.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan capacity building Tenaga penyuluh KB dan tenaga Motivator (<i>Pusat memberikan Pembinaan/Fasilitasi</i>)	1	1	1	1	
		4	Persentase PLKB yang mendapatkan PLKB-Kit	185	Peningkatan ketersediaan PLKB Kit yang sesuai standar PLKB Kit					
					185.1 Pengadaan PLKB Kit 185.2 Rencana Distribusi PLKB Kit 185.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan ketersediaan PLKB Kit yang sesuai standar PLKB Kit	380 380 1	270 270 1	190 190 1	160 160 1	
		5	Jumlah pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan pembinaan Program pembinaan lini lapangan	186	Pengembangan Jejaring kemitraan pembinaan Lini Lapangan					
		5a	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Bina Lini Lapangan		186.1 Mengembangkan forum kemitraan 186.2 Rakomas 186.3 Temu Kader. IMP dan PLKB dan Tenaga Motivator	6 5 1	6 5 1	6 5 1	6 5 1	
		5b	Jumlah IPeKB yang operasional (Provinsi)		186.4 Bakti Sosial Kemitraan dengan LSOM	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		5c Persentase permasalahan Program pembinaan lini lapangan yang teridentifikasi	186.5 Jambore Nasional PLKB dan IMP	1	1	1	1	
			186.6 Kesatuan gerak lini lapangan	33	33	33	33	
			186.7 Road show	33	33	33	33	
			186.8 KB Lestari	1	1	1	1	
			186.9 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Jejaring kemitraan pembinaan Lini Lapangan	1	1	1	1	
			187 Pembinaan Peningkatan kualitas Program Bina Lini Lapangan					
			187.1 Konsultasi Perencanaan Program dan Anggaran	2	2	2	2	
			187.2 Konsultasi Bidang	1	1	1	1	
			187.3 Konsultasi Kasi	1	1	1	1	
			187.4 Pembinaan lini lapangan	33	33	33	33	
			187.5 Kegiatan Pentaloka	1	1	1	1	
			187.6 Forum Jejaring Kemitraan	1	1	1	1	
			187.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Pembinaan Peningkatan kualitas Program Bina Lini Lapangan	1	1	1	1	
			188 Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi Program pembinaan lini lapangan yang terpadu					
			188.1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan Program pembinaan lini lapangan	33	33	33	33	
			188.2 Identifikasi Permasalahan	1	1	1	1	
			188.3 Tindak lanjut dan solusi permasalahan	1	1	1	1	
			188.4 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat bina lini lapangan (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
			188.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi Program pembinaan lini lapangan yang terpadu	1	1	1	1	
16	Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB		3314. Penyediaan Data dan Informasi program Kependudukan dan KB yang Akurat dan Terpercaya					Direktorat Pelaporan dan Statistik
		1 Jumlah Kebijakan, Strategi dan sistem program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI yang disusun dan didistribusikan	141 Pengembangan Kebijakan, strategi dan sistem program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI					
			141.1 Penyusunan Kebijakan Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB	1	1	1	1	
			141.2 Pengembangan Model Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB Berbasis TI	1	1	1	1	
			141.3 Sosialisasi Kebijakan					
			141.3.1 Sosialisasi Kebijakan Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB	1	1	1	1	
			141.3.2 Sosialisasi Pengembangan Model	1	1	1	1	
			141.4 Pengkajian Hasil Pelaksanaan Kebijakan Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB	1	1	1	1	
			141.5 Penyusunan Kebijakan monitoring dan evaluasi sistem Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			141.6 Pengembangan monitoring dan evaluasi sistem Pengumpulan. Pengolahan. analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB Berbasis TI	1	1	1	1	
			141.7 Sosialisasi Kebijakan					
			141.7.1 Sosialisasi Kebijakan monitoring dan evaluasi sistem Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB	1	1	1	1	
			141.7.2 Sosialisasi Hasil monitoring dan evaluasi sistem Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB	1	1	1	1	
			141.8 Pengkajian Hasil Pelaksanaan Kebijakan monitoring dan evaluasi sistem Pengumpulan. Pengolahan. analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Program KKB	4	4	4	4	
			141.9 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan. strategi dan sistem program pengumpulan. pengolahan. analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI	1	1	1	1	
	2	Jumlah data dan informasi (Pusat dan daerah):	142 Peningkatan ketersediaan data dan informasi program KKB					
		2a Jumlah data program KKB yang tersedia akurat dan terpercaya (2 pengendalian Lapangan , 2 pelayanan Kontrasepsi, Pendataan keluarga)	142.1 Pengkajian Hasil Pengumpulan Data dan Informasi	5	5	5	5	
			142.2 Pengkajian Hasil Pengolahan Data dan Informasi	5	5	5	5	
			142.3 Pengkajian Hasil analisis dan Evaluasi Data dan Informasi	5	5	5	5	
		2b Jumlah Instrumen pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB yang tersedia sesuai dengan kebutuhan standar SIM	142.4 Pengembangan Formulir Instrumen Sistem Pengumpulan dan Pengolahan	53	53	53	53	
			142.5 Pencetakan Kartu. Register. Catatan dan Formulir Program KKB (Pendatan Keluarga, Pelkon dan Dallap)	53	53	53	53	
			142.5 Penyusunan Laporan dan Tabulasi Data Statistik Program KKB	8	5	5	5	
			142.6 Penggandaan dan Pengiriman Laporan Umpan Balik Program KKB	8	5	5	5	
		2c Jumlah Umpan balik program KKB yang disusun dan didistribusikan secara berkala dan tepat waktu	142.7 Penyimpanan Laporan Umpan Balik Program KKB Berbasis TI	1	1	1	1	
			142.8 Evaluasi Pemanfaatan Umpan Balik	1	1	1	1	
		2d Persentase Umpan balik program KKB yang dimanfaatkan oleh stakeholder di tingkat Pusat dan Provinsi	142.9 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan ketersediaan data dan informasi program KKB	1	1	1	1	
	3	Jumlah hasil analisa dan evaluasi program KKB disusun secara berkala dan tepat waktu	143 Pengembangan analisis dan evaluasi program KKB disusun secara berkala dan tepat waktu					
			143.1 Penyusunan Analisis dan Evaluasi bidang KB dan KS Tahunan	1	1	1	1	
			143.2 Penyusunan Analisis dan Evaluasi bidang KB dan KS Semesteran	2	2	2	2	
			143.3 Penyusunan Analisis dan Evaluasi bidang KB dan KS Triwulanan	4	4	4	4	
			143.4 Penyusunan Analisis dan Evaluasi bidang KB dan KS Bulanan	12	12	12	12	
			143.5 Penyusunan Analisis dan Evaluasi bidang Pengendalian Penduduk Tahunan	1	1	1	1	
			143.6 Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk Semesteran	2	2	2	2	
			143.7 Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk Triwulanan	4	4	4	4	
			143.8 Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk Bulanan	12	12	12	12	
			143.9 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan analisis dan evaluasi program KKB disusun secara berkala dan tepat waktu	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		4	Kemitraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program KKB	144	Pengembangan kemitraan dengan stakeholders dan mitra kerja dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi program KKB					
		4a	Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi serta memanfaatkan data dan informasi KKB	144.1	Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Program KKB	2	2	2	2	
				144.2	Koordinasi Lintas Sektor dan Mitra Kerja	2	2	2	2	
				144.3	Pertemuan Forum Komunikasi dan Kemitraan	2	2	2	2	
				144.4	Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitraan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi program KKB	2	2	2	2	
				144.5	Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan kemitraan dengan stakeholders dan mitra kerja dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi program KKB	1	1	1	1	
		5a	Jumlah tenaga dalam pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB yang dilatih (kab/kota)	145	Peningkatan kompetensi tenaga pengelola dalam pengumpulan, pengolahan, analisis data dan evaluasi informasi program KKB					
				145.1	Pengembangan Materi Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan evaluasi informasi program KKB	1	1	1	1	
		5b	Persentase tenaga pengumpulan, pengolahan, analisis evaluasi data dan informasi program KKB yang meningkat kompetensinya	145.2	Pelatihan pengumpulan, pengolahan analisis data dan evaluasi informasi program KKB di Provinsi	495	495	495	495	
				145.3	Evaluasi Kompetensi tenaga pengelola yang telah dilatih dalam Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan evaluasi informasi program KKB	1	1	1	1	
		6	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB (Pusat dan provinsi)	146.	Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB					
		6a	Jumlah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan dalam program pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB	146.1	Monitoring dan evaluasi pembinaan pencatatan dan pelaporan	33	33	33	33	
				146.2	Temu Kerja bagi pengelola pencatatan dan pelaporan	33	33	33	33	
				146.3	Seminar hasil pendataan keluarga	33	33	33	33	
				146.4	Pengamatan Kebenaran Data	33	33	33	33	
		6b	Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan dalam program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB	146.5	Monitoring dan Evaluasi Pemuktahiran Data	33	33	33	33	
				146.6	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat pelaporan dan statistik (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
				146.7	Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB	33	33	33	33	
		6c	Persentase permasalahan program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB yang dapat ditindaklanjuti							

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
17	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB	1	Jumlah Kebijakan dan Strategi STIK dan materi penyebarluasan data dan informasi yang dapat dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan customer program KKB berbasis TI yang disusun	3330	Penyediaan Teknologi, Informasi, dan Dokumentasi Program Kependudukan dan KB					Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi
301				Mengembangkan Kebijakan, strategi dan materi penyebarluasan data dan informasi Program Pembangunan KKB (SIDUGA)						
301.1				Penyusunan Kebijakan, Strategi, Materi STIK KKB.	1	1	-	-		
301.2				Penyusunan Petunjuk Praktis Pengelolaan Infrastruktur TIK	-	1	1	1		
301.3				Penyusunan Standarisasi Hardware, Software, Operational TIK	-	1	1	1		
301.4				Penyusunan Pedoman SIDUGA	1	1	-	-		
301.5				Penyusunan Petunjuk Teknis Penyebarluasan Informasi	-	1	-	-		
301.6				Penyusunan petunjuk teknis pendokumentasian informasi	-	1	-	-		
301.7				Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan web portal bkkbn.go.id	1	-	-	-		
301.8				Penyusunan petunjuk teknis otomasi perpustakaan	1	-	-	-		
301.9				Penyusunan Petunjuk Teknis E-book	-	1	-	-		
301.10	Penyusunan Blue Print STIK	-	1	-	-					
301.11	Pencetakan Petunjuk Praktis / Pedoman	8	6	6	4					
	2	2a	Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mempunyai kebijakan dalam mendukung layanan SIDUGA	302	Inventarisasi kebutuhan dan pengembangan metoda jejaring STIK, penyebarluasan informasi dan Dokumentasi					
302.1				Sosialisasi Pengembangan ICT dalam Menunjang Perkembangan Program	1	1	1	1		
302.2				Orientasi Teknis Pengelola TIK Provinsi	34	34	34	34		
302.3				Orientasi Teknis Pengelola TIK Kab/Kota	34	34	34	34		
302.4				Pengembangan Jaringan	34	34	34	34		
302.5				Penjajagan Lapangan Identifikasi dan Evaluasi Permasalahan dalam rangka Pemanfaatan Jaringan	34	34	34	34		
302.6				Trouble Shooting di level User dan Operation Center	34	34	34	34		
302.7				Tim Pengelola Situs Portal BKKBN	34	34	34	34		
302.8				Tim Pengelola Situs Perpustakaan	34	34	34	34		
	3	2b	Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Situs/ Portal BKKBN	302.9	Umpan Balik Pengelolaan Situs BKKBN Provinsi	34	34	34	34	
303				Inventarisasi kebutuhan dan pengembangan design penyajian data program KKB Nasional sesuai dengan kebutuhan						
303.1				Kelompok Kerja Redesign SIDUGA	1	1	1	1		
303.2				Kompilasi data Program KKB Nasional	1	1	1	1		
304				Inventarisasi kebutuhan dan pengembangan metoda pelatihan (capacity Building) STIK, penyebarluasan informasi dan Dokumentasi						
304.1				Kursus	36	36	36	36		
304.2				Sarasehan dengan Pengelola BSC Komponen	60	60	60	60		
304.3				Orientasi teknis pengelolaan perpustakaan bagi pustakawan dan calon pustakawan pusat dan provinsi seluruh Indonesia	50	60	60	60		
304.4				Penilaian pejabat fungsional pustakawan	19	20	20	20		

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		5 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung STIK	305 Inventarisasi Kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung STIK, Penyebarluasan informasi dan dokumentasi					
			305.1 Penyiapan Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja Pengolahan Data	1	1	1	1	
			305.2 Rehabilitasi Lab dan Ruang Perpustakaan	-	1	-	-	
			305.3 Administrasi Pengadaan	1	1	1	1	
		6 Jumlah System Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemakai (unit)	306 Inventarisasi kebutuhan dan pengembangan sistem aplikasi STIK, penyebarluasan informasi dan Dokumentasi					
			306.1 Pembuatan/Pengembangan Aplikasi STIK KKB	8	6	6	4	
			306.2 Koordinasi Pengembangan Aplikasi berbasis WEB	1	1	1	1	
			306.3 Perawatan/Pemeliharaan Program Aplikasi KKB	6	6	6	6	
			306.4 Pemeliharaan Jaringan	34	34	34	34	
			306.5 Pemeliharaan Sistem	34	34	34	34	
			306.6 Pemeliharaan / Perawatan Sarana Software & Hardware Pengolah Data	1	1	1	1	
			306.7 Pemeliharaan Ruang Data Center	1	1	1	1	
		7 Jumlah dokumentasi dan publikasi :	307 Inventarisasi kebutuhan dan pengembangan design dokumentasi pengendalian penduduk dan KB serta bahan publikasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan					
			307.1.1 Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka	1	1	1	1	
			307.1.2 Pengolahan Bahan Pustaka	1	1	1	1	
			307.1.3 Penyusunan Bibliografi	1	1	1	1	
			307.1.4 Penyusunan Tesaurus	-	1	-	-	
			307.1.5 Penyusunan Indeks Artikel	-	1	-	-	
			307.1.6 Penyusunan Kamus Istilah	1	-	-	-	
			307.1.7 Penyusunan Profil PKKB	1	1	1	1	
			307.1.8 Stockopname Perpustakaan	1	1	1	1	
			307.1.9 Pelayanan Koleksi Perpustakaan	1	1	1	1	
			307.1.10 Pengembangan Kerjasama Jaringan Perpustakaan	1	1	1	1	
			307.1.11 Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik	-	1	1	1	
		7b Jumlah Publikasi pembangunan kependudukan dan KB (Pusat dan Provinsi)	307.2.1 Penyusunan Buletin Informasi PKKB	1	1	1	1	
			307.2.2 Penyusunan Buletin Informasi PKKB Edisi Eksekutif	1	1	1	1	
			307.2.3 Penyusunan Buletin Info Demografi	1	1	1	1	
			307.2.4 Penyusunan Buletin Cukilan Data	1	1	1	1	
			307.2.5 Penyusunan Technical Report Series Monograph	1	1	1	1	
			307.2.6 Penyusunan Leaflet	1	1	1	1	
			307.2.7 Penyusunan Data Sheet	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			307.2.8 Pengiriman Bahan Informasi	1	1	1	1	
			307.2.9 Forum Pertemuan Anggota JID-Perpustakaan	3	3	3	3	
			307.2.10 Forum Pertemuan Referat PKKB	3	3	3	3	
			307.2.11 Lomba Pengelolaan Situs BKKBN Provinsi	1	1	1	1	
			307.2.12 Lomba Design Web BKKBN	-	1	-	-	
		8	Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan teknologi informasi program STIK, penyebarluasan dan dokumentasi program KKB					
			308 Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serta mengembangkan pembinaan peningkatan kualitas program SIDUGA berbasis TIK					
			308.1.1 Bimbingan dan Monitoring Evaluasi Pengolah Data	34	34	34	34	
			308.1.2 Pendokumentasian dan Bank Data	1	1	1	1	
			308.1.3 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Komponen	12	12	12	12	
			308.1.4 Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Pengolah data	1	-	-	-	
			308.1.5 Evaluasi Mutasi Data Keluarga (MDK)	1	1	1	1	
			308.1.6 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat teknologi informasi dan dokumentasi (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
			308.1.7 Administrasi Keproyekan	1	1	1	1	
		8a	Jumlah Pembinaan Program STIK, penyebarluasan informasi dan dokumentasi					
			308.2.1 Bimbingan Teknis/Bimbingan Terpadu	33	33	33	33	
			308.2.2 Pembinaan Wilayah	14	14	14	14	
			308.2.3 Pembinaan Program	33	33	33	33	
			308.2.4 Dukungan Kegiatan Nasional	5	5	5	5	
			308.2.5 Pertemuan Regional SIM	2	2	2	2	
			308.2.6 Penyiapan Dukungan RADALGRAM	12	12	12	12	
			308.2.7 Peningkatan Operational Sistem Informasi dan Komunikasi Program	12	12	12	12	
18	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi		3331 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi					BKKBN Provinsi (33 Provinsi)
			3331.1 Rancangan induk pengendalian penduduk di Provinsi					
			311 Penyusunan Rancangan induk pengendalian penduduk di Provinsi					
		1	Jumlah Rancangan induk pengendalian penduduk di Provinsi					
			311.1 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk tingkat provinsi dan kabupaten dan kota					
			311.1.1 Inventarisasi kebijakan sektor pembangunan yang berwawasan kependudukan	33	33	33	33	
			311.1.2 Penyusunan rancangan induk pengendalian penduduk dan pembangunan sektor berwawasan kependudukan	33	33	33	33	
			311.1.3 Sosialisasi dan diseminasi tingkat provinsi	33	33	33	33	
			311.1.4 Sosialisasi dan diseminasi tingkat kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			311.1.5 Kegiatan lain terkait dengan Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2011	2012	2013	2014		
		1a	Jumlah parameter kependudukan yang disosialisasikan	311.2	Penyusunan Parameter kependudukan dan Sosialisasi				
				311.2.1	Inventarisasi parameter kependudukan tingkat provinsi dan kabupaten dan kota	33	33	33	33
				311.2.2	Penyusunan dan penetapan parameter kependudukan	33	33	33	33
				311.2.3	Penyusunan proyeksi penduduk	33	33	33	33
				311.2.4	Analisis parameter kependudukan	33	33	33	33
				311.2.5	Sosialisasi hasil parameter kependudukan dan proyeksi penduduk	33	33	33	33
				311.2.6	Pembinaan program perencanaan pengendalian penduduk tk kabupaten dan kota	33	33	33	33
				311.2.7	Kegiatan lain terkait dengan Penyusunan Parameter, Proyeksi Penduduk dan Sosialisasi	33	33	33	33
		1b	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi tentang kebijakan dan program pengendalian penduduk	311.3	Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk				
				311.3.1	Inventarisasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tk Provinsi dan kabupaten dan kota	33	33	33	33
				311.3.2	Analisis kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tk Provinsi dan kabupaten dan kota	33	33	33	33
		1c	Jumlah paket sosialisasi tentang penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan kepada stakeholder (provinsi)	311.3.3	Perumusan penyerasian kebijakan pembangunan sektor dengan pembangunan KKB tk Provinsi dan kabupaten dan kota	33	33	33	33
				311.3.4	Advokasi dan Sosialisasi hasil penyerasian kebijakan pembangunan sektor dengan pembangunan KKB tk Provinsi dan kabupaten dan kota	33	33	33	33
				311.3.5	Fasilitasi penyerasian kebijakan Kependudukan ke kabupaten dan kota	33	33	33	33
		1d	Persentase kabupaten dan kota yang mendapatkan fasilitasi dalam melakukan kajian penyerasian kebijakan kependudukan	311.3.6	Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja dalam penyerasian kebijakan kependudukan	33	33	33	33
				311.3.7	Kegiatan lain terkait dengan Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk	33	33	33	33
		1e	Jumlah kajian dampak kependudukan terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan dan keamanan	311.4	Analisa dampak kependudukan				
				311.4.1	Inventarisasi data kependudukan (kuantitas,kualitas, mobilitas dan pertumbuhan penduduk)	33	33	33	33
				311.4.2	Analisis dan kajian dampak kependudukan	33	33	33	33
				311.4.3	Penyusunan analisis dan kajian dampak kependudukan	33	33	33	33
				311.4.4	Advokasi dan Sosialisasi dampak Kependudukan	33	33	33	33
				311.4.5	Fasilitasi Pembinaan analisis dampak kependudukan tingkat kabupaten dan kota	33	33	33	33
				311.4.6	Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja	33	33	33	33
				311.4.7	Kegiatan lain terkait dengan dampak kependudukan terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan dan keamanan	33	33	33	33
		1f	Jumlah modul pendidikan Kependudukan dan KB yang dimanfaatkan oleh mitra kerja (mengelola pendidikan formal, informal, dan non formal)	311.5	Peningkatan Kerjasama pendidikan kependudukan				
				311.5.1	Koordinasi pengintegrasian pendidikan kependudukan ke dalam kurikulum	33	33	33	33
				311.5.2	Pengembangan forum kerjasama	33	33	33	33
				311.5.3	Fasilitasi Pembinaan pendidikan kependudukan tingkat kabupaten dan kota	33	33	33	33
				311.5.4	Sosialisasi dan diseminasi modul pembelajaran kepada mitra kerja	33	33	33	33

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			311.5.5 Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja	33	33	33	33	
			311.5.6 Kegiatan lain terkait dengan Kerjasama pendidikan kependudukan	33	33	33	33	
			3331.2 Pembinaan Kesertaan ber-KB di Provinsi					
			312 Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB di Klinik KB pemerintah dan swasta					
	2	Jumlah pembinaan kesertaan ber-KB di Provinsi	312.1 Sosialisasi kebijakan, strategi operasional dan materi tentang akses dan kualitas Pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah, swasta, Galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus					
			312.1.1 Sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas Pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah	33	33	33	33	
			312.1.2 Sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas Pembinaan kesertaan KB jalur swasta	33	33	33	33	
			312.1.3 Sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas Pembinaan kesertaan KB jalur Galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus	33	33	33	33	
			312.1.4 Kegiatan lain terkait dengan Sosialisasi kebijakan, strategi operasional dan materi tentang akses dan kualitas Pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah, swasta, Galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus	33	33	33	33	
			312.2 Pembinaan tim jaga mutu	33	33	33	33	
			312.3 Operasional penggerakan kesertaan ber KB Pria	33	33	33	33	
			312.4 Operasional peningkatan KB Perusahaan	33	33	33	33	
			312.5 Operasional Baksos dengan Mitra	33	33	33	33	
			312.6 Operasional Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB	33	33	33	33	
			312.7 Operasional Pelayanan Medis tingkat Kecamatan	33	33	33	33	
			312.8 Pelayanan TKBK tingkat provinsi, kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			312.9 Operasional Peningkatan KB Rumah Sakit dan Fasyankes lainnya	33	33	33	33	
			312.10 Kegiatan lain terkait dengan Penggerakan Pelayanan KB di Provinsi	33	33	33	33	
	2a	Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakan pelayanan KB	312.11 Penggerakan Pelayanan KB MKJP					
			312.11.1 MOP	20.000	27.570	28.410	29.540	
			312.11.2 MOW	75.000	58.640	60.710	62.170	
			312.11.3 IUD	500.000	540.000	570.000	600.000	
	2e	Persentase komplikasi berat yang dilayani	312.12 Pelayanan komplikasi berat					
			312.12.1 IUD	1.127	1.144	1.225	1.314	
			312.12.2 MOP	138	140	147	165	
			312.12.3 MOW	607	583	610	653	
			312.12.4 Implant	1.104	1.066	1.153	1.153	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		2f	Persentase kegagalan KB yang dilayani	312.13	Pelayanan Ayoman kegagalan.	2.543	3.400	3.560	3.700	
		2g	Jumlah pencabutan implant yang dilayani (Kasus)	312.14	Pelayanan pencabutan implant	458.038	557.861	556.084	562.605	
		2b	Jumlah sarana prasarana pelayanan KB yang didistribusikan ke Klinik KKB	312.15	Sarana prasarana pelayanan KB yang didistribusikan ke Klinik KKB					
				312.15.1	Penyusunan rencana distribusi	33	33	33	33	
				312.15.2	Operasional pendistribusian perlengkapan klinik KB	33	33	33	33	
				312.15.3	Koordinasi teknis dengan mitra	33	33	33	33	
				312.15.4	Kegiatan lain terkait dengan pendistribusian sarana prasarana pelayanan KB	33	33	33	33	
		2c	Jumlah Frekuensi pelayanan KB mobile di Wilayah khusus di 33 prov (6 kali dalam 1 tahun)	312.16	Pelayanan KB mobile di Wilayah khusus (6 kali dalam 1 tahun)					
				312.16.1	Penyusunan peta kerja pelayanan KB Mobile Wilayah Khusus	33	33	33	33	
				312.16.2	Pelayanan mobile diwilayah Khusus	33	33	33	33	
				312.16.3	Koordinasi pelayanan KB Mobile di wilayah khusus	33	33	33	33	
				312.16.4	Kegiatan lain terkait dengan Pelayanan KB mobile di Wilayah Khusus	33	33	33	33	
		2d	Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di Wilayah Galcitas (12 kali dalam 1 tahun)	312.17	Pelayanan KB mobile di Wilayah Galcitas (12 kali dalam 1 tahun)					
				312.17.1	Penyusunan peta kerja pelayanan KB Mobile Wilayah Galcitas	33	33	33	33	
				312.17.2	Pelayanan mobile diwilayah Galcitas	33	33	33	33	
				312.17.3	Koordinasi pelayanan KB Mobile di wilayah galcitas	33	33	33	33	
				312.17.4	Dukungan kendaraan fungsional pelayanan KB	33	33	33	33	
			312.17.5	Kegiatan lain terkait dengan Pelayanan KB mobile di Wilayah Galcitas	33	33	33	33		
		3	Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP)	312.18	Klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP)					
				312.18.1	Pembinaan petugas penghubung R/R klinik	23.500	23.500	23.500	23.500	
				312.18.2	Penyediaan lembar informed consent	23.500	23.500	23.500	23.500	
				312.18.3	Pertemuan medis teknis	33	33	33	33	
				312.18.4	Surveilans pasca pelayanan (SPP)	33	33	33	33	
				312.18.5	Penguatan jejaring pelayanan KHIBA dan PMKR	33	33	33	33	
				312.18.6	Promosi Program KHIBA dan PMKR di Klinik Pelayanan	33	33	33	33	
				312.18.7	Penggerakan klinik melalui petugas lapangan	22.947	24.094	25.299	26.564	
				312.18.8	Integrasi KIP/K KHIBA dan PMKR dengan Pelayanan KB	33	33	33	33	
				312.18.9	Kegiatan lain terkait dengan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP) di Klinik KB	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			3331.3 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga					
	4	Jumlah pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Provinsi	313 Peningkatan Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga					
			313.1 Sosialisasi dan desiminasi kebijakan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga tk Provinsi dan kabupaten dan kota					
			313.1.1 Sosialisasi dan desiminasi program Ketahanan Keluarga tingkat Provinsi dan kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			313.1.2 Sosialisasi dan desiminasi program Pemberdayaan ekonomi Keluarga tingkat Provinsi dan kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			313.1.3 Kegiatan lain terkait dengan sosialisasi dan desiminasi kebijakan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga tk Provinsi dan kabupaten dan kota	33	33	33	33	
	4a	Jumlah Kelompok BKB percontohan (2 kelompok/Kecamatan)	313.2 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB) Percontohan					
			313.2.1 Sosialisasi panduan pembentukan BKB percontohan	33	33	33	33	
			313.2.2 Pembinaan Kelompok BKB	33	33	33	33	
			313.2.3 Pendampingan kelompok BKB	33	33	33	33	
			313.2.4 Pengembangan materi dan media bagi Kelompok BKB	33	33	33	33	
			313.2.5 Pengembangan kelompok BKB terpadu	33	33	33	33	
			313.2.6 Pembentukan Kelompok Percontohan BKB	2 klpk/kec	2 klpk/kec	2 klpk/kec	2 klpk/kec	
			313.2.7 Kegiatan lain terkait dengan pembentukan dan pembinaan Kelompok BKB Percontohan	33	33	33	33	
	4b	Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih	313.3 Pelatihan bagi tenaga pengelola program pembinaan ketahanan keluarga					
			313.3.1 Inventarisasi sasaran	33	33	33	33	
			313.3.2 Pelaksanaan TOT bagi tenaga pengelola kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			313.3.3 Kegiatan lain terkait dengan peningkatan kompetensi bagi tenaga pengelola program ketahanan keluarga	33	33	33	33	
	4c	Jumlah tenaga pelatih pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih	313.4 Pelatihan bagi tenaga pelatih program pembinaan ketahanan keluarga					
			313.4.1 TOT bagi tenaga pelatih ketahanan keluarga	33	33	33	33	
			313.4.2 TOT bagi mitra kerja ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL)	33	33	33	33	
			313.4.3 TOT bagi mitra kerja PIK R/M	33	33	33	33	
			313.4.4 Kegiatan lain terkait dengan peningkatan kompetensi bagi tenaga pelatih program ketahanan keluarga	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		4d Jumlah Kelompok BKR percontohan (1 kelompok/Kecamatan)	313.5 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Percontohan					
			313.5.1 Sosialisasi panduan pembentukan BKR percontohan	33	33	33	33	
			313.5.2 Pengembangan kemitraan PKBR	33	33	33	33	
			313.5.3 Pembinaan Kelompok BKR	33	33	33	33	
			313.5.4 Pendampingan kelompok BKR	33	33	33	33	
			313.5.5 Pengembangan materi dan media bagi Kelompok BKR	33	33	33	33	
			313.5.6 Pengembangan model pelayanan terpadu	33	33	33	33	
			313.5.7 Pembentukan Kelompok Percontohan BKR	1 klpk/kec	1 klpk/kec	1 klpk/kec	1 klpk/kec	
			313.5.8 Pengembangan COE	33	33	33	33	
			313.5.9 Pembentukan dan pengembangan PIK Remaja/ Mahasiswa					
			313.5.9.1. Tumbuh	9.643	9.632	10.226	10.532	
			313.5.9.2. Tegak	1.630	2.041	2.446	2.854	
			313.5.9.3. Tegar	980	1.222	1.468	1.630	
			313.5.10 Kegiatan lain terkait dengan Pembinaan Kelompok BKR Percontohan	33	33	33	33	
		4e Jumlah Kelompok BKL percontohan (1 kelompok/Kecamatan)	313.6 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia dan Rentan (BKL) Percontohan					
			313.6.1 Sosialisasi Panduan Pembentukan BKL percontohan	33	33	33	33	
			313.6.2 Pembinaan Kelompok BKL	33	33	33	33	
			313.6.3 Pendampingan kelompok BKL	33	33	33	33	
			313.6.4 Pengembangan materi dan media bagi Kelompok BKL	33	33	33	33	
			313.6.5 Pengembangan model pelayanan terpadu	33	33	33	33	
			313.6.6 Pembentukan Kelompok Percontohan BKL	1 klpk/kec	1 klpk/kec	1 klpk/kec	1 klpk/kec	
			313.6.7 Kegiatan lain terkait dengan Pembinaan Kelompok BKL Percontohan	33	33	33	33	
		4f Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber-KB	313.7 Pembinaan PUS anggota Kelompok UPPKS yang ber KB					
			313.7.1 Penyusunan Panduan Kemitraan	33	33	33	33	
			313.7.2 Pembinaan Kelompok UPPKS	33	33	33	33	
			313.7.3 Pendampingan Kelompok UPPKS	33	33	33	33	
			313.7.4 Pengembangan materi dan media bagi Kelompok UPPKS	33	33	33	33	
			313.7.5 Pengembangan model pelayanan terpadu	33	33	33	33	
			313.7.6 Pengembangan jejaring kemitraan usaha	33	33	33	33	
			313.7.7 Kegiatan lain terkait dengan Pembinaan Kelompok UPPKS yang ber KB	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			3331.4 Peningkatan Pembinaan Advokasi dan KIE program kependudukan dan KB di Provinsi					
	5	Jumlah pembinaan Advokasi dan KIE program kependudukan dan KB di Provinsi	314 Peningkatan Pembinaan Advokasi dan KIE program kependudukan dan KB					
			314,1 Sosialisasi kebijakan dan strategi advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB					
			314.1.1 Sosialisasi kebijakan dan strategi advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB kepada SKPD tingkat kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			314.1.2 Sosialisasi kebijakan dan strategi advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB kepada mitra kerja tingkat kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			314.1.3 Fasilitasi kebijakan dan strategi advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB tingkat kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			314.1.4 Kegiatan lain terkait dengan kegiatan sosialisasi kebijakan dan strategi advokasi dan KIE program kependudukan dan KB	33	33	33	33	
	5a	Jumlah Jenis Media yang melaksanakan advokasi dan KIE KKB	314.2 Penayangan informasi KKB melalui berbagai media (cetak dan elektronik) . media luar ruang, dan seni dan budaya/media tradisional					
			314.2.1 Media Elektronik	33	33	33	33	
			314.2.2 Media Masa Cetak	33	33	33	33	
			314.2.3 Media Luar Ruang	33	33	33	33	
			314.2.4 Pameran	33	33	33	33	
			314.2.5 Seni Budaya / Media Tradisional	33	33	33	33	
			314.2.6 Kegiatan lain terkait dengan penyebaran informasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	33	33	33	33	
	5b	Persentase klinik KB yang mendapatkan materi KIE pembangunan KKB	314.3 Pengembangan Materi KIE Program Pembangunan Kependudukan dan KB (paket) bagi Klinik KB					
			314.3.1 Penyediaan materi KIE KB di Klinik KB	33	33	33	33	
			314.3.2 Pengembangan isi pesan KIE	33	33	33	33	
			314.3.3 Penyusunan buku sukses program KB	33	33	33	33	
			314.3.4 Penyusunan bahan publikasi lainnya (buletin, buku saku dsb)	33	33	33	33	
			314.3.5 Kegiatan lain terkait dengan pengembangan materi KIE Program Pembangunan Kependudukan dan KB bagi Klinik KB	33	33	33	33	
	5c	Persentase kabupaten dan kota yang mendayagunakan materi KIE melalui MUPEN	314.4 Pelaksanaan KIE PKKB melalui MUPEN					
			314.4.1 Penyusunan juklak operasional MUPEN	33	33	33	33	
			314.4.2 Operasional KIE melalui MUPEN	33	33	33	33	
			314.4.3 Kegiatan lain terkait dengan peningkatan kualitas Pelaksanaan KIE PKKB melalui MUPEN	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		5d	Persentase stakeholders kabupaten dan kota mereproduksi prototype bahan dan media advokasi dan KIE KKB	314.5	Reproduksi berbagai materi KIE					
				314.5.1	Penyediaan KIE kit	33	33	33	33	
				314.5.2	Penyediaan materi KIE di klinik KB	33	33	33	33	
				314.5.3	Penyediaan materi KIE bagi kabupaten dan kota	33	33	33	33	
				314.5.4	Stakeholders kabupaten dan kota mereproduksi prototype bahan dan media advokasi dan KIE KKB	33	33	33	33	
				314.5.5	Kegiatan lain terkait dengan peningkatan Reproduksi berbagai materi KIE	33	33	33	33	
				3331.5	Peningkatan Kerjasama dengan mitra kerja program kependudukan dan KB di Provinsi					
	6	Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan pendampingan dalam Pembangunan KKB di Provinsi		315	Pengembangan Jejaring kemitraan dalam Pembangunan KKB di Provinsi					
				315.1	Pengembangan kemitraan Advokasi dan KIE KKB					
				315.1.1	Pembentukan Jejaring Advokasi KKB	33	33	33	33	
				315.1.2	Pemantapan Advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja	33	33	33	33	
	6e	Persentase mitra kerja (provinsi, kabupaten dan kota) yang melaksanakan advokasi dan KIE KKB		315.1.3	Pemberdayaan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi dan KIE	33	33	33	33	
				315.1.4	Kegiatan lain terkait dengan pengembangan kemitraan Advokasi dan KIE KKB	33	33	33	33	
	6f	Jumlah mitra kerja yang aktif dalam jejaring advokasi dan KIE								
	6g	Persentase kabupaten dan kota yang mempunyai kebijakan KKB dalam rencana pembangunan daerah		315.2	Advokasi kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dan KB					
				315.2.1	Advokasi tentang pembangunan kependudukan dan KB bagi stakeholders	33	33	33	33	
				315.2.2	Advokasi tentang pembangunan kependudukan dan KB bagi mitra kerja	33	33	33	33	
				315.2.3	Promosi Program KKB melalui berbagai forum lintas agama	33	33	33	33	
	6h	Persentase kabupaten dan kota yang mempunyai kebijakan PERDA pembangunan KKB		315.2.4	Promosi Program KKB melalui Pameran	33	33	33	33	
				315.2.5	Seminar Peran DPRD dalam program Kependudukan dan KB	33	33	33	33	
				315.2.6	Seminar Peran serta Toga/Toma /LSM dalam program Kependudukan dan KB	33	33	33	33	
				315.2.7	Advotaria program Kependudukan dan KB	33	33	33	33	
	6i	Jumlah kabupaten dan kota yang telah membentuk BKKBD		315.2.8	Kegiatan lain terkait dengan Advokasi kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dan KB	33	33	33	33	
	7	Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapatkan dukungan operasional		315.3	Peningkatan Operasional di Lini Lapangan	501.593	501.593	501.593	501.593	
	7a	PPLKB		315.3.1	Dukungan Operasional PPLKB	4.671	4.671	4.671	4.671	
	7b	PKB/PLKB		315.3.2	Dukungan Operasional PLKB/PKB	19.886	19.886	19.886	19.886	
	7c	PPKBD		315.3.3	Dukungan Operasional PPKBD	85.562	85.562	85.562	85.562	
	7d	Sub PPKBD		315.3.4	Dukungan Operasional Sub PPKBD	391.474	391.474	391.474	391.474	
				315.3.5	Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan Operasional di Lini Lapangan	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		8 Jumlah Penyelenggaraan mekanisme operasional program KKB (Rakor di tingkat kecamatan, desa, mini lokakarya, staf meeting, , serta pertemuan koordinasi IMP dengan kader)	315.4 Peningkatan kualitas mekanisme operasional di Lini Lapangan					
			315.4.1 Rakor KB tingkat Kecamatan	33	33	33	33	
			315.4.2 Rakor KB tingkat Desa	33	33	33	33	
			315.4.3 Mini Lokakarya	33	33	33	33	
		8a Persentase kabupaten dan kota yang melaksanakan Mekanisme operasional lini lapangan	315.4.4 Staf meeting	33	33	33	33	
			315.4.5 Pertemuan Koordinasi IMP dengan Kader	33	33	33	33	
		8b Jumlah mitra kerja yang berperan serta dalam pemberdayaan lini lapangan	315.4.6 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan kualitas mekanisme operasional di Lini Lapangan	33	33	33	33	
			3331.6 Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan SDM provinsi					
		9 Jumlah pembinaan SDM provinsi	316 Peningkatan kapasitas SDM					
			316.1 Pembinaan SDM Provinsi					
			316.1.1 Pendidikan dan Pelatihan berjenjang					
			316.1.1.1. Pra Jabatan	33	33	33	33	
			316.1.1.2. Diklat PIM Tk II,III,IV	33	33	33	33	
			316.1.1.3. Diklat Jabatan Fungsional	33	33	33	33	
			316.1.1.4. Diklat Widyaiswara	33	33	33	33	
			316.1.2 Pelatihan Kompetensi					
			316.1.2.1. Pelatihan kompetensi SDM Diklat	33	33	33	33	
			316.1.2.2. Pelatihan kompetensi pegawai struktural	33	33	33	33	
			316.1.3 Pelatihan Teknis					
			316.1.3.1. Pelatihan Demografi	33	33	33	33	
			316.1.3.2. Pelatihan R/R bagi Pengelola data dan Informasi di kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			316.1.4 Kegiatan lain terkait dengan peningkatan kualitas SDM Provinsi	33	33	33	33	
		9.a Persentase TOGA, TOMA, TODA yang terlatih	316.2 Peningkatan pengetahuan Tokoh Agama. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat					
			316.2.1 Pelatihan Tokoh Agama tentang program KKB	33	33	33	33	
			316.2.2 Pelatihan Tokoh Masyarakat tentang program KKB	33	33	33	33	
			316.2.3 Pelatihan Tokoh Adat tentang program KKB	33	33	33	33	
			316.2.4 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan pengetahuan Tokoh Agama. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat	33	33	33	33	
		9.b Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih	316.3 Pelatihan motivator swasta dan LSM					
			316.3.1 Pelatihan motivator swasta tentang program KKB	33	33	33	33	
			316.3.2 Pelatihan motivator adat tentang program KKB	33	33	33	33	
			316.3.3 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan pengetahuan Tokoh Agama. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		9c	Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU)	316.4	LDU PKB/PLKB					
				316.4.1	Identifikasi sasaran	33	33	33	33	
				316.4.2	Pelatihan LDU PKB/PLKB	33	33	33	33	
				316.4.3	Kegiatan lain terkait dengan LDU	33	33	33	33	
		9d	Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan Refreshing	316.5	Refreshing PKB/PLKB					
				316.5.1	Identifikasi sasaran	33	33	33	33	
				316.5.2	Pelatihan Refreshing PKB/PLKB	33	33	33	33	
				316.5.3	Kegiatan lain terkait dengan pelatihan Refreshing	33	33	33	33	
		9e	Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan Teknis	316.6	Pelatihan Teknis bagi PKB/PLKB					
				316.6.1	Pelatihan Analisis sederhana pendataan keluarga	33	33	33	33	
				316.6.2	Pelatihan pencatatan dan pelaporan	33	33	33	33	
				316.6.3	Pelatihan Konsultasi inter Personal (KIP)/Konseling	33	33	33	33	
				316.6.4	Pelatihan tentang pembinaan ketahanan keluarga	33	33	33	33	
				316.6.5	Pelatihan tentang pembinaan PIK Remaja/Mahasiswa	33	33	33	33	
				316.6.6	Pelatihan tentang pemberdayaan ekonomi keluarga	33	33	33	33	
				316.6.7	Kegiatan lain terkait dengan pelatihan Pelatihan Teknis bagi PKB/PLKB	33	33	33	33	
		9f	Jumlah pelatihan medis tehnis bagi Bidan	316.7	Pelatihan Teknis bagi Bidan					
				316.7.1	Pelatihan IUD dan Implant	33	33	33	33	
				316.7.2	KIP/K dengan ABPK	33	33	33	33	
				316.7.3	Kegiatan lain terkait dengan peningkatan kompetensi bidan	33	33	33	33	
		9g	Jumlah pelatihan medis tehnis bagi Dokter	316.8	Pelatihan Teknis bagi Dokter					
				316.8.1	Pelatihan IUD dan Implant	33	33	33	33	
				316.8.2	Pelatihan MOP	33	33	33	33	
				316.8.3	Pelatihan MOW	33	33	33	33	
				316.8.4	Kegiatan lain terkait dengan peningkatan kompetensi dokter	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			3331.7 Pengelolaan Data dan informasi program Kependudukan dan KB di Provinsi					
	10	Pengelolaan Data dan informasi program Kependudukan dan KB di Provinsi	317 Peningkatan Pengelolaan Data dan informasi program Kependudukan dan KB di Provinsi					
		10a Jumlah data dan informasi pembangunan KKB yang terkini dan terpercaya berbasis IT	317.1 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Berbasis TIK					
			317.1.1 Sosialisasi Kebijakan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Berbasis TIK	33	33	33	33	
			317.1.2 Pendataan keluarga (Orientasi kader pendata, oprs pendataan keluarga, sarasehan)	33	33	33	33	
			317.1.3 Pengumpulan dan pengolahan data hasil pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan	33	33	33	33	
			317.1.4 Pencetakan formulir R/R	33	33	33	33	
			317.1.5 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Berbasis TIK	33	33	33	33	
		10b Presentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan PKKKB	317.2 Peningkatan kualitas analisis dan evaluasi program KKB					
			317.2.1 Analisis dan Evaluasi data hasil Pelayanan kontrasepsi (bulanan)	33	33	33	33	
			317.2.2 Analisis dan Evaluasi data hasil Pengendalian Lapangan (bulanan)	33	33	33	33	
			317.2.3 Analisis dan Evaluasi data hasil Pendataan Keluarga (tahunan)	33	33	33	33	
			317.2.4 Analisis dan Evaluasi data sekunder (tahunan)	33	33	33	33	
			317.2.5 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan kualitas analisis dan evaluasi program KKB	33	33	33	33	
		10c Frekuensi pemutakhiran data provinsi di website	317.3 Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Berbasis TIK					
			317.3.1 Penyajian dan pemutakhiran data dan Informasi hasil Pelayanan kontrasepsi	33	33	33	33	
			317.3.2 Penyajian dan pemutakhiran data dan Informasi Pengendalian Lapangan	33	33	33	33	
			317.3.3 Penyajian dan pemutakhiran data dan Informasi Pendataan Keluarga	33	33	33	33	
			317.3.4 Pengelolaan informasi dan dokumentasi data PKKBN	33	33	33	33	
			317.3.5 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Berbasis TIK	33	33	33	33	
		10d Presentase cakupan jejaring Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi (STIK) di kabupaten dan kota	317.4 Peningkatan kualitas pelayanan jejaring STIK					
			317.4.1 Pengembangan Jejaring STIK	33	33	33	33	
			317.4.2 Pendayagunaan STIK KKB	33	33	33	33	
			317.4.3 Peningkatan software dan hardware STIK	33	33	33	33	
			317.4.4 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan kualitas pelayanan jejaring STIK	33	33	33	33	
		10e Presentase klinik KB pemerintah dan swasta yang terdaftar dalam data base secara on line (dari 23.500 KKB)	317.5 Peningkatan kualitas data basis klinik KB					
			317.5.1 Pendataan dan pendaftaran Klinik KB	33	33	33	33	
			317.5.2 Up dating data base Klinik KB secara on line	33	33	33	33	
			317.5.3 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan kualitas data basis klinik KB	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			3331.8 Bidang Penelitian dan Pengembangan					
	11	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB di Provinsi	318 Peningkatan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB					
			318,1 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kependudukan. KB dan KS					
	11a	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kependudukan yang dimanfaatkan	318.1.1 Survey RPJMN	33	33	33	33	
			318.1.2 Mini Survey	33	33	33	33	
			318.1.3 Pelaksanaan SDKI	-	33	-	-	
			318.1.4 Penyusunan Laporan Hasil Penelitian dan pengembangan kependudukan. KB dan KS	33	33	33	33	
	11b	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS yang dimanfaatkan	318.1.5 Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan kependudukan, KB dan KS	33	33	33	33	
			318.1.6 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan kependudukan. KB dan KS	33	33	33	33	
			318.1.7 Kegiatan lain terkait dengan penelitian dan pengembangan kependudukan. KB dan KS	33	33	33	33	
	11c	Jumlah model-model pengembangan Program Kependudukan	318,2 Pengembangan model-model pengembangan program kependudukan. KB dan KS					
			318.2.1 Model-model penggarapan KB Perusahaan	33	33	33	33	
			318.2.2 Model-model penggarapan KB Perkotaan	33	33	33	33	
			318.2.3 Pengembangan Model Mekanisme Operasional Pembangunan KKB	33	33	33	33	
	11d	Jumlah model-model pengembangan Program KB	318.2.4 Model-model penggarapan Kelompok-kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK/R)	33	33	33	33	
			318.2.5 Kegiatan lain terkait dengan Pengembangan model-model pengembangan program kependudukan,KB dan KS	33	33	33	33	
			3331.9 Bidang Dukungan Manajemen					
	12	Jumlah dukungan manajemen program kependudukan dan KB di Provinsi	319 Peningkatan Kualitas Manajemen Program Kependudukan dan KB					
			319,1 Gaji Langganan Daya Jasa dan Pemeliharaan					
			319.1.1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran					
			319.1.1.1 Tingkat provinsi	33	33	33	33	
			319.1.1.2 Tingkat balai diklat	-	8	8	8	
			319.1.2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
			319.1.2.1 Tingkat provinsi	33	33	33	33	
			319.1.2.2 Tingkat balai diklat	-	8	8	8	
			319.1.3 Pengelolaan kerumahtanggaan dan protokoler perkantoran.					
			319.1.3.1. Jamuan Delegasi	33	33	33	33	
			319.1.3.2. Pelayanan Birokrasi dan Publikasi	33	33	33	33	
			319.1.3.3. Operasional Pimpinan	33	33	33	33	
			319.1.3.4. Kegiatan lain terkait dengan Pengelolaan kerumahtanggaan dan protokoler perkantoran.	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			319.1.4 Operasional langganan daya	33	33	33	33	
			319.1.5 Perawatan dan pemeliharaan gedung, bangunan dan gudang.					
			319.1.5.1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Gudang	33	33	33	33	
			319.1.5.2. Pemeliharaan Halaman	33	33	33	33	
			319.1.5.3. Pemeliharaan Kendaraan Roda-2	33	33	33	33	
			319.1.5.4. Pemeliharaan Kendaraan Roda-4	33	33	33	33	
			319.1.5.5. Pemeliharaan Kendaraan Roda-6	33	33	33	33	
			319.1.5.6. Pemeliharaan Komputer & Notebook	33	33	33	33	
			319.1.5.7. Kegiatan lain terkait dengan Perawatan dan pemeliharaan gedung, bangunan dan gudang.	33	33	33	33	
			319.1.6 Perawatan dan pemeliharaan gedung, bangunan balai diklat					
			319.1.6.1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Gudang	-	8	8	8	
			319.1.6.2. Pemeliharaan Halaman	-	8	8	8	
			319.1.6.3. Pemeliharaan Kendaraan Roda-2	-	8	8	8	
			319.1.6.4. Pemeliharaan Kendaraan Roda-4	-	8	8	8	
			319.1.6.5. Pemeliharaan Komputer & Notebook	-	8	8	8	
			319.1.6.6. Kegiatan lain terkait dengan Perawatan dan pemeliharaan gedung, bangunan dan gudang.	-	8	8	8	
			319.1.7 Pelayanan administrasi, kerumahtanggaan dan sarana prasarana perkantoran					
			319.1.7.1. Honor Pengelola Satker	33	33	33	33	
			319.1.7.2. Keperluan pokok Perkantoran	33	33	33	33	
			319.1.7.3. Pengelolaan kerumahtanggaan	33	33	33	33	
			319.1.7.4. Operasional Perkantoran	33	33	33	33	
			319.1.7.5. Kegiatan lain terkait dengan Pelayanan administrasi, kerumahtanggaan dan sarana prasarana perkantoran	33	33	33	33	
		12a	Jumlah dokumen perencanaan program KKB di provinsi					
			319,2 Peningkatan kualitas Perencanaan Program dan anggaran Program KKB					
			319.2.1 Sosialisasi kebijakan dan strategi sistem perencanaan program dan anggaran	33	33	33	33	
			319.2.2 Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran dengan sektor terkait	33	33	33	33	
			319.2.3 Penyusunan data basis Perencanaan Program	33	33	33	33	
			319.2.4 Penjabaran PPM PA/PB dan Sasaran KS kabupaten dan kota	33	33	33	33	
			319.2.5 Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder dan mitra kerja	33	33	33	33	
			319.2.6 Fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran	33	33	33	33	
			319.2.7 Sosialisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Dak Bidang KB)	33	33	33	33	
			319.2.8 Orientasi perencanaan program dan anggaran	33	33	33	33	
			319.2.9 Kegiatan lain terkait dengan Perencanaan Program dan anggaran Program KKB	33	33	33	33	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2011	2012	2013	2014		
		12b	Persentase pegawai yang memiliki profil kompetensi	319,3	Peningkatan kualitas kompetensi pegawai				
			319.3.1 Sosialisasi sistem manajemen kinerja (Performance Management System) dalam manajemen SDM			33	33	33	33
			319.3.2 Perencanaan kebutuhan pegawai			33	33	33	33
			319.3.3 Pengelolaan ketatalaksanaan kepegawaian			33	33	33	33
			319.3.4 Penerapan pengelolaan kinerja pegawai			33	33	33	33
			319.3.5 Assessment			33	33	33	33
			319.3.6 Penyusunan KPI individu			33	33	33	33
			319.3.7 Evaluasi pelayanan administrasi, kerumahtanggaan dan sarana prasarana perkantoran			33	33	33	33
			319.3.8 Kegiatan lain terkait dengan Peningkatan kualitas kompetensi pegawai			33	33	33	33
		12c	Persentase ketepatan laporan keuangan dan laporan barang milik negara	319,4	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				
			319.4.1 Penyusunan laporan keuangan			33	33	33	33
			319.4.2 Rekonsiliasi data BMN dan SAK			33	33	33	33
			319.4.3 Rekonsiliasi data BMN dan SAK ke Pusat			33	33	33	33
			319.4.4 koordinasi dengan mitra kerja dalam pengelolaan keuangan			33	33	33	33
			319.4.5 Orientasi keuangan dan BMN			33	33	33	33
			319.4.6 Pemantapan JKK			33	33	33	33
			319.4.7 Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi			33	33	33	33
			319.4.8 Stock Opname			33	33	33	33
			319.4.9 Kegiatan lain terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			33	33	33	33
		12e	Jumlah pengadaan sarana-prasarana yang terpenuhi sesuai standar	319,5	Sarana dan Prasarana perkantoran				
			319.5.1 Pengadaan mobil operasional			33	33	33	33
			319.5.2 Pengadaan sepeda motor fungsional			33	33	33	33
			319.5.3 Pengelolaan sarana prasarana perkantoran			33	33	33	33
			319.5.4 Pembangunan/Rehab gudang/gedung kantor			33	33	33	33
			319.5.5 Kegiatan lain terkait dengan pengelolaan Sarana dan Prasarana perkantoran			33	33	33	33
			319,6	Sarana dan Prasarana perkantoran Balai Diklat					
			319.6.1 Pengelolaan sarana prasarana perkantoran Balai Diklat			-	8	8	8
			319.6.2 Pembangunan/Rehab gudang/gedung kantor Balai Diklat			-	8	8	8
			319.6.3 Kegiatan lain terkait dengan pengelolaan Sarana dan Prasarana perkantoran Balai Diklat			-	8	8	8

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		12d Persentase kabupaten dan kota yang difasilitasi dalam melaksanakan NSPK	319.7 Peningkatan pelaksanaan NSPK					
			319.7.1 Identifikasi sasaran	33	33	33	33	
			319.7.2 Fasilitasi pelaksanaan NSPK	33	33	33	33	
			319.7.3 Pemantauan dan evaluasi	33	33	33	33	
			319.7.4 Kegiatan lain terkait dengan pelaksanaan NSPK	33	33	33	33	
		12f Persentase temuan laporan audit internal yang ditindaklanjuti	319.8 Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Program					
			319.8.1 Pelaksanaan SPIP	33	33	33	33	
			319.8.2 Pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur	33	33	33	33	
		12g Persentase rekomendasi pengawasan yang digunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan	319.8.3 Fasilitasi Pemeriksaan khusus	33	33	33	33	
			319.8.4 Post Audit	33	33	33	33	
			319.8.5 Evaluasi hasil pengawasan intern	33	33	33	33	
			319.8.6 Koordinasi dengan mitra kerja pengawasan	33	33	33	33	
			319.8.7 Workshp auditor	33	33	33	33	
			319.8.8 Penyusunan Laporan Kegiatan	33	33	33	33	
			319.8.9 Kegiatan lain terkait dengan Pengawasan Pelaksanaan Program	33	33	33	33	
			3331.10 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB					
		13 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB	3110.1 Peningkatan kualitas pelaksanaan program Pembangunan Kependudukan dan KB provinsi					
			3110.1.1 Bimbingan Teknis/ wilayah	33	33	33	33	
			3110.1.2 Pembinaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ke kabupaten dan kota	33	33	33	33	
		13a Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKB di Provinsi	3110.1.3 Konsultasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ke Pusat	33	33	33	33	
			3110.1.4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (Masing-masing Bidang, Auditor dan Balai Diklat)	33	33	33	33	
			3110.1.5 Telaah program kependudukan dan keluarga berencana nasional tingkat provinsi	33	33	33	33	
			3110.1.6 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kependudukan dan KB Provinsi (LAKIP dan SPIP)	33	33	33	33	
		13b Persentase kabupaten dan kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan program KKB	3110.1.7 Kegiatan lain terkait dengan Monitoring, Evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program Pembangunan Kependudukan dan KB provinsi	33	33	33	33	
19	Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana		3312 Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana					Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
	1a Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka panjang ke Luar Negeri		121 Peningkatan Kualitas SDM aparatur melalui Diklat ke Luar Negeri					
			121.1 Seleksi dan Pengiriman SDM Aparatur untuk Jenjang S2 di Luar Negeri	5	6	6	6	
	1b Jumlah SDM aparatur yang mengikuti OST dan short course ke luar negeri		121.2 Pengiriman SDM Aparatur untuk Mengikuti OST dan Short Course ke Luar Negeri	18	35	33	31	
	2 Jumlah peserta OST dari negara lain		122 Peningkatan Penyelenggaraan OST Bagi Peserta Luar Negeri					
			122.1 Pelaksanaan OST Pembangunan KKB di Indonesia bagi peserta Negara Lain	40	40	40	40	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			123 Pengembangan Kerjasama Internasional					
		3a Jumlah penyelenggaraan pertemuan/Workshop Internasional sebagai implementasi dari MoU	123.1 Penyelenggaraan Workshop Internasional tentang Pembangunan KKB di Indonesia dengan Menghadirkan Peserta dari Luar Negeri	3	3	3	3	
		3b Jumlah pejabat/staf BKKBN dan mitra kerja yang mengikuti pertemuan internasional di luar negeri	123.2 Partisipasi Pejabat dan SDM Aparatur Menjadi Pembicar/Delegasi Negara Mengikuti Pertemuan Internasional di Luar Negeri	17	14	12	11	
		4 Jumlah pembinaan program dan monitoring evaluasi	124 Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Kerjasama Internasional	11	11	11	11	
			124.1 Pembinaan Program					
			124.2 Monitoring dan Evaluasi Program					
20	Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana		3309 Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana					Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
		1 Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan tenaga program	091 Pengembangan kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan tenaga Program					
			091.1 Penyusunan Perangkat Tata Laksana Diklat	4	1	1	1	
		2a Jumlah kurikulum, materi/ media yang dikembangkan dan digunakan	092 Pengembangan kurikulum, materi/media pembelajaran dan modul pembelajaran melalui TI					
			092.1 Penyusunan Kurikulum, Materi/Media dan Modul Pembelajaran	15	6	6	5	
		2b Persentase widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan	093 Peningkatan widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan					
			093.1 Pelatihan utk widyaiswara					
		3 Jumlah kemitraan dalam pendidikan dan pelatihan SDM aparatur :	094 Pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi					
		3a Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama dalam pengembangan program diklat SDM paratur dan SDM Tenaga Program	094.1 Pelatihan berjenjang	34	34	34	34	
			094.2 Pendidikan Jangka Panjang	34	34	34	34	
			094.3 Pelatihan kompetensi	34	34	34	34	
		3b Jumlah mitra kerja yang terlibat proses belajar mengajar dalam pelatihan SDM aparatur	094.4 Pelatihan Teknis	34	34	34	34	
			094.5 Penyusunan Program dan Rencana Kerja	1	1	1	1	
		4 Jumlah SDM yang kompeten dan terampil dalam pembinaan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur :	095 Kerjasama pengembangan program dan penyelenggaraan diklat dengan lembaga diklat pemerintah dan swasta					
		4a Jumlah SDM Aparatur yang dilatih	095.1 Kemitraan dengan lintas sektor dan program terkait	12	12	12	12	
		4b Persentase SDM aparatur dilatih yang meningkat kompetensinya						

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		5	Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan kediklitan aparat	096	Pembinaan, fasilitasi dan capacity building pengelola diklat					
				096.1	Pembinaan program	34	34	34	34	
		5a	Jumlah Balatbang dan Balai Diklat yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dalam kediklitan							
		5b	Persentase Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi standar kediklitan	097	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat					
				097.1	Monitoring Evaluasi	34	34	34	34	
		5c	Persentase permasalahan diklat yang teridentifikasi dan dapat ditindaklanjuti							
				097.2	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
21	Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			3310	Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS
		1	Jumlah kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan KB dan KS	101	Pengembangan kebijakan dan strategi KB dan KS yang dapat dimanfaatkan oleh mitra dan jejaring litbang					
				101.1	Penyusunan perangkat tata laksana litbang KB dan KS	1	1	1	1	
				101.2	Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan kebijakan dan strategi KB dan KS yang dapat dimanfaatkan oleh mitra dan jejaring litbang	1	1	1	1	
		2a	Jumlah penelitian dan pengembangan KB dan KS sesuai kebutuhan	102	Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan program KB dan KS sesuai kebutuhan dan prioritas masalah					
				102.1	Penelitian dan pengembangan KB	2	2	2	2	
		2b	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS							
				102.2	Penelitian dan Pengembangan KS	2	2	2	2	
				102.3	Penyusunan implikasi hasil penelitian KB dan KS	2	2	2	2	
				102.4	Analisis Lanjut Hasil Survei Nasional	6	6	6	6	
				102.5	Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan program KB dan KS sesuai kebutuhan dan prioritas masalah		1	1	1	
		3a	Jumlah forum dan jurnal yang dipergunakan untuk diseminasi hasil - hasil penelitian	103	Pengembangan berbagai forum dan jurnal untuk mendesiminasikan dan memasarkan hasil litbang KB dan KS					
				103.1	Workshop/ seminar	5	5	5	5	
		3b	Jumlah policy brief bagi penentu kebijakan tentang KB dan KS							
				103.2	Penyajian referat	2	2	2	2	
				103.3	Penyajian hasil penelitian melalui IT	12	12	12	12	
				103.4	Jurnal ilmiah	1	1	1	1	
				103.5	Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan berbagai forum dan jurnal untuk mendesiminasikan dan memasarkan hasil litbang KB dan KS	1	1	1	1	
		4	Jumlah mitra litbang yang melakukan kerjasama dengan Puslitbang KB dan KS	104	Pengembangan rumusan kebijakan bagi pimpinan dan stakeholder utama untuk perencanaan dan pengambilan keputusan					
				104.1	Workshop	2	2	2	2	
				104.2	Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan rumusan kebijakan bagi pimpinan dan stakeholder utama untuk perencanaan dan pengambilan keputusan	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2011	2012	2013	2014		
			105 Pengembangan kerjasama dan koordinasi dengan mitra dan jejaring litbang di pusat dan daerah.						
			105.1 Koordinasi lintas sektor	12	12	12	12		
			105.2 Pertemuan senter	12	12	12	12		
			105.3 Bimbingan Teknis	34	34	34	34		
			105.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan kerjasama dan koordinasi dengan mitra dan jejaring litbang di pusat dan daerah.	1	1	1	1		
		5 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang KB dan KS yang dilaksanakan	106 Fasilitasi dan pembinaan program kepada jejaring litbang dan mitra kerja terkait.						
			106.1 Rapat-rapat koordinasi	12	12	12	12		
		5a Jumlah mitra litbang yang memperoleh fasilitasi	106.2 Peningkatan dan bimbingan	12	12	12	12		
		5b Persentase permasalahan litbang KB dan KS yang ditindaklanjuti	106.3 Rapat-rapat koonsolidasi	4	4	4	4		
			106.4 Bimbingan teknis	10	10	10	10		
			106.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Fasilitasi dan pembinaan program kepada jejaring litbang dan mitra kerja terkait.	1	1	1	1		
			107 Meningkatkan kualitas sistem monitoring dan evaluasi litbang KB dan KS						
			107.1 Monitoring dan evaluasi	33	33	33	33		
			107.2 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2		
			107.3 Identifikasi permasalahan litbang KB dan KS	2	2	2	2		
			107.4 Monitoring strategis	6	6	6	6		
			107.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Meningkatkan kualitas sistem monitoring dan evaluasi litbang KB dan KS	1	1	1	1		
22	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan		3311 Penelitian dan Pengembangan Kependudukan					Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	
		1	Jumlah Kebijakan dan strategi pengembangan litbang kependudukan	111 Pengembangan Kebijakan dan Staregi penelitian dan pengembangan kependudukan					
				111.1 Penyusunan perangkat tata laksana penelitian dan pengembangan kependudukan	1	-	-		1
				111.2 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan dan Staregi penelitian dan pengembangan kependudukan	1	1	1		1
				112 Pengidentifikasi dan mapping kebijakan Kependudukan dan penyusunan implikasi hasil penelitian melalui intensifikasi lintas komponen					
				112.1 Penyusunan kebijakan kependudukan	1	1	1		1
				112.2 Penyusunan hasil penelitian	1	1	1		1
				112.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengidentifikasi dan mapping kebijakan Kependudukan dan penyusunan implikasi hasil penelitian melalui intensifikasi lintas komponen	1	1	1		1
		2a	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan (SDKI)	113 Peningkatan kualitas hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan berdasarkan berbagai permasalahan ada					
		2b	Persentase hasil Litbang Kependudukan yang dimanfaatkan	113.1 Penelitian dan pengembangan kependudukan	3	4	5	3	
				113.2 Pengembangan model kependudukan	2	2	2	2	
				113.3 Survei Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI)	-	1	-	-	
		2c	Jumlah model-model pengembangan kependudukan	113.4 Analisa Lanjut Survei-survei kependudukan	-	1	1	1	
				113.5 Kajian-kajian kependudukan	1	1	1	1	
				113.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan berdasarkan berbagai permasalahan ada	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		3a	Jumlah karya tulis ilmiah hasil litbang kependudukan di jurnal/prosiding/majalah	114	Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kependudukan kepada stakeholders, mitra kerja dan masyarakat					
			114.1 Seminar			34	34	34	34	
		3b	Jumlah Policy Brief kependudukan bagi penentu kebijakan		114.2 Pengembangan materi publikasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	34	34	34	34	
					114.3 Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kependudukan melalui website BKKBN	34	34	34	34	
					114.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kependudukan kepada stakeholders, mitra kerja dan masyarakat	1	1	1	1	
					115	Pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan kependudukan				
						115.1 Assesment pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	34	34	34	34
						115.2 Penyusunan policy brief hasil penelitian dan pengembangan	1	1	1	1
						115.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	1	1	1	1
		4	Jumlah mitra kerja aktif litbang kependudukan	116	Pengembangan dan Perkuatan jejaring kemitraan dalam meningkatkan capacity building					
						116.1 Pengembangan sistem jejaring dan mitra kerja penelitian dan pengembangan kependudukan	34	34	34	34
						116.2 Implementasi Kerjasama jejaring dengan mitra kerja	34	34	34	34
						116.3 Capacity building SDM mitra kerja penelitian dan pengembangan kependudukan	34	34	34	34
						116.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan dan Perkuatan jejaring kemitraan dalam meningkatkan capacity building	1	1	1	1
		5	Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang kependudukan	117	Peningkatan fasilitas dan pembinaan program penelitian dan pengembangan					
						117.1 Pembinaan Program	34	34	34	34
		5a	Persentase permasalahan litbang Kependudukan yang ditindaklanjuti		117.2 Administrasi Program	1	1	1	1	
						117.3 Fasilitasi penelitian dan pengembangan kependudukan	34	34	34	34
						117.4 Pertemuan konsolidasi dan koordinasi	34	34	34	34
						117.5 Monitoring Evaluasi	34	34	34	34
						117.6 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2
						117.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan fasilitas dan pembinaan program penelitian dan pengembangan	1	1	1	1

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
23	Perencanaan Program dan Anggaran		3302 Perencanaan Program dan Anggaran					Biro Perencanaan
			021 Perumusan dan Penyempurnaan Kebijakan strategi dan materi informasi Perencanaan Program dan Anggaran					
		1 Jumlah kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan	021.1 Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Program					
			021.1.1 Penyusunan dan Penyempurnaan Sub Sistem Perencanaan	1	-	-	1	
			021.1.2 Pedoman penyusunan BSC	-	1	-	-	
			021.1.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Program	1	1	1	1	
			021.2 Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Anggaran					
			021.2.1 Penyusunan Pedoman Anggaran Program PKKB	1	1	1	1	
			021.2.2 Penyusunan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PKKB Tahun 2012	1	1	1	1	
			021.2.3 Penyusunan usulan pembiayaan DAK	1	1	1	1	
			021.2.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Anggaran	1	1	1	1	
			022 Pengembangan Data Basis Perencanaan yang berbasis TI					
		2 Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis TI	022.1 Updating data basis perencanaan	1	1	1	1	
			022.2 Penyusunan Pedoman Data Basis Perencanaan Program KKB	1	1	1	1	
			022.3 Penyusunan Data Basis Perencanaan Program KKB	1	1	1	1	
			022.4 Analisis dan Penyempurnaan Data Basis Perencanaan	1	1	1	1	
			022.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Data Basis Perencanaan yang berbasis TI	1	1	1	1	
			023 Pengkajian dan Penyempurnaan PPM PA/PB dan Sasaran KS					
		3 Persentase komponen pusat dan provinsi yang menyetujui PPM PA/PB dan Sasaran KS	023.1 Perumusan dan Penyusunan PPM PA/PB dan Sasaran KS	1	1	1	1	
			023.2 Kajian PPM PA/PB dan Sasaran KS					
			023.2.1 Inventarisasi Indikator dan Sasaran Program KKB	1	1	1	1	
			023.2.2 Analisis dan Penyempurnaan Indikator dan Sasaran KKB	1	1	1	1	
			023.2.3 Perumusan dan Penetapan Indikator dan Sasaran KKB	1	1	1	1	
			023.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengkajian dan Penyempurnaan PPM PA/PB dan Sasaran KS	1	1	1	1	
			024 Pematuan dan Perumusan Perencanaan Program dan anggaran dengan Prioritas Nasional					
		4 Jumlah perencanaan program yang berkualitas	024.1. Koordinasi Perencanaan Program dengan Isntansi Terkait					
			024.1.1 Penyusunan Konsep Masukan RPJM Pembangunan KKB	1	-	-	1	
			024.1.2 Penyusunan Draft Masukan RKP	1	1	1	1	
			024.1.3 Penyusunan dan Penyempurnaan Restrukturisasi Program dan Kegiatan	1	-	-	1	
			024.1.4 Penyempurnaan Rencana Strategis Program Pembangunan Kependudukan dan KB	1	-	-	1	
			024.1.5 Analisa Usulan Kegiatan Program KKB	1	1	1	1	
			024.1.6 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA - KL) Program KKB	1	1	1	1	
			024.2 Konsolidasi Perencanaan Program KKB Pusat dan Provinsi (KOREN I)	34	34	34	34	
			024.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Koordinasi Perencanaan Program dengan Isntansi Terkait	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			025 Pemaduan dan Penyelarasan Perencanaan PHLN dengan Pembangunan Prioritas Nasional dan Sasaran MDG'S					
	5	Jumlah donor yang mendukung Pembiayaan Pembangunan KKB	025.1 Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran bersumber dari Bantuan Luar Negeri	13	13	13	13	
			025.2 Kegiatan lain yang terkait dengan Pemaduan dan Penyelarasan Perencanaan PHLN dengan Pembangunan Prioritas Nasional dan Sasaran MDG'S	1	1	1	1	
			026 Pemaduan dan Penyelarasan Perencanaan Anggaran Yang Berbasis Kinerja berdasarkan KPJM dan Unified Budgeting					
		6a Persentase perencanaan program dan anggaran dari semua komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas	026.1 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	1	1	1	1	
			026.2 Penyusunan Anggaran Responsif Gender	1	1	1	1	
			026.3 Koordinasi Perencanaan Anggaran dengan Instansi Terkait					
		6b Persentase dukungan anggaran sesuai kebutuhan program	026.3.1 Analisa Kebutuhan Anggaran	1	1	1	1	
			026.3.2 Penyusunan Satuan 3	34	34	34	34	
			026.3.3 Analisa Satuan Biaya Kegiatan Program PKKB	1	1	1	1	
			026.4 Konsolidasi Perencanaan Anggaran KKB Pusat dan Provinsi (KOREN II)	34	34	34	34	
			026.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Pemaduan dan Penyelarasan Perencanaan Anggaran Yang Berbasis Kinerja berdasarkan KPJM dan Unified Budgeting	1	1	1	1	
			027 Pengkajian dan Penyempurnaan Peta Strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB					
	7	Peta strategi, BSC Eselon I dan II serta Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB	027.1 Penyempurnaan Peta Strategi BSC. Scorecard individu Eselon III dan IV	-	2	2	2	
			027.2 Sosialisasi BSC	-	34	34	34	
			027.3 Pemantapan SMO	-	1	1	1	
			027.4 Evaluasi indikator kinerja	-	34	34	34	
			027.5 Pemantauan aplikasi	-	34	34	34	
			027.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengkajian dan Penyempurnaan Peta Strategi. BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB	1	1	1	1	
			028 Peningkatan kualitas fasilitasi dan technical assistance dalam perencanaan program dan anggaran					
	8	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB	028.1 Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran					
			028.1.1 Peningkatan kapasitas perencanaan program KKB	34	34	34	34	
		8a Persentase permasalahan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB yang ditindaklanjuti	028.1.2 Sosialisasi kebijakan, strategi program Pembangunan KKB	34	34	34	34	
			028.1.3 Bimbingan dan Pembinaan Pelaksanaan Program	34	34	34	34	
			028.1.4 Peningkatan kualitas operasional perencanaan	1	1	1	1	
			028.1.5 Orientasi perencanaan	1	1	1	1	
			028.1.6 Rakor perencanaan anggaran dan Pemaduan program	-	34	34	34	
			028.1.7 Workshop penyusunan perencanaan program dan anggaran bagi perencana pusat dan propinsi	-	34	34	34	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			028.1.8 Penerapan budaya CUK di Biro Perencanaan	-	1	1	1	
			028.1.9 Studi banding perencanaan program dan anggaran	-	1	-	-	
			028.1.10 Pengembangan keterampilan perencana bagi SDM Biro Perencanaan	-	1	1	1	
			028.1.11 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran	-	1	1	1	
			028.2 Meningkatkan monitoring dan Evaluasi perencanaan program dan anggaran					
			028.2.1 Rapat koordinasi perencanaan	34	34	34	34	
			028.2.2 Konsultasi perencanaan	34	34	34	34	
			028.2.3 Evaluasi pelaksanaan perencanaan	34	34	34	34	
			028.2.4 Uji petik DAK/ pemantauan DAK	34	34	34	34	
			028.2.5 Bimbingan teknis program dan anggaran	34	34	34	34	
			028.2.6 Konsultasi bidang	1	1	1	1	
			028.2.7 Konsultasi seksi	1	1	1	1	
			028.2.8 Penyediaan sarana perencanaan	1	1	1	1	
			028.2.9 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (LAKIP dan SPIP)	-	4	4	4	
			028.2.10 Monitoring dan Evaluasi perencanaan program dan anggaran	34	34	34	34	
			028.2.11 Kegiatan lain yang terkait dengan Meningkatkan monitoring dan Evaluasi perencanaan program dan anggaran	1	1	1	1	
24	Pengelolaan Administrasi Pegawai		3303 Pengelolaan Administrasi Pegawai					Biro Kepegawaian
		1	031 Pengembangan sistem manajemen kinerja (Performance Management System) dalam manajemen SDM	1	1	1	1	
		1a	Jumlah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan	1	1	1	1	
		1b	Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem manajemen kinerja (98%)	1	1	1	1	
		1c	Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi	34	34	34	34	
			032 Pengembangan perencanaan kebutuhan SDM pegawai					
			032.1 Analisa Beban Kerja	1	1	1	1	
			032.2 Analisa Jabatan	1	1	1	1	
			032.3 Pengembangan Rekrutment SDM Pegawai	1	1	1	1	
			032.4 Pengembangan Perencanaan Kebutuhan Pegawai	34	34	34	34	
			032.5 Koordinasi Perencanaan kebutuhan pegawai dengan Instansi terkait	1	1	1	1	
			032.6 Uraian Pekerjaan	1	1	1	1	
			032.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan perencanaan kebutuhan SDM pegawai	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		2	Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya	033	Pengembangan peta/profil Kompetensi					
			033.1 Standar Kompetensi			1	1	1	1	
			033.2 Pemetaan Kompetensi SDM Pegawai			1	1	1	1	
			033.3 Sosialisasi Pengembangan peta/profil Kompetensi			34	34	34	34	
			033.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan peta/profil Kompetensi			1	1	1	1	
				034	Pengembangan peta Kekuatan SDM Pegawai:					
		3a	Jumlah peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan terpercaya		034.1 Pengembangan Talent Mapping	1	1	1	1	
					034.2 Sosialisasi Pengembangan peta Kekuatan SDM Pegawai	34	34	34	34	
					034.3 Peta kekuatan potensi pegawai	34	34	34	34	
					034.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan peta Kekuatan SDM Pegawai	1	1	1	1	
		3b	Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard individu yang terkini dan terpercaya	035	Pengembangan scorecard individu pegawai	34	34	34	34	
					035.1 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan scorecard individu pegawai	1	1	1	1	
		4a	Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan Budaya Kerja CUK	036	Pengembangan Budaya Kerja CUK					
					036.1 Sosialisasi Budaya Kerja CUK dan Pakta Integritas	34	34	34	34	
		4b	Persentase pejabat telah melaksanakan pakta integritas		036.2 Penilaian Penerapan Budaya Kerja CUK dan Pakta Integritas	34	34	34	34	
					036.3 Penerapan Penegakan disiplin SDM pegawai	34	34	34	34	
					036.4 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Budaya Kerja CUK	1	1	1	1	
		5	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan Askes dll)	037	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian					
					037.1 Koordinasi dengan Instansi terkait	1	1	1	1	
					037.2 Pengembangan Sistem Data Base Pegawai	1	1	1	1	
					037.3 Pengembangan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	
					037.4 <i>Capacity Building</i> SDM Pengelola Kepegawaian	34	34	34	34	
					037.5 Pengembangan Sistem Layanan Informasi Kepegawaian	1	1	1	1	
					037.6 Sosialisasi	34	34	34	34	
					037.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian					

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		6a	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI)	038	Peningkatan monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi					
					038.1	Pembinaan Program	34	34	34	34
					038.2	Monitoring Evaluasi	34	34	34	34
		6b	Persentase permasalahan pengelolaan pegawai yang ditindaklanjuti		038.3	Penyelesaian permasalahan kepegawaian	34	34	34	34
					038.4	Pengembangan Pedoman Angka Kredit PKB/PLKB	34	34	34	34
					038.5	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja biro kepegawaian (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2
25	Pengelolaan Administrasi Umum			3304	Pengelolaan Administrasi Umum					Biro Umum
		1a	Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan kerumah tanggaan	041	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang cepat dan tepat					
					041.1	Peningkatan kualitas pelayanan kerumahtanggaan	34	34	34	34
		1b	Jumlah kasus kehilangan dan pencurian di lingkungan kantor		041.2	Peningkatan kualitas keamanan				
					041.2.1	Penyediaan sarana prasarana kerumahtanggaan	1	1	1	1
		1c	Persentase cakupan pemeliharaan gedung & bangunan kantor, kendaraan Dinas dan sarana dan prasarana kerja pegawai BKKBN Pusat		041.2.2	Peningkatan Kualitas Keamanan	1	1	1	1
					041.2.3	Peningkatan sistem keamanan	1	1	1	1
		1d	Indeks kepuasan pegawai terhadap kebersihan		041.2.4	Penyediaan sarana dan prasarana keamanan	1	1	1	1
					041.3	Peningkatan cakupan pemeliharaan gedung & bangunan kantor, kendaraan Dinas dan sarana dan prasarana kerja pegawai BKKBN Pusat				
					041.3.1	Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kantor	1	1	1	1
					041.3.2	Terselenggaranya cakupan pemeliharaan gedung & bangunan kantor, kendaraan dinas	1	1	1	1
					041.3.3	Sarana prasarana kerja pegawai	1	1	1	1
					041.3.4	Tersedianya ruangan kerja beserta sarana dan prasarana kerja pegawai	1	1	1	1
					041.3.5	Cakupan pemeliharaan dan penghapusan BMN	34	34	34	34
					041.3.6	Pemeliharaan Rutin (gedung, gudang, rumah jabatan dan barang milik negara lainnya)	1	1	1	1
					041.4	Peningkatan kualitas pelayanan kerumahtanggaan dalam rangka pelayanan pimpinan dan Tamu Pimpinan				
					041.4.1	Peningkatan layanan Pertemuan dan Rapat-rapat pimpinan	1	1	1	1
					041.4.2	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana rapat dan pertemuan pimpinan	1	1	1	1
					041.4.3	Ketepatan pembayaran gaji dan uang makan pegawai	1	1	1	1
					041.4.4	Pemeliharaan program Aplikasi Gaji	1	1	1	1
					041.4.5	Penyediaan Dozer Gaji Pegawai	1	1	1	1

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			041.5 Peningkatan kualitas pelayanan jamuan pimpinan dan tamu pimpinan					
			041.5.1 Pelayanan jamuan Pimpinan dan Tamu Pimpinan dalam rangka kedinasan	1	1	1	1	
			041.5.2 Pelayanan jamuan dalam rangka Pembinaan Mental dan Agama (BIROHIS)	1	1	1	1	
			041.6 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran					
			041.6.1 Fasilitasi ketahanan tubuh pegawai	1	1	1	1	
			041.6.2 Langganan daya dan jasa	34	34	34	34	
			041.6.3 Outsourcing (satpam, cleaning service, penanggung jawab gudang alkon, dll)	1	1	1	1	
	2a	Persentase petugas protokol yang prima	042 Peningkatan kualitas pelayanan petugas protokol					
			042.1 Peningkatan kualitas pelayanan petugas protokol					
	2b	Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler .	042.1.1 Orientasi petugas protokol	34	34	34	34	
			042.1.2 Pelatihan petugas protokol bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	34	34	34	34	
			042.1.3 Penyusunan pedoman keprotokolan	34	34	34	34	
	3	Persentase pelayanan administrasi umum yang berkualitas	043 Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran yang cepat dan tepat					
			043.1 Peningkatan kualitas pelayanan Sekretaris Pimpinan					
	3a	Persentase Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman Surat-surat Dinas	043.1.1 Orientasi Sekretaris Pimpinan	34	34	34	34	
			043.1.2 Penyusunan Pedoman kesekretarian	34	34	34	34	
			043.1.3 Penyusunan jadwal kegiatan pimpinan	1	1	1	1	
			043.1.4 Penyusunan konsep materi arahan, pidato dan telaaahan Pimpinan	1	1	1	1	
	3b	Persentase Terselenggaranya Penataan Arsip dan Dokumen	043.2 Pengembangan sistem kearsipan					
			043.2.1 Terselenggaranya Penataan Arsip dan Dokumen	34	34	34	34	
	3c	Persentase Arsiparis yang mendapatkan pembinaan	043.2.2 Pembuatan Aplikasi Program Kearsipan	34	34	34	34	
			043.2.3 Terselenggaranya digitalisasi arsip	34	34	34	34	
			043.2.4 Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana kearsipan	34	34	34	34	
	3d	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai	043.2.5 Terlaksananya akreditasi arsiparis pusat dan provinsi	34	34	34	34	
			043.2.6 Terlaksananya pembinaan arsiparis pusat dan provinsi	34	34	34	34	
			043.2.7 Tersusunnya Penilaian Angka Kredit Jabatan Arsiparis	34	34	34	34	
			043.3 Peningkatan kualitas pelayanan Surat menyurat					
			043.3.1 Peningkatan kecepatan dan ketepatan pengiriman surat-surat dinas	34	34	34	34	
			043.3.2 Peningkatan kinerja SDM Persuratan	1	1	1	1	
			043.3.3 Terlaksananya kerjasama dengan instansi dan jasa pengiriman terkait	1	1	1	1	
			043.3.4 Tersusunnya Pedoman Persuratan	34	34	34	34	
			043.3.5 Tersedianya ATK pegawai	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
					2011	2012	2013	2014			
		4	Jumlah monitoring , evaluasi dan pembinaan administrasi umum (provinsi)	044	Peningkatan pembinaan program, monitoring dan evaluasi pengelolaan ketatausahaan						
					044.1	Peningkatan keterampilan kesekretariatan dan pelayanan pada pimpinan	34	34	34	34	
					044.2	Fasilitasi dan technical assistance dalam administrasi umum	34	34	34	34	
					044.3	Monitoring dan evaluasi (program ketatausahaan)	34	34	34	34	
					044.4	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja biro umum (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
26	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			3301	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	
		1a	Jumlah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan	011	Pengembangan Kebijakan dan Startegi Pengelolaan Keuangan dan BMN						
					011.1	Penyusunan Sub Sistem Keuangan	-	1	-	1	
					011.2	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	1	
		1b	Persentase unit kerja yang mengimplementasikan Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		011.3	Penyusunan Pedoman Pengelolaan BMN		1		1	
					011.4	Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan BMN	-	-	1	-	
					011.5	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Aikon	1	1	-	-	
					011.6	Penyusunan Pedoman pengadaan Brg & Jasa	1	-	1	-	
					011.7	Pengembangan Aplikasi Pembukuan Bendh	2	1	-	-	
					011.8	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Angg. Kab/Kota	1	1	1	1	
					011.9	Penyusunan Pedoman/Juklak SPIP	1	1	-	-	
		2	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan 6 tepat	012	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa						
					012.1	Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan					
					012.1.1	Pelaks. Pengadaan barang dan Jasa	1	1	1	1	
					012.1.2	Distribusi Sarana dan prasarana	1	1	1	1	
					012.1.3	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	1	1	1	1	
					012.1.4	Administrasi Pergudangan	1	1	1	1	
					012.1.4	Kegiatan lain yang terkait dengan Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan	1	1	1	1	
		2a	Persentase Laporan BMN tepat waktu	012.2	Peningkatan Pengelolaan BMN						
					012.2.1	Inventarisasi Data BMN	2	2	2	2	
					012.2.2	Analisis Data Laporan BMN	12	12	12	12	
					012.2.3	Penyusunan Laporan Inventaris kantor & Kend	2	2	2	2	
					012.2.4	Penyusunan Laporan Data Tanah & Bangunan	2	2	2	2	
					012.2.5	Kodefikasi Barang Inventaris Kantor	1	1	1	1	
					012.2.6	Perumusan Kebijakan Penghapusan	1	1	1	1	
					012.1.7	Pelaksanaan Penghapusan	2	2	2	2	
					012.1.8	Pelaksanaan Lelang	1	1	1	1	
					012.1.9	Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan Pengelolaan BMN		1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		2b Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK-BMN disemua tingkatan	013 Implementasi Pengelolaan SIMAK-BMN					
			013.1 Pengelolaan SIMAK-BMN					
			013.1.1 Rekonsiliasi Laporan BMN	2	2	2	2	
			013.1.2 Pra Review Laporan BMN	2	2	2	2	
			013.1.3 Penyusunan Laporan Tahunan BMN	1	1	1	1	
			013.1.4 Penyusunan Laporan Semesteran BMN	2	2	2	2	
			013.1.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Implementasi Pengelolaan SIMAK-BMN	1	1	1	1	
		3a Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai standard akuntansi	014 Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)					
			014.1 Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan					
			014.1.1 Rekonsiliasi Realisasi Anggaran	2	2	2	2	
			014.1.2 Pra Review Laporan Keuangan	2	2	2	2	
			014.1.3 Penyusunan Laporan Keuangan	3	3	3	3	
			014.1.4 Analisis Data Laporan Keuangan	12	12	12	12	
			014.1.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	1	1	1	1	
		3b Persentase satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	015 Pengelolaan Administrasi Keuangan					
			015.1 Pelaksanaan Pembukuan & Verifikasi					
			015.1.1 Verifikasi Bukti pertanggung jawaban keuangan Satker	12	12	12	12	
			015.1.2 Monitoring dan evaluasi TGR/TP	2	2	2	2	
			015.1.3 Monitoring Pelaksanaan PNBPN	4	4	4	4	
			015.1.4 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan'	1	1	1	1	
			015.1.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan	1	1	1	1	
			015.2 Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran					
			015.2.1 Analisis dan evaluasi Anggaran bantuan Pinjaman/Hibah Luar Negeri	2	2	2	2	
			015.2.2 Analisis dan evaluasi DIPA dan RKAKL	2	2	2	2	
			015.2.3 Pelaksanaan Revisi Anggaran	4	4	4	4	
			015.2.4 Pelaksanaan Pengendalian Anggaran	12	12	12	12	
			015.2.5 Evaluasi Pelaks. Angg. Kab/Kota dan DAK	4	4	4	4	
			015.2.6 Penyusunan LAKIP dan SPIP	1	1	1	1	
			016.2.7 Penyusunan DIPA dan RKAKL	1	1	1	1	
			016.2.8 dst.....					
		4a Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap kebutuhan	016 Pengadaan Sarana & prasarana Perkantoran					
			016.1 Mobil Fungsional (pejabat baru)	5	10	10	10	
			016.2 Rehab Gedung BKKBN (lanjutan)	1	1	1	1	
			016.3 Rehab gedung Diklat/ Pembangunan Rumah dinas / rehab rumah Jabatan	5	5	5	5	
			016.4 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1	1	1	1	
			016.5 Pengembangan IT	1	1	1	1	
			016.6 Administrasi Pengelola Sarana Prasarana	1	1	1	1	
			016.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengadaan Sarana & prasarana Perkantoran	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		1a Jumlah perangkat tata laksana, SPM dan NSPK pembangunan KKB yang dapat disusun	052 Pengembangan perangkat tatalaksana pembangunan KKB					
			052.1 Tindaklanjuti Penyusunan SPM	1	1	1	1	
			052.2 Fasilitasi Penyusunan NSPK	1	1	1	1	
			052.3 Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja	1	1	1	1	
			052.4 Penyusunan Pedoman, Juklak dan Juknis	1	1	1	1	
			052.5 Pembuatan pedoman pembentukan dan kapasitas kelembagaan BKKBD Provinsi, Kabupaten dan Kota	1	1	1	1	
			052.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan perangkat tatalaksana pembangunan KKB	1	1	1	1	
		1b Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota	053 Fasilitasi provinsi dalam pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD Kabupaten dan Kota					
			053.1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPM dan NSPK di provinsi	33	33	33	33	
			053.2 Uji Petik implementasi SPM dan NSPK	33	33	33	33	
		2a Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	054 Peningkatan kualitas fasilitasi bantuan hukum					
			054.1 Fasilitasi dan bantuan hukum bagi lembaga dan pegawai BKKBN	1	1	1	1	
		2b Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	055 Peningkatan kualitas pembinaan hukum, organisasi dan humas					
			055.1 Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34	34	34	34	
			055.2 Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi BKKBN	34	34	34	34	
			055.3 Pelaksanaan Sosialisasi Perangkat TAL	34	34	34	34	
			055.4 Sistem Jaringan Dokumentasi Bantuan Hukum	34	34	34	34	
		3a Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota	056 Fasilitasi provinsi dalam pembentukan BKKBD kabupaten dan kota					
			056.1 Peningkatan kapasitas pengembangan SKPD KKB Kab dan Kota	33	33	33	33	
			056.2 Sosialisasi Pedoman Pembentukan Kelembagaan BKKBD Provinsi, Kab dan Kota	33	33	33	33	
			056.3 Koordinasi kelembagaan	33	33	33	33	
		3b Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, provinsi, kabupaten dan kota)	057 Pengembangan analisa jabatan					
			057.1 Analisa Jabatan	1	1	1	1	
			057.2 Evaluasi Jabatan	1	1	1	1	
			057.3 Evaluasi Uraian Pekerjaan	1	1	1	1	
			057.4 Penilaian kinerja organisasi	1	1	1	1	
			057.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan analisa jabatan	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
				2011	2012	2013	2014			
		4a	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum, Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan (Pusat dan Provinsi)	058	Monitoring Evaluasi					
			058.1 Telaahan Hukum dan Perundang-Undangan			34	34	34	34	
			058.2 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja biro hukum, organisasi dan humas (LAKIP dan SPIP)			2	2	2	2	
			058.3 Evaluasi LAKIP Komponen			1	1	1	1	
			058.4 Laporan Hasil Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi			34	34	34	34	
			058.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Monitoring Evaluasi			1	1	1	1	
		4b	Jumlah permasalahan dalam penataan organisasi dan tatalaksana yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil identifikasi	059	Peningkatan kualitas pembinaan program					
			059.1 Peningkatan Kapasitas Management BIHOM			1	1	1	1	
			059.2 Rapat Koordinasi			1	1	1	1	
			059.3 Rapat Konsultasi pemaduan rencana program			1	1	1	1	
			059.4 Orientasi Kelembagaan			1	1	1	1	
			059.5 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas pembinaan program			1	1	1	1	
		4c	Persentase humas pemerintah dan swasta terkait yang mendapatkan fasilitasi tentang program pembangunan kependudukan dan KB	060	Pemantapan jejaring kehumasan bagi humas pemerintah dan swasta terkait					
			060.1 Bakohumas			1	1	1	1	
			060.2 Peningkatan Peran IPKB			1	1	1	1	
			060.3 Liputan			1	1	1	1	
			060.4 Pemantapan Kehumasan			1	1	1	1	
			060.5 Kunjungan Dapur Redaksi			1	1	1	1	
			060.6 Desiminasi program KKB bagi media Massa			1	1	1	1	
			060.7 Perstour			1	1	1	1	
			060.8 Media Analisis			1	1	1	1	
			060.9 Konferensi Pers			1	1	1	1	
			060.10 Publikasi Kehumasan			1	1	1	1	
			060.11 Media dokumentasi dan Kliping			1	1	1	1	
			060.12 Kegiatan lain yang terkait dengan Pemantapan jejaring kehumasan bagi humas pemerintah dan swasta terkait			1	1	1	1	
28	Peningkatan Pengawasan Program	1	Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan program yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait	3308	PENINGKATAN PENGAWASAN PROGRAM					Inspektorat Program
				081	Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pengawasan Program					
			081.1 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Pengawasan Program			1	1	1	1	
			081.2 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Upaya Lanjut dan Tindak Lanjut pengawasan program			1	1	1	1	
			081.3 Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Audit Pengawasan			1	1	1	1	
			081.4 Penyusunan dan Penyempurnaan Kode Etik dan Nilai-nilai Pengawasan			1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
			082 Peningkatan kualitas laporan pengawasan program					
			082.1 Peningkatan kualitas laporan pengawasan program					
	2a	Persentase Temuan Audit Program yang ditindaklanjuti	082.1.1 Peningkatan kualitas hasil pengawasan program	34	34	34	34	
			082.1.2 Peningkatan kualitas upaya lanjut hasil pengawasan program	34	34	34	34	
			082.1.3 Peningkatan kualitas pemantauan tidak lanjut hasil pengawasan program	34	34	34	34	
			082.1.4 Koordinasi pengawasan intern dan ekstern	34	34	34	34	
			082.1.5 Peningkatan kualitas laporan status masalah bidang program	34	34	34	34	
			082.1.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas laporan pengawasan program	1	1	1	1	
			082.2 Peningkatan pelaksanaan kerja pengawasan program					
	2b	Persentase pelaksanaan kerja pengawasan program	082.2.1 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	34	34	34	34	
			082.2.2 Pelaksanaan pemeriksaan operasional	34	34	34	34	
			082.2.3 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja program	34	34	34	34	
			082.2.4 Pelaksanaan uji petik program KKB	34	34	34	34	
			082.2.5 Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan masyarakat bidang program	34	34	34	34	
			082.2.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan pelaksanaan kerja pengawasan program	1	1	1	1	
			083 Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pembinaan pengawasan program					
	3a	Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Program	083.1 Monitoring, evaluasi dan pembinaan pengawasan program					
			083.1.1 Pelaksanaan monitoring hasil pengawasan program	34	34	34	34	
			083.1.2 Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan program	34	34	34	34	
			083.1.3 Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan Program	34	34	34	34	
			083.1.4 Peningkatan kapasitas pengawasan program	34	34	34	34	
			083.1.5 Peningkatan kompetensi pengawasan program	34	34	34	34	
			083.1.6 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja inspektorat program (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
			083.1.7 Pelaksanaan dan monitoring SPIP	1	1	1	1	
			083.1.8 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pembinaan pengawasan program	1	1	1	1	
			083.2 Pengelolaan administrasi pengawasan					
			083.2.1 Pembinaan pengawasan	1	1	1	1	
			083.2.2 Administrasi Pengawasan	1	1	1	1	
			083.2.3 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengelolaan administrasi pengawasan	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
29	Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	1	3306 PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAAN DAN ADMINISTRASI UMUM					Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum
			061 Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pengawasan Administrasi Umum					
			061.1 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Pengawasan Ketenagaan dan Adm. Umum	1	1	1	1	
			061.2 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Upaya Lanjut dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Ketenagaan dan Adm. Umum	1	1	1	1	
			061.3 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Evaluasi Lakip	1	1	1	1	
			061.4 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA	1	1	1	1	
			061.5 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP	1	1	1	1	
			061.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pengawasan Administrasi Umum	1	1	1	1	
			062 Peningkatan kualitas laporan pengawasan Administrasi Umum					
	2a	Persentase Temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindaklanjuti	062.1 Peningkatan kualitas hasil pengawasan Ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
			062.2 Peningkatan kualitas upaya lanjut hasil pengawasan Ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
			062.3 Peningkatan kualitas laporan semesteran Inpres nomor 5 tahun 2004	34	34	34	34	
			062.4 Peningkatan kualitas pemantauan tidak lanjut hasil pengawasan Ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
			062.5 Koordinasi pengawasan intern dan ekstern	34	34	34	34	
			062.6 Peningkatan kualitas laporan status masalah bidang ketenagaan dan adm. umum	34	34	34	34	
			062.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas laporan pengawasan Administrasi Umum	1	1	1	1	
			063 Peningkatan pelaksanaan kerja pengawasan Administrasi Umum					
	2b	Persentase pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	063.1 Pelaksanaan pemeriksaan operasional	34	34	34	34	
			063.2 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja ketenagaan	34	34	34	34	
			063.3 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja Administrasi Umum	34	34	34	34	
			063.4 Investigasi/Pemeriksaan Khusus kinerja ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
			063.5 Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan masyarakat ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
			063.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan pelaksanaan kerja pengawasan Administrasi Umum	1	1	1	1	
			064 Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pembinaan pengawasan ketenagaan dan Administrasi Umum					
	3a	Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum	064.1 Pelaksanaan monitoring hasil pengawasan Ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
			064.2 Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan Ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
			064.3 Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan Ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
	3b	Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti	064.4 Peningkatan kapasitas pengawasan Ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
			064.5 Peningkatan kompetensi pengawasan Ketenagaan dan Adm. Umum	34	34	34	34	
			064.6 Pelaksanaan evaluasi AKIP	1	1	1	1	
			064.7 Pelaksanaan evaluasi LHKPN	1	1	1	1	
			064.8 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum (LAKIP dan SPIP)	2	2	2	2	
			064.9 Pelaksanaan dan monitoring SPIP	1	1	1	1	
			064.10 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pembinaan pengawasan ketenagaan dan Administrasi Umum	1	1	1	1	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
30	Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan		3307 PENINGKATAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PERBEKALAN					Inspektorat Keuangan dan Perbekalan
		1 Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan perbekalan yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait	071 Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pengawasan keuangan dan perbekalan					
			071.1 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Pengawasan Keuangan dan Perbekalan	1	1	1	1	
			071.2 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Upaya Lanjut dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Keuangan dan Perbekalan	1	1	1	1	
			071.3 Penyusunan dan Penyempurnaan Juknis Review Laporan Keuangan	1	1	1	1	
			071.4 Penyusunan Juknis Review Laporan BMKN	1	1	1	1	
			071.5 Penyusunan Juknis Monitoring dan Evaluasi DAK	1	1	1	1	
			071.6 Penyusunan Juknis Pemeriksaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	
			071.7 Kegiatan lain yang terkait dengan Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pengawasan keuangan dan perbekalan	1	1	1	1	
			072 Peningkatan kualitas laporan pengawasan keuangan dan perbekalan					
		2a Persentase Temuan Audit keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti	072.1 Peningkatan kualitas hasil pengawasan keuangan, sarana dan prasarana, dan BMKN	34	34	34	34	
			072.2 Peningkatan kualitas upaya lanjut hasil pengawasan Keuangan dan Perbekalan	34	34	34	34	
			072.3 Peningkatan kualitas laporan triwulanan hasil audit ekstern	34	34	34	34	
			072.4 Peningkatan kualitas pemantauan tidak lanjut hasil pengawasan Keuangan dan Perbekalan	34	34	34	34	
			072.5 Pemutakhiran data hasil audit ekstern	34	34	34	34	
			072.6 Peningkatan kualitas laporan hasil review keuangan	34	34	34	34	
			072.7 Peningkatan kualitas laporan status masalah bidang keuangan dan perbekalan	34	34	34	34	
			072.8 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas laporan pengawasan keuangan dan perbekalan	1	1	1	1	
			073 Peningkatan pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan					
		2b Persentase pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan	073.1 Pelaksanaan pemeriksaan operasional	34	34	34	34	
			073.2 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja Keuangan	34	34	34	34	
			073.3 Pelaksanaan pemeriksaan kinerja Perbekalan	34	34	34	34	
			073.4 Pemeriksaan Khusus keuangan dan perbekalan	34	34	34	34	
			073.5 Pelaksanaan investigasi pengawasan masyarakat Keuangan dan Perbekalan	34	34	34	34	
			073.6 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan	1	1	1	1	
			074 Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pembinaan pengawasan keuangan dan perbekalan					
		3a Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan	074.1 Pelaksanaan monitoring hasil pengawasan Keuangan dan Perbekalan	34	34	34	34	
			074.2 Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan Keuangan dan Perbekalan	34	34	34	34	
			074.3 Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan Keuangan dan Perbekalan	34	34	34	34	

TABEL 1.3
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2011-2014
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 1.3				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	
		3b Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak lanjuti	074.4 Peningkatan kapasitas pengawasan Keuangan dan Perbekalan	34	34	34	34	
			074.5 Peningkatan kompetensi pengawasan Keuangan dan Perbekalan	34	34	34	34	
			074.6 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja inspektorat keuangan dan perbekalan	2	2	2	2	
			074.7 Pelaksanaan dan evaluasi SPIP	34	34	34	34	
			074.8 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi unit kerja yang akuntabel dalam pelaksanaan keuangan dan perbekalan	34	34	34	34	
			074.9 Pelaksanaan monitoring DAK	34	34	34	34	
			074.10 Kegiatan lain yang terkait dengan Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pembinaan pengawasan keuangan dan perbekalan	1	1	1	1	

JAKARTA, MEI 2011
**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL.**
SEKRETARIS UTAMA ,

DR. SUDIBYO ALIMODESO, MA

